



INDUSTRI

Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

INDEKS KEPERCAYAAN
INDUSTRI EKSPANSIF
**PELAKU
INDUSTRI
OPTIMIS**

Edisi
2023

6 **LAPORAN UTAMA**

Level IKI Masih Ekspansif,
Pelaku Industri Kian
Optimistis

18 **KEBIJAKAN**

Utamakan Produk Lokal,
TKDN IK Jadi Terobosan
Dongkrak Ekonomi

34 **EKONOMI & BISNIS**

Rebut Cuan, Produsen
Mebel Incar Pasar Timur
Tengah



9 772303 203006



Selamat Kepada
**SMK-SMAK
PADANG**

ATAS CAPAIAN

**NILAI
AKREDITASI
TERTINGGI SMK**

Tingkat Nasional
Tahun 2023

Dengan nilai 98 oleh
Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN S/M)



INSTRUMEN KEBIJAKAN TEPAT

Pembaca yang budiman,

Sektor industri selama ini menjadi motor penggerak utama bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah fokus untuk terus mengembangkan sektor industri agar lebih berdaya saing global.

Guna menjaga deru mesin industri tetap berjalan, diperlukan kebijakan yang tepat dan strategis. Dalam rangka pengambilan kebijakan itu, diperlukan suatu analisis data yang lengkap, relevan dan akurat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah selaku regulator.

Pada November 2022, Kementerian Perindustrian meluncurkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), yang menjadi indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga merupakan gambaran kondisi terkini pada industri manufaktur sekaligus prospek situasi bisnis dalam enam bulan ke depan di Indonesia.


Untuk mengetahui lebih mendalam terkait alasan dan manfaat IKI, Media Industri mengulasnya secara utuh pada edisi kali ini. Berbagai narasumber kompeten memberikan pandangan yang positif.

Diharapkan dengan dilansirnya IKI setiap bulan, dapat juga menjadi acuan bagi Kemenperin bersama para pemangku kepentingan lainnya dan pelaku industri, untuk menentukan jurus jitu dalam membangun sektor industri nasional yang produktif dan inovatif.

Apalagi, jika dibandingkan dengan hasil survei serupa, IKI memiliki jumlah responden yang lebih banyak. Artinya, IKI adalah suara pelaku industri yang merepresentasikan seluruh subsektor manufaktur, sehingga bisa disebut hasil survei yang lebih detail dan terlengkap.

Di samping membahas IKI, Media Industri juga menyajikan berbagai berita tentang program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah, khususnya lingkup sektor industri. Misalnya mengenai kebijakan hilirisasi, pengoptimalan produk lokal, pemberian insentif, dan fasilitasi kerja sama.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Sebab, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar, mulai dari peningkatan investasi hingga penyerapan tenaga kerja.

Bahkan, pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air. Apalagi, sudah banyak industri di dalam negeri yang sudah menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing global. 

Salam,

Redaksi



Pengarah: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. **Pemimpin Umum:** Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Humas Kris Sasono Ngudi. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Bimo Arianto Pinandito. **Redaktur Pelaksana:** Andi Suandi. **Editor:** Zoelfikar. **Fotografer:** Titin Fauziyah Rochmawati. **Anggota Redaksi:** Arief Febriant.

Alamat Redaksi:
Biro Hubungan Masyarakat
Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta
Telp : (021) 5255509 ext. 2648
Fax : (021) 5255609

Akun Media Sosial:
Twitter : @Kemenperin_RI
Facebook : Kementerian Perindustrian RI
Instagram : @kemenperin_ri
Youtube : Kementerian Perindustrian RI

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan panjang naskah 3.000-6.000 karakter, disertai identitas penulis.

Naskah dikirim ke email:
humas@kemenperin.go.id

Majalah ini dapat diakses melalui
www.kemenperin.go.id/majalah



8

6 LAPORAN UTAMA

Level IKI Masih Ekspansif, Pelaku Industri Kian Optimistis

Manufaktur Jadi Sektor Andalan Ekonomi

IKI, Terlengkap dan Terpercaya

IKI Sebagai Acuan Penentu Kebijakan

12 KEBIJAKAN

Transaksi Produk Dalam Negeri Dibidik Rp250 Triliun

Optimalkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Mudah, Gratis dan Lima Hari Selesai

Utamakan Produk Lokal, TKDN IK Jadi Terobosan Dongkrak Ekonomi

Jadi Tameng, SNI Lindungi Produk Lokal dari Gempuran Impor

Hore, Beli Motor Listrik Dapat Bantuan Pemerintah



17

24 EKONOMI & BISNIS

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi Foodgrade

Pasok Kebutuhan Global, Produsen Boneka Barbie Ekspansi di Cikarang

Catat Sejarah, Mobil Listrik Indonesia Dobrak Pasar Ekspor

Lebarkan Sayap, Panasonic Tembus Ekspor AC ke Vietnam

Hilirisasi Industri Tambang Sudah Menuai Hasil

Penjualan Otomotif Semakin Melaju Kencang

Rebut Cuan, Produsen Mebel Inkar Pasar Timur Tengah

Stop Impor, Aspal Buton Perlu Dioptimalkan

RI Bidik Jadi Produsen Keramik Terbesar ke-4 Dunia



24

Jurus Kilaukan Kinerja Industri Perhiasan

Industri MRO Lebarkan Sayap ke Pasar Eropa

Jababeka Ecommerce Industrial Park Dukung Penumbuhan Startup

Kontribusi Ekspor Dominan, Industri Manufaktur Capai Surplus

Teknologi Canggih Deteksi Dini Kanker Payudara

Dongkrak Ekspor, Astra Pamerkan Produk 4.0 di Jerman

50 KERJA SAMA

RI Gaet Investor Global di Ajang Hannover Messe 2023

Gandeng Korea dan Australia, Gembleng SDM Kompeten

Kolaborasi Cetak SDM Inovatif Dukung IKM Otomotif



50

Hannover Messe 2023 Raup Investasi dan Kolaborasi Industri

RI-Belanda Siap Pacu Industri Pengolahan Susu

55 VOKASI

Menko PMK Apresiasi Politeknik Furnitur Kendal

Peningkatan Kapasitas SDM Industri 4.0

JARVIS: Jurus Kemenperin Jaring SDM Kompeten

Gandeng Industri, Cetak SDM Kompeten

64 INOVASI

Khasiat Gambir Jadi Pewarna Alami Kain Tenun

Manfaat Penerapan Industri Hijau

AiMS: Solusi Cegah Pencemaran Emisi dan Limbah Cair Industri

Dongkrak Nilai Tambah Salak



68

SURAT PEMBACA

Bagaimana tata cara membuat Izin Usaha Industri bagi perusahaan?

Wisnu Setiyo (Jawa Tengah)

Jawaban:

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS saat ini sudah mengimplementasikan perizinan usaha berbasis resiko sesuai dengan KBLI.

Untuk resiko rendah , perizinan berusaha berupa NIB. Untuk resiko menengah rendah dan menengah tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar.

Untuk resiko tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan Izin. Kami sarankan untuk Saudara melakukan koordinasi dengan OSS RBA terkait izin usaha tersebut. Untuk prosedur dan persyaratan perizinan berusaha dapat dicek melalui : <https://oss.go.id/>.

Bagaimana cara untuk mendaftar iphone yg terblokir jaringannya, pembeliannya didalam negeri

Fahrizal Rizki (Jakarta Timur)

Jawaban:

Terkait pendaftaran IMEI, Kementerian Perindustrian hanya melayani pendaftaran IMEI dari produsen/pabrik, perusahaan importir terdaftar dan distributor resmi. Kementerian Perindustrian tidak melayani permohonan perorangan/pribadi.

Namun, untuk memastikan IMEI terdaftar atau tidak ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Pastikan Pembelian handphone tersebut dilakukan melalui *official store* atau tidak
2. Jika Ya, maka bawa handphone bersama nota pembelian dan kartu garansi ke *official store* tempat pembelian handphone
3. Lakukan pelaporan di *official store* tersebut jika IMEI tidak aktif
4. *Official store* akan memproses pengaktifan IMEI tersebut.

Apakah untuk membuat sertifikasi sistem manajemen mutu dan K3L bisa disini?

Ridwan (Jakarta Selatan)

Jawaban:

Kami sarankan untuk dapat menghubungi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian melalui <https://www.b4t.go.id/kontak-kami/> atau Lembaga verifikasi lainnya sebagai contoh PT Sucofindo.

Saya telah melakukan pendaftaran SIINAS dengan ID pendaftaran. Tapi terdapat kesalahan input pada alamat email sehingga saya tidak bisa mendapatkan usn dan pass.

Ndarin (Surabaya)

Jawaban:

Jika ada perubahan email, silahkan ubah email terlebih dahulu di OSS lalu cetak ulang kembali NIB tersebut. Lalu Softcopy NIB tersebut dapat dikirimkan ke UPP melalui Layanan Konsultasi Online UPP Kemenperin melalui <wa.me/6281319976986> (hari dan jam kerja) atau email upp_pusat@kemenperin.go.id untuk kami perbarui data emailnya. Jika data email sudah petugas UPP diperbarui, perusahaan dapat melakukan reset password kembali.

Saya ingin berkonsultasi langsung ke kantor Kemenperin, Apakah ada nomor antrian, atau jadwal temu terlebih dahulu untuk datang ke kantor? terimakasih

Andhika (Karawang)

Jawaban:

Untuk mendapatkan layanan konsultasi tatap muka di UPP Kementerian Perindustrian perusahaan harus melakukan registrasi H-1 melalui link bit.ly/RegistrasiKonsultasiUPP dimulai dari jam 09.00 atau Saudara dapat melakukan konsultasi secara daring dengan cara menghubungi layanan Whatsapp Kemenperin melalui <wa.me/6281319976986> (hari dan jam kerja).

Untuk mendirikan atau menjalankan pabrik / produksi alat kesehatan, ijin-ijin apa saja yang harus dimiliki?

Michael Hartono (Jakarta Selatan)

Jawaban:

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS saat ini sudah mengimplementasikan perizinan usaha berbasis resiko sesuai dengan KBLI. Untuk resiko rendah , perizinan berusaha berupa NIB. Untuk resiko menengah rendah dan menengah tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar. Untuk resiko tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan Izin . Kami sarankan untuk Saudara melakukan koordinasi dengan OSS RBA terkait izin usaha tersebut. Untuk prosedur dan persyaratan perizinan berusaha dapat dicek melalui : <https://oss.go.id/>.

Bagaimana cara dan syaratnya untuk pembuatan SNI?

Michiko (Bekasi)

Jawaban:

Terkait permohonan SPPT SNI silahkan menghubungi LSPro yang telah ditunjuk sesuai peraturan. Saudara dapat melihat Lembaga Penilai Kesesuaian/LS Pro pada web pustan.kemenperin.go.id>>regulasi teknis>>daftar sni wajib mi



LEVEL IKI MASIH EKSPANSIF, PELAKU INDUSTRI KIAN OPTIMISTIS

Sejak diluncurkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2022, kondisi industri manufaktur nasional masih dalam fase ekspansi. Artinya, para pelaku industri manufaktur di Indonesia memiliki gairah bisnis yang kuat dan tetap optimistis dalam menjalankan usaha ke depannya.

6

Pada November 2022, nilai IKI industri pengolahan berada pada posisi 50,89. Angka ini menunjukkan sektor industri di Tanah Air masih ekspansi. Hal ini patut disyukuri karena pelaku industri menyampaikan bahwa mereka masih optimis dengan kondisi bisnisnya enam bulan mendatang.

Berdasarkan data IKI, dari 23 subsektor industri, 11 subsektor mengalami ekspansi, 12 sektor terpantau mengalami kontraksi. Sebelas subsektor yang mengalami ekspansi tercatat berkontribusi sebesar 71% dari PDB Industri Pengolahan pada triwulan III tahun 2022.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian melansir IKI pada bulan Desember 2022 sebesar 50,90 atau naik 0,01 dibandingkan nilai IKI November 2022. Terjadinya peningkatan level ekspansi indeks ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dari para pelaku industri manufaktur di Indonesia untuk terus berproduksi.

Capaian tingkat ekspansi pada IKI

Desember 2022 merupakan kontribusi dari 11 subsektor industri yang memiliki total sumbangsih sebesar 74,9 % terhadap PDB industri pengolahan nonmigas selama triwulan III tahun 2022.

"Share terhadap PDB yang ekspansi ini meningkat dari 71,3 % menjadi 74,9 %," ungkap Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Penyebab utama kenaikan itu karena subsektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang memiliki kontribusi terhadap PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 7,2 %, meningkat nilai IKI-nya dari yang bulan sebelumnya mengalami kontraksi menjadi ekspansi di Desember.

Plt. Direktur Jenderal Industri Tekstil, Kimia, dan Farmasi (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito turut menyampaikan, terkait industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang ekspansif pada Desember 2022 karena didukung beberapa hal, seperti kembali normalnya aliran pasokan global di kelompok industri tersebut. "Permintaan bahan kimia sangat besar, sehingga dengan

kondisi demikian, kita bisa menangkap peluang pasar," jelasnya.

Berikutnya, nilai IKI pada Januari 2023 menunjukkan angka 51,54, meningkat tajam dibandingkan IKI Desember tahun 2022. Sebanyak 71,4% perusahaan menyatakan kondisi umum kegiatan usaha stabil dan membaik di bulan Januari 2023.

Peningkatan IKI pada Januari 2023 disumbang oleh 12 subsektor industri yang ekspansi, dengan kontribusi sebesar 80,1% terhadap pembentukan PDB industri manufaktur nasional di Triwulan III - 2022. Industri Minuman dan industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional yang sebelumnya mengalami kontraksi, pada Januari ini menunjukkan ekspansi.

Nilai IKI yang ekspansif menunjukkan kondisi sektor manufaktur masih terjaga dan merupakan langkah awal yang baik, khususnya di sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE). Beberapa sektor ILMATE mengalami ekspansi tinggi,

karena ditunjang percepatan proyek infrastruktur dan konstruksi, optimisme pemulihan pasca COVID-19, serta peningkatan pesanan akibat pelonggaran atau dihapusnya PPKM. Selain itu, sektor industri alat berat juga mengalami peningkatan karena permintaan yang tinggi dari sektor pertambangan, konstruksi, dan perkebunan.

Untuk IKI Februari 2023 juga berada pada fase ekspansi dengan capaian sebesar 52,32, konsisten meningkat sejak November 2022. IKI Februari 2023 menunjukkan kenaikan nilai ekspansi yang cukup signifikan sebesar 0,78 poin dibandingkan Januari 2023.

Peningkatan nilai IKI ini ditopang oleh kenaikan jumlah subsektor yang mengalami ekspansi. Terdapat 16 subsektor industri yang mengalami ekspansi dengan *share* 87,7% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

Jika dilihat secara subsektornya, hampir seluruh subsektor industri agro mengalami ekspansi, kecuali industri kayu dan industri furnitur. Bahkan, Industri makanan dan minuman mengalami kenaikan yang signifikan.

“Salah satu faktor pendukung kenaikan IKI pada sektor industri agro adalah aktivitas ekonomi yang sudah berjalan normal setelah pandemi. Kinerja industri makanan dan minuman mulai meningkat, dan optimisme pelaku usaha sangat luar bagus,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

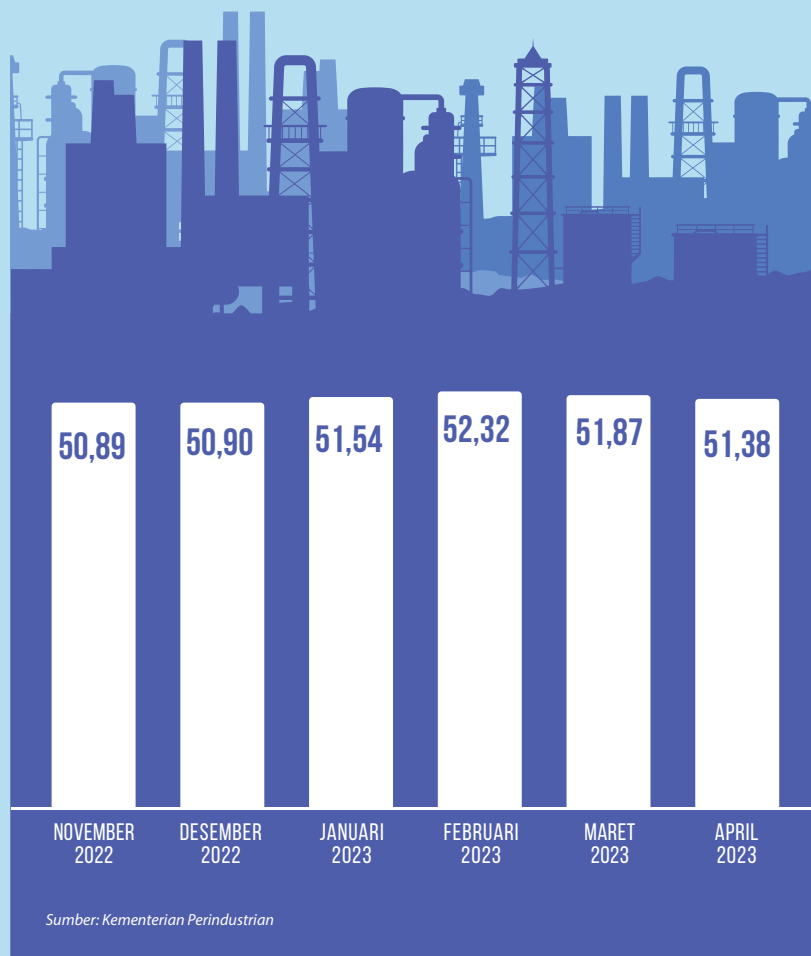
Sekretaris Direktorat Jenderal ILMATE Yan Sibarang menjelaskan kontraksi yang terjadi pada subsektor jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terkait erat dengan belum banyaknya pesanan yang terjadi di awal tahun pada subsektor permesinan.

Sementara itu, untuk subsektor industri tekstil, pakaian jadi dan alas kaki yang mengalami kontraksi akibat kondisi stagnasi ekonomi dan inflasi di negara mitra utama ekspor, Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Adie Rochmanto Pandiangan menjelaskan pihaknya berupaya melakukan perluasan pasar luar negeri, dengan percepatan pelaksanaan perjanjian IEU-CEPA.

Di bulan Maret 2023, IKI masih menunjukkan nilai ekspansi, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan Februari 2023. “IKI Maret 2023 mencapai 51,87, melambat 0,45 poin dibandingkan Februari 2023,” kata Jubir Kemenperin, Febri Hendri.

Hal itu karena sektor industri masih dibayangi penurunan permintaan global

PERKEMBANGAN NILAI IKI



7

akibat tantangan tekanan geopolitik dan inflasi global yang mendorong kenaikan suku bunga sehingga membebani aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pelonggaran pembatasan COVID-19 di China membantu memperbaiki kendala rantai pasokan dan mengurangi tekanan harga bahan baku global.

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Saiful Bahri mengatakan, industri karet barang dari karet yang juga mengalami kontraksi disebabkan adanya proses bisnis pada industri ban yang merupakan kontributor terbesar subsektor barang karet. Pada industri ini, di awal tahun, distributor ban mengurangi pesanan untuk menghabiskan stok yang tersedia.

Sedangkan, momentum Hari Raya yang terjadi di bulan April ikut mendorong kinerja beberapa subsektor industri pengolahan nonmigas menjadi meningkat. Kondisi ini tercermin dari nilai IKI bulan April yang kembali menunjukkan fase ekspansi dengan mencapai nilai

51,38, melambat 0,49 poin dibandingkan Maret 2023.

Meskipun melambat, pada bulan April 2023 terjadi peningkatan jumlah subsektor industri yang mengalami ekspansi yaitu sebanyak 15 subsektor industri, dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang hanya 14 subsektor industri dengan *share* terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2022 mencapai 80,2%. *Share* tersebut ditopang oleh subsektor yang memiliki kontribusi cukup besar seperti Industri Makanan; Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia; dan Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer.

Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, menyampaikan saat ini Kemenperin terus berupaya meningkatkan *demand* produk dalam negeri dengan terus mengkampanyekan “Cinta Produk Dalam Negeri”, dan meningkatkan implementasi TKDN khususnya TKDN-IK. [mi](#)

MANUFAKTUR JADI SEKTOR ANDALAN EKONOMI

Industri manufaktur merupakan sektor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah dan kebijakan yang strategis agar dapat meningkatkan kinerja si ‘motor penggerak’.

Kementerian Perindustrian mencatat, kinerja industri pengolahan nonmigas tumbuh secara impresif di angka 5,01 % sepanjang tahun 2022 atau lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2021 sebesar 3,67 %. Sektor industri menjadi penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 % pada 2022.

Adapun tiga sektor manufaktur yang menjadi sumber penopang ekonomi pada tahun 2022, yakni industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 4,90 %, industri alat angkutan tumbuh 10,67 %, serta industri logam dasar tumbuh 14,80 %.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman dipacu oleh peningkatan produksi komoditas makanan dan minuman serta meningkatnya ekspor CPO akibat tingginya permintaan global. Selanjutnya, pertumbuhan industri alat angkutan melaju karena didukung oleh kebijakan diskon PPNBM sepanjang tahun 2022, dan pertumbuhan di industri logam dasar lantaran didorong oleh peningkatan kapasitas produksi di sentra tambang seiring membaiknya harga komoditas di pasar ekspor.

Di samping itu, industri manufaktur terus konsisten menjadi kontributor terbesar pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Pada triwulan III tahun 2022, sumbangsih industri manufaktur mencapai 16,10 %, naik dibanding triwulan II-2022 di angka 16,01 %.

Adapun beberapa sektor industri yang mencatatkan kinerja pertumbuhan yang gemilang pada triwulan III-2022, antara lain industri logam dasar yang tumbuh sebesar 20,16 %. Capaian ini didorong oleh peningkatan produksi besi dan baja serta naiknya permintaan dari luar negeri.

Selanjutnya, industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh sebesar 17,67 %, disusul industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (12,56 %), serta industri alat angkutan (10,26 %).

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di Indonesia yang masih bergairah di tengah lesunya perekonomian global. Oleh karenanya, perlu upaya bersama menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis, selain tetap menyiapkan langkah-langkah mitigasi dari berbagai tekanan, khususnya risiko global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah tetap antisipatif dan menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengakselerasi



pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu fokusnya adalah mengembangkan sektor industri manufaktur agar lebih produktif dan inovatif.

“Dalam jangka pendek misalnya, kebijakan untuk memperkuat konsumsi domestik akan dipacu melalui permintaan dari sektor industri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan, jangka menengah dan panjangnya, pemerintah melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor industri, termasuk juga menyiapkan SDM industri yang kompeten,” ujarnya.

Agus menambahkan, pemerintah juga bertekad menjadi *Global Key Player* untuk industri hilirisasi berbasis komoditas. “Pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, serta industri berbasis migas dan batubara seperti proyek *coal to methanol*,” tuturnya.

Sebelumnya, Menperin memproyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nasional sepanjang tahun 2022 mencapai 5,01 %, dan pada 2023 ditargetkan sebesar 5,1-5,4 %. “Masuknya sejumlah investasi di beberapa sektor diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri manufaktur,” jelasnya.

Sementara itu, realisasi investasi industri manufaktur pada 2022 mencapai Rp497,7 triliun. Peningkatan investasi di sektor industri juga akan mendorong serapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, total serapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 19,11 juta orang, sedangkan pada 2023 sebanyak 19,2-20,2 juta orang.

Seiring dengan itu, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada 2022 mencapai USD206,35 miliar, naik 16,45% dari angka tahun 2021 (USD177,2 miliar) dan ditargetkan dapat meningkat hingga USD225-245 miliar pada 2023.

“Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memperkuat hilirisasi di sektor industri manufaktur. Sebab, selama ini telah memberikan bukti nyata terhadap *multiplier effect* bagi perekonomian nasional, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja,” ungkap Menperin. **mi**

IKI, TERLENGKAP DAN TERPERCAYA

Kementerian Perindustrian melansir Indeks Kepercayaan Industri (IKI) setiap bulannya untuk mengetahui kondisi terkini sekaligus mendiagnosa permasalahan yang terjadi di sektor industri manufaktur. Data dan informasi ini bisa menjadi acuan untuk mencari penyelesaian secara cepat dan tepat.



Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa IKI adalah suara industri yang merepresentasikan seluruh subsektor manufaktur dengan jumlah responden yang lebih banyak. "Sebab, selama ini, terdapat indeks-indeks yang menjadi cerminan produktivitas industri, namun penyajian datanya kurang mendetail sehingga kami sebagai pembina industri tidak dapat menggunakannya sebagai acuan kebijakan," ungkapnya.

Agus optimistis, IKI bisa menjadi referensi data perkembangan industri yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan sektor industri. "Jika IKI bernilai ekspansif, maka yang harus kita lakukan adalah mempertahankan iklim usaha dan kebijakan yang efektif sehingga industri dan subsektornya terus mempertahankan atau bahkan mengakselerasi level ekspansinya," tuturnya.

Namun, apabila nilai IKI mengalami kontraksi, Kemenperin sebagai regulator akan mencari solusi terbaik dengan menyiapkan instrumen

kebijakan yang tepat agar periode ke depannya nilai IKI tersebut menjadi lebih baik. "Untuk merealisasikan hal itu, kami membutuhkan dukungan dari instansi terkait agar ekosistem industri yang integratif dari hulu sampai hilir tetap terjaga kondusif," imbuhnya.

Pelaporan IKI setiap bulan oleh perusahaan industri dilaksanakan secara *online* melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 13 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Dalam Rangka Penyusunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

"Untuk pembangunan dan penyusunan IKI, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan Tim Pusat *International Center for Applied Finance and Economics*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (InterCAFE-LPPM IPB)," papar Agus.

Menurutnya, sebagai penyelenggara urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan, Kemenperin

berkewajiban untuk memahami kondisi aktual dan faktual sektor industri di Indonesia. Hal ini untuk menjawab kecepatan dinamika tantangan ekonomi global dan menghadapi krisis sumber daya industri global di tengah ketidakstabilan *supply* maupun *demand* pasar produk industri.

Saat ini IKI menggunakan tiga variabel dalam pengukurannya, yakni pesanan baru, persediaan produk, dan produksi. Menurut Menperin, ke depannya, jumlah variabel akan disesuaikan untuk mendapatkan gambaran utuh sektor industri.

IKI mampu mengukur kinerja manufaktur secara mendetail, dengan menyajikan data dari 23 jenis subsektor industri berdasarkan KBLI 2 digit. Pelaporan IKI dilakukan oleh perusahaan industri melalui kuesioner online yang meliputi identitas perusahaan, perkembangan kegiatan industri, perkembangan volume pesanan baru, perkembangan volume produksi, perkembangan volume persediaan produk, dan prospek bisnis pada enam bulan ke depan.

Kemudian, IKI akan memberikan nilai indeks yang dapat diinterpretasikan bahwa jika angka IKI antara 0-50 maka tandanya kontraksi, di angka 50 menunjukkan level stabil, dan di atas 50 menandakan fase ekspansi.

Menperin menyebutkan informasi yang diberikan industri akan menjadi perhatian bagi Kemenperin selaku regulator untuk menyiapkan instrumen kebijakan yang terbaik. "Tentu masih teringat dengan jelas saat pandemi, kami mendengarkan satu per satu masukan dari industri, sekarang masukan itu dapat dikuantifikasi secara lebih akurat," ungkapnya.

Menperin juga berharap agar para asosiasi industri, dapat menggerakkan anggotanya untuk berperan aktif dalam mengisi IKI. "Agar IKI berperan optimal, membutuhkan *systematic responses* yang cepat, karenanya saya berpesan kepada jajaran saya, khususnya para Pejabat Eselon 1, gunakan IKI semaksimal mungkin, karena IKI ini akan jadi pegangan kita di Kemenperin," pungkasnya. 

IKI SEBAGAI ACUAN PENENTU KEBIJAKAN

Pemantauan secara periodik terhadap kondisi terkini dari industri manufaktur menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini agar bisa segera merespons permasalahan yang terjadi pada sektor industri manufaktur sekaligus dapat menentukan kebijakan yang tepat.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, pada November 2022, Kementerian Perindustrian telah resmi meluncurkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Pada kesempatan ini, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.

Selanjutnya, terdapat Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, dan para pimpinan asosiasi industri di Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan, IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga merupakan gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis di Indonesia hingga enam bulan ke depan. "IKI diharapkan bisa memberikan informasi detail karena nilai IKI adalah cerminan aktivitas pelaku industri," tuturnya.

Oleh karena data dan informasi yang diambil ini bersifat detail, Menko Perekonomian berharap agar Kementerian Perindustrian sepenuhnya dapat menjaga keamanan informasi yang diberikan perusahaan, seperti halnya dengan data industri lainnya yang terdapat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Kami juga mengimbau kepada perusahaan industri agar dapat mengisi survei IKI secara objektif sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga IKI dapat mencerminkan kondisi industri manufaktur yang sesungguhnya dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian nasional. Jadi, kebijakan, intervensi, dan stimulus yang pemerintah berikan untuk industri manufaktur bisa lebih tepat sasaran," ujar Airlangga.

Sektor industri akan terus didorong sebagai "motor" penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, serta peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi agar tercapai visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah juga bertekad terus menjalankan program hilirisasi sebagai salah satu agenda dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. "Misalnya untuk program hilirisasi industri baja yang harus

IKI serupa dengan Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis oleh S&P Global, dan Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI).

terus digenjot, dan juga untuk industri otomotif yang sama-sama menyumbang kinerja besar," imbuh Menko Airlangga.

DAPAT APRESIASI

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyambut baik peluncuran IKI yang diinisiasi oleh Kemenperin. "Sudah seharusnya memang Kemenperin memiliki suatu survei yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dinilai masih baik dan yang perlu mendapat perhatian khusus, apalagi ditengah kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar.

Dengan begitu, menurut Bobby, Kemenperin dapat bergerak cepat dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan untuk sektor-sektor industri yang tengah mengalami dampak dari gejolak kondisi ekonomi global. Apalagi, hasil indeks yang dirilis Kemenperin melalui IKI akan jauh lebih detail dan lengkap, terlebih dalam pelaporannya melibatkan ribuan industri besar, menengah hingga kecil.

"Seharusnya hasilnya akan lebih komprehensif jika dibandingkan hasil survei dari indikator-indikator lainnya yang sudah ada," tutur Bobby. IKI serupa dengan Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis oleh S&P Global, dan Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI).

Pada kesempatan yang sama, Menperin Agus menjelaskan, dalam rangka pemantauan kondisi industri secara periodik, dibutuhkan data dan informasi yang akurat, lengkap dan *up to date*. Data dan informasi ini perlu dilihat sebagai aset penting yang bersifat strategis sebagai dasar penentuan kebijakan dan perencanaan.

"Oleh karena itu, penyampaian data bukan lagi hanya sekadar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode vital untuk pemantauan perkembangan industri nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, pembangunan dan pengembangan industri juga membutuhkan adanya dukungan sumber daya yang memadai, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan industri yang tepat. "Dalam rangka pengambilan kebijakan, diperlukan suatu analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan," ungkap Agus.


Menurutnya, informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dapat meminimalkan risiko ketidakakuratan pengambilan kebijakan. "Kebijakan efektif dan tepat sasaran yang memberikan manfaat optimal pada seluruh pemangku kepentingan serta yang evaluasinya terukur adalah harapan kita semua," tegas Agus.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenperin Wulan Aprianti Permatasari mengatakan, pelaporan IKI bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku industri terhadap kondisi industri pada bulan pelaporan dan prospek bisnis enam bulan ke depan.

Dalam pembentukan IKI, Kemenperin didukung oleh para akademisi dan peneliti dari universitas dan lembaga penelitian. "Perusahaan Industri harus melaporkan kegiatan industrinya melalui kuesioner *online* mulai tanggal 12 sampai dengan 23 setiap bulannya melalui portal SIINas. Saat ini jumlah pemilik akun SIINas sebanyak 36.039 akun dan mereka merupakan referensi responden dari IKI," papar Wulan.

Kemenperin menilai, IKI dapat bermanfaat sebagai indikator penilaian industri yang terpercaya, terkini, terlengkap, dan terdetail serta mampu mendiagnosa lebih awal permasalahan sampai pada subsektor-subsektor industri, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.

IKI juga bisa membantuantisipasi kerugian yang lebih besar apabila terjadi permasalahan pada industri dan menggambarkan iklim usaha industri untuk dapat mengetahui prospek bisnis periode mendatang pada sektor industri di Indonesia.

"Kemenperin mengharapkan dukungan para pelaku usaha baik dalam penyelenggaraan pelaporan maupun pemanfaatan dan pengembangan IKI selanjutnya," terang Wulan. 

TRANSAKSI PRODUK DALAM NEGERI DIBIDIK RP250 TRILIUN

Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada belanja pemerintah. Targetnya, pada saat pelaksanaan Temu Bisnis Tahap V tahun 2023 ini akan tercapai nilai transaksi PDN hingga mencapai Rp250 triliun.

BELANJA PRODUK DALAM NEGERI



“Target sebesar Rp250 Triliun tersebut akan dikejar dalam pelaksanaan Temu Bisnis Tahap V yang rencananya mengundang 1.200 peserta, yakni perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, perusahaan industri, serta asosiasi yang terkait pengadaan barang jasa pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Komitmen dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian, Selasa (7/2).

Untuk mengejar target tersebut, Dody menyebutkan bahwa Kemenperin tengah mempersiapkan tiga langkah percepatan guna mendukung pelaksanaan Temu Bisnis nantinya. Yang pertama adalah persiapan pembuatan modul realisasi serta modul komitmen penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam hal ini, modul ini akan dapat dijadikan acuan dalam penggunaan produk dalam negeri di tiap kementerian/Lembaga, BUMN/D, serta Pemerintah Daerah.

Langkah percepatan kedua yang dilakukan adalah pelaksanaan interkoneksi data penggunaan produk dalam negeri dalam aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan, SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, serta Sistem Informasi P3DN milik Kementerian Perindustrian.

“Interkoneksi data ini bisa dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai pihak, salah satunya melalui bantuan dari PT Telkom Indonesia Tbk. Keterbukaan data ini akan membantu proses pengawasan penggunaan PDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah,” jelas Dody.

Selanjutnya, guna mendukung tercapainya target transaksi dalam Temu Bisnis Tahap V, juga diperlukan pelaksanaan Temu Bisnis Virtual yang dilakukan secara berkala. Dody menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dapat mendorong penggunaan PDN dengan melaksanakan Temu Bisnis antara penyedia dengan pemilik anggaran secara berkala. Temu Bisnis tersebut bisa dilaksanakan secara virtual ataupun tatap muka langsung.

Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis sejak Maret 2021. Kegiatan Temu Bisnis Tahap V Tahun 2023 bertujuan untuk menghubungkan pemilik anggaran belanja pemerintah serta BUMN dengan produsen produk dalam negeri, baik dari hulu hingga hilir. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada pelaksanaan Temu Bisnis ini, juga akan dilaksanakan Penghargaan P3DN bagi pengguna serta produsen yang telah memberikan perhatian pada usaha peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sekjen Kemenperin menyebutkan penghargaan ini akan menilai seluruh aspek terkait program P3DN.

“Yang dinilai di sektor pengguna adalah aspek realisasi sebesar 55%, aspek perencanaan 20%, aspek evaluasi 15%, serta aspek kampanye sebesar 10%,” terangnya. Ia menambahkan, Menteri Perindustrian secara khusus akan memberikan Penghargaan P3DN tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Kemenperin juga menyiapkan Pameran Produk Dalam Negeri yang akan menampilkan produk-produk unggulan yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kemenperin juga menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi dan Lembaga untuk mengadakan seminar dan coaching terkait penggunaan produk dalam negeri. Dody juga menyebutkan bahwa dalam kegiatan ini akan dilaksanakan Forum Komunikasi yang bisa diikuti oleh seluruh Tim P3DN di Indonesia.



“Kami menyadari bahwa pelaksanaan Program P3DN masih jauh dari sempurna. Sehingga Forum Komunikasi tersebut akan diselenggarakan untuk bersama-sama mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh Timnas P3DN dan Tim P3DN instansi, sehingga bisa dicari jalan tengahnya,” jelas Sekjen Kemenperin.

Menutup acara Rapat Koordinasi Pemetaan Komitmen dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Sekjen Kemenperin mengingatkan kepada seluruh Kementerian, Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah untuk segera menunjukkan komitmen penggunaan produk dalam negerinya.

“Seluruh Kementerian, Lembaga, BUMN, serta Pemerintah Daerah agar segera melakukan penginputan SIRUP sebagai dasar komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2023. Segerakan kontrak untuk meningkatkan realisasi. Kementerian dan Lembaga juga bisa segera melakukan Temu Bisnis di instansi masing-masing,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pariwisata, KUKM, Perindag, Biro Perekonomian dan Keuangan Pemerinta Provinsi DKI Jakarta, Saraswati menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah aktif melaksanakan kegiatan pengawasan penggunaan PDN pada setiap perangkat daerah sesuai dengan arahan Kementerian Perindustrian. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan Temu Bisnis secara berkala yang dapat mendorong penggunaan PDN.

Ia menyampaikan, mulai 6 Februari 2023 lalu, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan Temu Bisnis yang secara aktif mempertemukan penyedia PDN dan perangkat daerah. Kegiatan Temu Bisnis oleh Pemprov DKI Jakarta ini akan dilaksanakan secara rutin setiap bulannya guna mendorong penggunaan produk dalam negeri. “Pemprov DKI Jakarta juga mendukung penuh pelaksanaan Temu Bisnis Tahap V,” imbuhnya.



14

OPTIMALKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Kementerian Perindustrian aktif mengajak seluruh anggota kelompok kerja tim nasional program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk terus konsisten melaksanakan program strategis tersebut, khususnya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Oleh karena itu, perlu langkah kinerja yang sinergis di antara kementerian dan lembaga terkait agar dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. "Salah satunya adalah melalui kegiatan *business matching* sebagai upaya untuk mempertemukan *supply* dan *demand* dalam pengadaan pemerintah," kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhani di Jakarta, Selasa (13/12).

Melalui pelaksanaan beberapa *business matching* belanja Produk Dalam Negeri, target pemerintah untuk belanja produk dalam negeri senilai Rp400 triliun telah terlampaui. Hal ini juga didukung dengan regulasi yang terkait, terutama untuk mempermudah serta mempercepat masuknya produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen (LVI)," jelas Masrokhani.

Sementara itu, untuk mendorong fasilitasi sertifikat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi industri kecil, Kemenperin juga telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil. "Peraturan ini ditujukan untuk

memberikan kemudahan dan kecepatan proses sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil yang tentunya tanpa biaya dan dapat dicetak secara mandiri," imbuhnya.

Guna mendorong implementasi Program P3DN, Kelompok Kerja Timnas P3DN melaksanakan Rapat Kerja Pokja Timnas P3DN di Jakarta Senin lalu (12/12). Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Heru Kustanto yang juga selaku perwakilan dari anggota Pokja TKDN menyampaikan, pembahasan program kerja Pokja Timnas dibagi dalam tiga ruang diskusi panel, yakni Diskusi Panel Pokja TKDN, Sosialisasi, dan Pemantauan.

"Dari hasil Raker Pokja Timnas P3DN ini, diangkat tiga program prioritas guna mendorong penggunaan produk dalam negeri. Program prioritas pertama adalah terkait dengan pengawasan terhadap proses sertifikasi TKDN," tuturnya.

Selain itu, Pokja TKDN juga memberikan perhatian lebih terhadap konsistensi nilai serta keberlanjutan sertifikat TKDN, termasuk di dalamnya penelaahan nilai TKDN pada pengadaan barang jasa pemerintah. "Kami akan memastikan bahwa produk bersertifikat TKDN akan memiliki konsistensi dan standar guna menjaga



kepercayaan dari para pengguna baik Kementerian, Lembaga, BUMN, dan BUMD,” ujar Heru.

Program prioritas kedua adalah sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri. Tidak hanya menyasar pengguna produk dalam negeri, yakni pemilik anggaran belanja negara, namun juga kepada masyarakat umum.

“Pokja Sosialisasi akan dibagi dalam dua sub-pokja. Yang pertama bertugas mendorong belanja barang dan jasa produk dalam negeri. Dalam hal ini, program P3DN juga akan didorong masuk pada program pendidikan sejak dini, yakni di jenjang SD dan SMP,” jelas Asdep SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Hermin Esti Setyowati, sebagai perwakilan Pokja Sosialisasi.

Sedangkan sub-pokja sosialisasi kedua bertanggung jawab untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk dalam negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan P3DN. Selain itu, sub-pokja ini juga bertanggung jawab untuk memberikan akses informasi produk dalam negeri, baik melalui penyediaan kanal maupun konten informasi. “Secara garis besar, program

sosialisasi ini tidak hanya akan menyasar pada pengadaan pemerintah saja, namun juga akan memperhatikan *domestic consumption*,” ujarnya.

Program prioritas terakhir terkait dengan pemantauan pengadaan barang secara menyeluruh baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta BUMN/ BUMD. Hal ini muncul pada pembahasan hasil kerja Pokja Pemantauan Timnas P3DN yang disampaikan oleh Asdep Bidang Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Firdaus Manti.

“Untuk pengawasan pengadaan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan dikoordinasikan oleh Badan Pemeriksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan pengawasan pada Lembaga dengan 10 pengadaan terbesar, pengawasan akan dilaksanakan oleh Tim P3DN masing-masing Lembaga,” ungkap Firdaus.

Dalam kesempatan ini, Firdaus juga menyebutkan bahwa pengadaan barang di BUMN serta BUMD akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian BUMN. Terkait proses pemantauan, Firdaus juga mengingatkan terkait laporan triwulan.

“Setiap Tim P3DN memiliki kewajiban menyampaikan laporan triwulan kepada pimpinan Pokja TKDN,” jelasnya. Ketiga program prioritas yang diangkat dalam Raker Pokja Timnas P3DN ini menunjukkan komitmen setiap *stakeholder* untuk mengawal implementasi P3DN secara menyeluruh.


Menindaklanjuti hasil rapat kerja ini, Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kemenperin, Andi Rizaldi menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Hasil dari tiap Pokja akan dikumpulkan dan kemudian diserahkan untuk dilaporkan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Ketua Harian Timnas P3DN.

“Target belanja produk dalam negeri ini bukan hanya milik satu kalangan saja. Dampaknya cukup besar hingga bisa dirasakan oleh pengguna barang maupun pemilik barang,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan sebuah kajian tentang dampak peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja barang pemerintah, disebutkan bahwa penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang pemerintah dianggap dapat mendukung kinerja industri dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Artinya, kewajiban penggunaan produk yang memiliki kandungan dalam negeri pada pengadaan barang pemerintah, membuat permintaan barang produksi semakin meningkat. Akibatnya, kinerja industri justru mengalami perbaikan di tengah kondisi pasar yang lagi lesu.

Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa kinerja sektor industri akan semakin meningkat apabila perusahaan memiliki sertifikat TKDN. Dengan kepemilikan sertifikat TKDN ini dapat mempermudah perusahaan dalam mengikuti tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Secara umum, permintaan dari pemerintah ini bisa meningkatkan volume penjualan serta produksi perusahaan. Kepemilikan sertifikat ini juga turut meningkatkan utilitas industri serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan input produksi lainnya. 

MUDAH, GRATIS DAN LIMA HARI SELESAI

Di tengah gempuran produk impor masuk ke Indonesia, pemerintah bertekad untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Upaya ini selain melindungi dan memacu produktivitas industri di tanah air, juga dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, melalui fasilitasi sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), akan memberi jaminan bagi produk yang dibuat oleh industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Hal ini termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil (IK), sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menegaskan, penerbitan sertifikat TKDN bagi industri kecil saat ini sudah semakin mudah dan tanpa biaya. Kemudahan yang diberikan ini berupa penyederhanaan penghitungan nilai TKDN.

"Jadi, industri kecil akan melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN-nya, yang meliputi aspek bahan atau material langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), dan biaya untuk pengembangan," tuturnya.

Reni mengemukakan, aturan TKDN IK ini bertujuan agar industri kecil dapat menjadi sasaran belanja pemerintah, BUMN dan BUMD. Tahun ini, Kemenperin menargetkan sebanyak 2 juta produk IKM dapat masuk ke dalam e-katalog Lembaga



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan daerah, BUMD serta BUMN, diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri, sekaligus memberikan *multiplier effect* yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tahun ini dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor," paparnya.

Menurut Reni, fasilitasi sertifikat TKDN IK tidak hanya bermanfaat untuk menggenjot ekonomi nasional, tetapi juga memberikan benefit bagi pelaku industri kecil agar semakin naik kelas dan usahanya lebih berkembang.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM, pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25% ketika sudah

terdapat produk dengan akumulasi nilai TKDN dan BMP minimal 40%," ujarnya.

Penghitungan nilai TKDN-IK dilakukan secara mandiri oleh pelaku industri kecil melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selanjutnya, industri kecil melampirkan dokumen yang diperlukan terkait nilai kandungan dalam negeri untuk diverifikasi oleh Kemenperin.

Proses verifikasi tersebut hanya memerlukan waktu lima hari kerja dan sertifikat dapat dicetak mandiri oleh industri pemohon. "Semua proses dilakukan melalui SIINas secara daring," imbuh Reni.

Di samping itu, Kemenperin terus menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan permohonan penerbitan sertifikat TKDN di berbagai daerah. Pada awal tahun ini, sosialisasi dimulai pada 10 Januari 2023 di Kota Banda Aceh. Bimbingan teknis ini dihadiri secara



luring oleh 200 pelaku usaha industri kecil di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar yang telah memiliki nomor induk berusaha dengan KBLI usaha industri, serta sebanyak sekitar 500 pelaku usaha secara daring.

Selain mengenai ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN untuk industri kecil, Ditjen IKMA juga menggelar sosialisasi pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi industri di tengah persaingan pasar pada 11 Januari 2023. Dalam kegiatan tersebut, Klinik Kekayaan Intelektual Ditjen IKMA juga membuka fasilitasi pendaftaran KI bagi industri kecil yang belum memiliki merek, cipta, desain industri dan paten.

Sepanjang 2022, Klinik Kekayaan Intelektual Ditjen IKMA telah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk 497 merek. "Kami harap, melalui kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Pemda dan Asosiasi IKM, kesadaran IKM akan pentingnya KI dalam persaingan usaha akan semakin meningkat," tutur Reni.

DIAPRESIASI

Pada acara Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran TKDN Industri Kecil di Serpong, Tangerang Selatan, akhir Desember 2022, Kepala Disperindag

Selain mengenai ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN untuk industri kecil, Ditjen IKMA juga menggelar sosialisasi pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi industri di tengah persaingan pasar pada 11 Januari 2023

Kota Tangerang Selatan Heru Agus Santoso memberikan apresiasi atas terobosan Kemenperin untuk mempermudah masuknya industri kecil pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Ini adalah upaya yang harus dimanfaatkan oleh pelaku industri kecil, baik di wilayah Tangerang Selatan ataupun Indonesia secara

umum. Seluruh pelaku industri kecil pada akhirnya dapat mendaftar untuk memperoleh sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian," ungkapnya.

Heru menyampaikan, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini telah dilaksanakan secara konsisten di Kota Tangerang Selatan. "Pemkot Tangerang selatan melalui arahan Walikota Tangerang Selatan telah mewajibkan semua perangkat daerah untuk memaksimalkan belanja APBD terutama untuk membeli produk bersertifikat TKDN," terangnya.

Heru pun menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan masuk dalam lima besar realisasi belanja produk dalam negeri tingkat kota se-Indonesia berdasarkan data LKPP pada Rakor Monev Inpres 2/2022 dengan total realisasi sebesar Rp973,3 miliar pada November 2022.

Selanjutnya, guna mendukung penggunaan produk dalam negeri, Kota Tangerang Selatan juga telah menyiapkan program kerja khusus di tahun 2023. "Saat ini Tangerang Selatan telah membentuk Tim P3DN. Dan rencananya di tahun 2023 nanti, Pemkot Tangerang Selatan akan memberikan layanan klinik P3DN bagi para PPK, pelaku pengadaan pemerintah," tandasnya. **mi**



UTAMAKAN PRODUK LOKAL, TKDN IK JADI TEROBOSAN DONGKRAK EKONOMI

Kementerian Perindustrian terus melakukan terobosan untuk membangkitkan gairah para pelaku industri di tanah air, misalnya dengan mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Salah satu upaya yang sedang diakselerasi, yakni menyederhanakan proses pengurusan sertifikat TKDN untuk industri kecil (TKDN IK). Fasilitas sertifikasi ini menjadi syarat bagi industri kecil untuk menampilkan produknya di katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-Katalog LKPP).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, melesunya perekonomian dunia berdampak pada Indonesia, termasuk juga bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Padahal, selama ini sektor IKM berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Populasi IKM mencapai 4,4 juta unit usaha. Artinya menjadi sektor mayoritas dengan 99,7 % dari total industri manufaktur yang ada di Indonesia. Sektor IKM juga berkontribusi terhadap jumlah serapan tenaga kerja, yang jumlahnya berkisar 66 %,” paparnya.

Agus mengemukakan, fasilitas sertifikasi TKDN IK tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil. Dalam regulasi itu, industri kecil didefinisikan sebagai industri yang memiliki modal usaha maksimal Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Regulasi itu meminta pelaku industri kecil menilai sendiri empat komponen TKDN untuk proses sertifikasi. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan, empat komponen tersebut meliputi, bahan material langsung dengan komposisi 24 % dari nilai TKDN, tenaga kerja langsung (10 %), biaya tidak langsung pabrik (4 %), serta biaya untuk pengembangan (2 %).

Aspek bahan material langsung ditinjau dari sumber penyedia bahan baku yang digunakan industri kecil. Pihak penyedia mesti berkedudukan di Indonesia. Adapun aspek sumber daya manusia ditinjau dari kewarganegaraan tenaga kerja tetap. Tenaga kerja tetap dalam negeri ini harus berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 17 regulasi tersebut menyatakan, penerbitan sertifikasi TKDN untuk industri kecil tidak dikenakan biaya. Pelaku industri kecil harus memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) karena pengajuan sertifikasi TKDN beserta



Kemenperin memberikan kesempatan kepada IK untuk melakukan self-assessment penghitungan TKDN dan melaporkan hasil penilaian tersebut melalui SIINas

hasil penilaian sendiri dimasukkan melalui sistem tersebut. Nantinya, persetujuan atau penolakan serta penerbitan sertifikasi juga melalui sistem yang sama.

“Jadi, proses pengurusan sertifikat TKDN IK dilakukan hanya dengan dua langkah. Pertama, permohonan sertifikasi TKDN IK dan penginputan data melalui SIINas. Berikutnya, yang kedua adalah verifikasi TKDN IK,” jelasnya.

Apabila proses tersebut sudah selesai, industri kecil dapat langsung mencetak sendiri sertifikat TKDN IK. Kemenperin memberikan kesempatan kepada IK untuk melakukan *self-assessment* penghitungan TKDN dan melaporkan hasil penilaian tersebut melalui SIINas.

“Cukup dengan dua langkah tersebut, industri kecil bisa mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan mudah, cepat dan tanpa biaya. Dua proses pembuatan sertifikat TKDN IK ini dapat dilakukan maksimal hanya dalam lima hari,” imbuhnya.

Menurut Agus, terobosan ini bertujuan untuk mempermudah realisasi komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah, BUMN, maupun BUMD, termasuk mengalokasikan minimal 40% anggarannya untuk belanja produk industri kecil. “Semakin mudahnya penerbitan sertifikasi TKDN IK juga akan

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Menperin meminta dukungan kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan sosialisasi mengenai langkah ini sekaligus memberikan pernyataan bahwa industri-industri yang memperoleh fasilitas ini benar-benar merupakan industri kecil.

“Terobosan lain yang juga diambil Kemenperin adalah memperbanyak jumlah asesor dan lembaga verifikasi besaran nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP),” tandasnya. Hal ini untuk mempermudah pengurusan sertifikat TKDN dengan melibatkan lebih banyak pihak yang dekat dengan lokasi industri.

Kemenperin juga akan melakukan penguatan data suplai produk dalam negeri untuk memberikan informasi produk yang sudah ber-TKDN dan produk yang sudah diproduksi di dalam negeri. Cara ini dinilai dapat memberikan prioritas bagi industri dalam negeri untuk dipilih terlebih dahulu dan digunakan dalam pengadaan barang jasa.

“Terobosan-terobosan untuk mempermudah sertifikasi TKDN dan belanja PDN diharapkan mampu mendukung optimalisasi belanja pemerintah. Tentunya seluruh upaya ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak,” tutur Agus. **mi**

JADI TAMENG, SNI LINDUNGI PRODUK LOKAL DARI GEMPURAN IMPOR

Pemerintah terus memberikan perlindungan terhadap produk lokal. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap upaya untuk memacu produktivitas dan daya saing industri nasional.

Guna mencapai sasaran tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 tahun 2022 tentang Standardisasi Industri. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan industri yang mandiri dan berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif.

Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis (ST), atau Pedoman Tata Cara (PTC) secara wajib untuk melindungi produk nasional dari persaingan dengan produk impor kualitas rendah, dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, faktor yang mempengaruhi daya saing industri adalah kualitas produk yang dihasilkan dan biaya yang ditanggung oleh industri tersebut. Kualitas produk tentu berdampak terhadap kepuasan konsumen, sedangkan biaya merupakan pengeluaran yang dipakai industri untuk menghasilkan produk.

“Jika kualitas suatu produk dapat meningkat dan disertai dengan penurunan biaya produksi, maka daya saing industri tersebut akan meningkat,” ungkap Dody dalam sambutannya saat mewakili Menteri Perindustrian dalam acara *Kick Off* Implementasi Permenperin 45 Tahun 2022 melalui SIINas di Jakarta, Selasa (11/4).

Penerapan SNI di bidang industri, baik yang diterapkan secara sukarela maupun yang diberlakukan secara wajib oleh Menteri Perindustrian, dilakukan melalui sertifikasi, yaitu rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang dan/atau jasa industri telah memenuhi SNI dan/atau Standardisasi Industri.

Pemberlakuan SNI secara wajib yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian selain mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan

hidup juga mempertimbangkan aspek daya saing produsen nasional dalam persaingan usaha yang sehat, kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional, serta memperhatikan kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sampai dengan saat ini, Menteri Perindustrian telah memberlakukan secara wajib terhadap 123 SNI produk industri yang mencakup sektor hasil perkebunan, makanan, minuman, kimia hulu dan hilir, bahan galian non logam, tekstil, alas kaki, permesinan, alat transportasi, elektronika rumah tangga,

logam besi baja dan produk IKM seperti mainan dan korek api gas,” papar Dody.

Sekjen Kemenperin menyampaikan, ruang lingkup Permenperin 45/2022, antara lain pemerintah akan melaksanakan pembinaan Standardisasi Industri dengan mengatur penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), tata cara penilaian kesesuaian, dan pengajuan permohonan sertifikasi produk oleh produsen melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). “Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib dan pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia,” ujarnya.



Dody mengemukakan, Kemenperin memiliki peranan penting dalam mengatur standarisasi melalui peraturan formal untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas terhadap produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. "Sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global," tegasnya.

Sampai saat ini, Kemenperin telah menetapkan sebanyak 123 standar produk yang harus memenuhi standar wajib SNI dan penunjukan LPK yang terdiri dari 47 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang mempunyai laboratorium uji.

Dalam konteks substitusi impor, pengaturan standarisasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk impor yang memenuhi standar.

Dalam konteks substitusi impor, pengaturan standarisasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk impor yang memenuhi standar. "Standarisasi ini jadi alat yang dapat mendukung program Kemenperin, yaitu substitusi impor karena standarisasi salah satu alat dari sekian banyak *non-tariff barrier*, yang mendukung penggunaan produk dalam negeri," papar Dody.

Lebih lanjut, menurutnya, upaya tersebut dapat memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan diharapkan ke depannya dapat mendorong pertumbuhan industri nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Doddy Rahadi mengatakan, implementasi Permenperin 45/2022 juga akan meningkatkan layanan kepada masyarakat industri karena pengajuan permohonan sertifikasi produk melalui SIINas.

"Pemberlakuan SNI wajib tentunya akan melindungi konsumen untuk mendapatkan produk yang memenuhi standar dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup," tuturnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produsen nasional dalam persaingan usaha yang sehat untuk memenuhi pasokan pasar domestik nasional.

Pemberlakuan SNI secara wajib juga didukung oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, yang terdiri dari 52 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji. Sementara SNI bidang industri yang telah ditetapkan adalah sebanyak 5.172 yang terdiri dari 43 % produk/barang jadi, 21 perse bahan baku, dan 36 % metode uji, dengan sebanyak 36 Komite Teknis berasal dari Kementerian Perindustrian.

Melalui PP Nomor 28 tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri nasional antara lain dengan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi penanaman investasi dan berusaha. Salah satu kebijakan ini adalah penunjukan LPK dan penilaian kesesuaian melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).[mi](#)



HORE, BELI MOTOR LISTRIK DAPAT BANTUAN PEMERINTAH

Untuk mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua. Upaya ini diharapkan agar masyarakat membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia masih cukup mahal bagi beberapa kalangan. "Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB," ujarnya.

Luhut mengharapkan pemberian insentif fiskal ini akan meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli dengan harga penuh. "Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLBB," ucapnya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Menperin menjelaskan, program bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua dalam keadaan baru kepada masyarakat tertentu. "Pelaksanaan program bantuan ini akan didukung oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) untuk melakukan verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri," jelasnya.

Potongan harga yang akan diberikan pada bantuan pemerintah ini sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL berbasis baterai roda dua. Pemberian potongan harga ini hanya dapat diberikan untuk satu kali pembelian KBL berbasis baterai roda dua yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Selanjutnya, kriteria penerima program bantuan atau kepada masyarakat tertentu ini dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. "Program bantuan tersebut diberikan dengan kuota sebesar paling banyak 200 ribu unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600 ribu unit untuk tahun anggaran 2024," ungkap Agus.



Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier yang hadir pada Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB, Senin (20/3) menyampaikan, jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira). Selain itu, kendaraan yang akan didaftarkan ke dalam Sisapira.id harus memenuhi ketentuan nilai TKDN paling rendah 40 %.

Ia menjelaskan, Sisapira.id telah siap digunakan mulai 20 Maret 2023 oleh para pelaku industri KBLBB, bukan oleh masyarakat. Produsen KBLBB memasukkan data produksi, data model, tipe, sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke dalam sistem informasi tersebut.

Selanjutnya, surveyor independen akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang dimuat. Setelah data data produsen dan diler terverifikasi, masyarakat bisa datang ke dealer guna memeriksa apakah NIK yang dimiliki termasuk sebagai penerima manfaat pembelian KBLBB roda dua.

"Penetapan KBL berbasis baterai roda dua sebagaimana dimaksud itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. Kepesertaan program bantuan ini berlaku sampai dengan tahun anggaran 2024," Taufiek menambahkan.

Dalam Permenperin ini, perusahaan industri yang memproduksi motor listrik yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah ini tidak boleh menaikkan harga jual sejak ditetapkan sebagai peserta. Selain itu, tidak boleh melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan TKDN yang telah ditetapkan.

"Perusahaan industri yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan dari kepesertaan program bantuan," ujar Taufiek.

Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik dengan pemberian insentif melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2023. "Tentu kami di AISMOLI akan menindaklanjuti program ini dengan sebaik mungkin dengan mendukung pelaksanaannya di lapangan," ujar Budi.

Menurut dia, sesuai data dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, saat ini sebanyak delapan perusahaan berbasis kendaraan listrik dengan 13 model telah mencapai tingkat komponen lokal dalam negeri.

"Oleh karenanya, kami tidak ingin kehilangan momen untuk turut serta dalam program ini, dan kita patut memberikan apresiasi," ungkapnya. **mi**

MAYORA GROUP BANGUN PABRIK DAUR ULANG PLASTIK BERTEKNOLOGI FOODGRADE

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia menghasilkan sampah botol plastik pasca konsumsi yang cukup besar pula. Namun, berdasarkan data ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) di tahun 2021, jumlah *supply* sampah belum dapat memenuhi kebutuhan resin Polyethylene Terephthalate (PET) di Indonesia yang diperkirakan mencapai 31.500 ton per bulan, dan 44% nya mesti dipenuhi oleh impor.

24

“Inovasi produk berbasis PET terus berkembang, paralel dengan hal tersebut, angka kebutuhan industri terhadap material PET ini juga terus bertambah. Apalagi PET menjadi material dengan emisi gas rumah kaca per gram terendah dan membuat harga produk menjadi lebih terjangkau, berpotensi untuk menjadi alternatif material,” kata Ronald Atmadja selaku Komisaris Utama PT Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) yang sekaligus Direktur Sustainability Le Minerale.

Ronald juga menyampaikan bahwa pembangunan pabrik daur ulang ini merupakan komitmen Mayora Group untuk melengkapi Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Minerale (GESN Le Minerale) yang telah digaungkan sejak 2021 yang lalu.

“Sebagai perusahaan lokal, kami berkomitmen untuk berkontribusi nyata bagi Indonesia, termasuk dalam pengelolaan sampah. BIPJ akan menjadi hilir dari GESN Le Minerale, sementara edukasi pilah sampah dari rumah serta kegiatan yang mendukung peningkatan *collection rate* yang menjadi hulu dalam Gerakan ini, akan terus digaungkan ke masyarakat,” tuturnya.

Industri daur ulang plastik di Indonesia memang terus menunjukkan kemajuan yang impresif, hal ini didukung dengan adanya kebutuhan dalam dan luar negeri, serta tersedianya *post-consumer* (sampah domestik) dan *post-industrial*.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyediaan sumber bahan baku *Recycled PET* (R-PET) dalam negeri, serta sekaligus sebagai komitmen Mayora Group dan Le Minerale dalam mengaplikasikan peta jalan sampah perusahaan, didirikanlah PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ), pabrik daur ulang plastik khusus PET yang memenuhi standar keamanan pangan (*foodgrade*).

“Belum banyak pabrik daur ulang PET yang mengadaptasi teknologi *foodgrade* di Indonesia, oleh karenanya kami hadir



PET sendiri memiliki tingkat daur ulang tertinggi, sehingga bila bekas kemasan plastik PET dapat dikelola dan didaur ulang, maka tidak menjadi timbulan sampah di ekosistem.

untuk menciptakan sumber bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku *recycled resin PET food grade* terbaik yang sesuai dengan standar keamanan kemasan pangan,” ungkap Gautam Rathore, Managing Direktur BIPJ.

BIPJ menggunakan teknologi pengolahan PET paling modern dan berfokus pada higienitas. Ada dua proses utama dalam pengolahan botol plastik PET menjadi *food grade recycled* plastik resin. Pertama dimulai dengan proses pembersihan dan pembukaan tutup. Lalu botol PET bekas tersebut diseleksi secara otomatis untuk kebersihan warna. Setelah itu proses pencacahan menjadi serpihan untuk kemudian pencucian dan pengeringan.

Yang kedua yakni proses ekstrusi, perubahan plastik dari bentuk padat menjadi cair. Lalu, proses dekontaminasi kontaminan dengan proses *solid state polycondensation* (SSP) dan yang terakhir proses pencetakan *pellet* plastik. *Pellet* plastik inilah yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan produk plastik baru.



“Kehadiran BIPJ juga diharapkan akan membawa dampak lingkungan dan ekonomi. Dampak lingkungan yakni terhadap Indonesia yang lebih bersih, sedangkan dari sisi ekonomi tentunya BIPJ akan membuka lapangan pekerjaan di platform daur ulang dan memberikan sumbangsih devisa bagi negara,” harap Christine Halim, Direktur Utama Bumi Indus Padma Jaya, yang juga telah lama berkecimpung di dunia daur ulang sebagai Ketua Umum Adupi.

PET sendiri memiliki tingkat daur ulang tertinggi, sehingga bila bekas kemasan plastik PET dapat terkelola dan didaur ulang, maka tidak menjadi timbulan sampah di ekosistem. Sedangkan dari sisi ekonomi, tentunya adanya penyerapan tenaga kerja akan berkontribusi terhadap perekonomian wilayah setempat pada khususnya. Fasilitas ini menyerap lebih dari 150 orang tenaga kerja lokal dan didukung teknologi termmodern. Pabrik daur ulang BIPJ memiliki kapasitas produksi 22.000 ton per tahun *Recycled PET Plastic* (RPET) yang telah memenuhi standar keamanan pangan internasional.

BIPJ yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. “Kementerian Perindustrian mengapresiasi didirikannya PT. Bumi Indus Padma Jaya sebagai industri daur ulang, ini sesuai dengan misi Kemenperin dalam menciptakan transformasi industri yang berkelanjutan,” kata Menperin Agus.

Upaya ini diyakini dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi.


Menperin optimistis, adanya PT Bumi Indus Padma Jaya ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular. “Pesan saya kepada Mayora Group dan PT Bumi

Indus Padma Jaya ini, agar dapat menjaga lingkungan sekitar dengan baik, yang selaras dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri hijau,” tegas Agus.

Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik melalui produk pelet PET yang dihasilkan, maupun melalui program-program berkelanjutan dengan melibatkan mitra kerja dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, Agus menekankan bahwa keberadaan pabrik ini juga dapat meningkatkan tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia, dan berdampak dalam mengurangi sampah plastik dan secara langsung berkontribusi dalam peningkatan sosial ekonomi serta devisa negara. Agus juga menilai, pembangunan fasilitas daur ulang sampah plastik ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung konsep ekonomi berkelanjutan yang patut diapresiasi.

Dukungan dan apresiasi serupa juga diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI), Andi. Diungkapkannya, BIPJ akan memajukan industri daur ulang dan bisnis ini masih memiliki potensi besar. “Dengan potensi yang terus berkembang, industri daur ulang sampah botol plastik akan berperan besar terhadap lingkungan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi negara,” ucapnya.

Berbagai dukungan untuk BIPJ pun hadir dari asosiasi lain di luar ADUPI, seperti Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). “Kami mengapresiasi langkah Mayora Group yang telah mendirikan BIPJ sebagai bagian dari gerakan ekonomi sirkular nasional yang terintegrasi dan komprehensif. Ini akan meningkatkan kredibilitas industri serta menunjukkan komitmen dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah. Kami mengajak anggota asosiasi lain untuk juga dapat mengambil langkah serupa,” ujar Adhi Lukman, Ketua Umum GAPMMI. 

PASOK KEBUTUHAN GLOBAL, PRODUSEN BONEKA BARBIE EKSPANSI DI CIKARANG

Bersamaan dengan perayaan 30 tahun beroperasi di Indonesia, PT Mattel Inc selaku produsen mainan boneka Barbie dan mobil diecast Hotwheels kembali melakukan ekspansi di Tanah Air. Melalui bendera PT Mattel Indonesia (PTMI), perluasan usahanya dilakukan dengan membuka pabrik molding baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Vice President dan General Manager PT Mattel Indonesia Roy Tandean mengatakan, ekspansi ini akan mendukung peningkatan kapasitas produksi boneka Barbie dan mobil diecast HotWheels dari Mattel hingga 3 juta per minggu dan menciptakan sekitar 2.500 lapangan kerja baru di Indonesia. "Dengan bangga kami merayakan dan memperkuat kehadiran jangka panjang kami di Indonesia melalui ekspansi operasi manufaktur," ujarnya.

Rata-rata boneka yang diproduksi Mattel di Indonesia diperkirakan memiliki 70% kandungan konten lokal. Sebagai hasil dari perluasan dan peningkatan kapasitas produksi ini, Mattel berencana untuk meningkatkan volume pembelian dari mitra lokal untuk produk tekstil dan kemasan di Cikarang - Bekasi dan Jawa Tengah. "Saat ini, PTMI memproduksi lebih banyak boneka Barbie daripada pabrik lainnya di dunia. Juga produksi lokal Mattel saat ini mewakili lebih dari 35% total ekspor global mainan Indonesia," kata Roy.

Menurutnya, Indonesia memegang peran penting dalam operasi global Mattel. Selain itu, mendukung upaya strategi transformasi untuk tumbuh sebagai perusahaan mainan yang berorientasi pada kekayaan intelektual dan memiliki kinerja yang kuat.

Konsisten dengan upaya Mattel dalam aspek keberlanjutan, molding center terbaru ini dirancang untuk mencapai *Gold Certification*, yaitu standar tertinggi yang dapat dicapai dalam standar *Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)* oleh U.S. *Green Building Council*. "Ekspansi ini juga memperkuat peran Indonesia sebagai produsen terkemuka di industri mainan global," ujar Roy.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, Indonesia memiliki beragam potensi industri manufaktur yang ekspornya menjanjikan, salah satunya dari industri mainan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian berupaya menjaga iklim usaha yang kondusif

Hingga saat ini, negara utama tujuan ekspor mainan Indonesia antara lain adalah Amerika Serikat, Singapura, Inggris, China dan Jerman.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita

dalam pengembangan ekosistem industri mainan agar semakin banyak perusahaan berskala sedang dan besar berdaya saing global sehingga tren peningkatan ekspor terus berlanjut.

Kemenperin mencatat nilai ekspor industri mainan nasional mencapai USD383 juta sepanjang Januari-September 2022, naik 29,83% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD295 juta. "Hingga saat ini, negara utama tujuan ekspor mainan Indonesia antara lain adalah Amerika Serikat, Singapura, Inggris, China dan Jerman," kata Dirjen IKMA dalam sambutannya mewakili Menteri Perindustrian pada acara Perluasan Lini Produksi dan Perayaan *30th Anniversary* PT Mattel Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (8/12).

Reni menyebutkan, jenis produk mainan yang paling banyak diekspor di antaranya boneka, *stuffed toy* dan mainan model yang diperkecil. Hingga saat ini, jumlah industri mainan berskala besar dan sedang di Indonesia mencapai 131 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 36 ribu orang. Sebagian besar industri tersebut berlokasi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

"Salah satu industri besar produsen mainan ternama yang telah berinvestasi di Indonesia dan turut berkontribusi menyerap tenaga kerja

hingga 9.000 orang selama musim puncak adalah PT Mattel Indonesia," ungkap Reni.

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia sejak 1992 ini memiliki kapasitas produksi 85 juta boneka fesyen dan 120 juta mainan mobil per tahun. Mattel berhasil mengekspor mainan anak yang dibuat di Indonesia ke Jepang, Hong Kong, China, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Brasilia, Inggris, Perancis, dan Italia. Mereka juga melibatkan industri kecil dan menengah (IKM) dalam proses produksinya.

"Kemenperin mengapresiasi PT Mattel Indonesia yang memberikan kontribusi lebih dari 35% dari total nilai ekspor mainan asal Indonesia ke dunia. Hal ini sejalan dengan langkah strategis Kemenperin yang tengah memacu pengembangan industri dalam negeri yang berbasis padat karya dan berorientasi ekspor," tutur Reni.

Lebih lanjut, PT Mattel berencana meningkatkan investasinya dengan melakukan perluasan pabrik *fashion dolls*. "Dengan perluasan tersebut, PT Mattel Indonesia diproyeksikan akan menciptakan sekitar 2.500 pekerjaan baru bagi pekerja Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Mattel Indonesia juga telah memperoleh INDI 4.0 *Award* tahun 2022 dan ditetapkan

sebagai *best performance of industry 4.0 transformation* dan kategori *smart factory*. Penganugerahan INDI 4.0 Award tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas melalui transformasi industri 4.0 dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan teknologi kunci di bidang industri 4.0.

Tak hanya itu, Kemenperin juga menetapkan PT Mattel Indonesia sebagai *National Lighthouse Industry 4.0* untuk percontohan dan referensi dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia. Dirjen IKMA berharap PT Mattel Indonesia dapat menjadi salah satu perusahaan yang menjadi rujukan inovasi dan kreativitas dalam memproduksi mainan. "PT Mattel Indonesia bisa menjadi rujukan bagi industri lainnya termasuk industri kecil dan menengah dalam modernisasi dan bertransformasi menuju industri 4.0," ujar Reni. 



CATAT SEJARAH, MOBIL LISTRIK INDONESIA DOBRAK PASAR EKSPOR

Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mampu ekspor mobil listrik. Hal ini dibuktikan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang berhasil mengapalkan kendaraan elektrifikasi rakitan anak bangsa dalam bentuk utuh guna memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.



Mobil tersebut adalah model Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid yang sebenarnya telah resmi rilis pada bulan November tahun 2022. "Ini yang pertama kali untuk jenis *hybrid* dari Indonesia," kata Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono.

Menurutnya, ekspor ini menandai peningkatan level kapabilitas dan keunggulan industri manufaktur otomotif nasional melalui aktivitas ekspor produk berteknologi tinggi ke level berikutnya. Langkah tersebut merupakan upaya untuk terus memberikan kontribusi pada pengembangan industri otomotif nasional yang telah memasuki era elektrifikasi, dan menyumbang pada neraca dagang yang positif.

"Ekspor perdana Kijang Innova Zenix ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, kemitraan yang kuat dari seluruh rantai pasok kami termasuk industri kecil dan menengah (IKM), dan dukungan masyarakat. Semoga kami dapat berkontribusi lebih besar

lagi agar dapat bersama-sama tumbuh dan meningkatkan daya saing global untuk memenuhi perkembangan industri otomotif Indonesia dan global," papar Warih.

Pada tahun 2023, TMMIN menargetkan ekspor Kijang Innova Zenix sebanyak lebih dari 8.000 unit dengan komposisi 30% tipe HEV dan 70% tipe internal combustion engine (ICE) ke negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Diharapkan, ekspor Innova Zenix ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan target 17.000 unit di 2025 untuk tipe *hybrid* dan konvensional.

Lanjut Warih, ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix Hybrid ini merupakan bagian dari upaya Toyota Indonesia untuk turut serta dalam mencapai target pemerintah yaitu dekarbonisasi. "Ekspor mobil utuh ini juga tentunya termasuk baterai elektrifikasi yang dirakit lokal di pabrik kami di Karawang," imbuhnya.

Toyota Indonesia telah memperkenalkan beragam model kendaraan yang dapat mengurangi emisi karbon melalui strategi *multipathway*, baik kendaraan konvensional hemat bahan-bakar, kendaraan dengan bahan bakar bio (*bio-fuel*), serta kendaraan berteknologi elektrifikasi, yaitu HEV, PHEV, dan BEV, selain memproduksi lokal Kijang Innova Zenix Hybrid. "Kami akan terus mempertahankan posisi Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan elektrifikasi buatan dalam negeri, khususnya *hybrid*," tambah Warih.

Sementara itu, Direktur Operasional TMMIN Bob Azam juga menyebutkan ekspor mobil listrik berbasis *hybrid* ini memang merupakan yang pertama di Indonesia belum dilakukan merek mobil lainnya. Untuk tahap awal, Innova Zenix ini akan diekspor ke Timur Tengah dan Amerika Selatan.

Ke depannya akan lebih banyak negara tujuan yang disasar. "Ini sudah



pecah telur akhirnya, ini yang pertama di Indonesia,” kata Bob.

Menurutnya, ekspor perdana ini pun membuktikan kemampuan SDM bangsa dalam menghasilkan produk otomotif berteknologi tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. “Kami akan terus meningkatkan kapabilitas SDM industri otomotif nasional, terutama untuk mempertajam keahlian yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan era elektrifikasi serta mempertahankan peran Indonesia sebagai pemain global,” pungkasnya.

Ekspor perdana Kijang Innova Zenix disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Bupati Karawang Cellica Nurrahadiana, dan CEO of Asia Region and President of Toyota Motor Asia Pacific Hao Quoc Tien, serta jajaran manajemen Toyota Indonesia dan perwakilan perusahaan pemasok Toyota Indonesia yang termasuk di dalamnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).

APRESIASI

Menperin menyampaikan apresiasi kepada TMMIN yang telah 50 tahun mengembangkan sektor otomotif di tanah air. “50 tahun ini bukan waktu yang pendek. TMMIN menjadi salah satu perusahaan yang hadir saat di mana Indonesia memulai proses industrialisasi pada saat itu,” ungkapnya.

Menurut Agus, perjalanan Toyota di Indonesia menjadi terdepan karena perusahaan tidak pernah kehilangan ide untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan teknologinya. “Kijang Innova Zenix ini adalah wujud nyata salah satu inovasi anak bangsa yang bisa menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Selain itu, Menperin memberikan apresiasi kepada PT TMMIN yang telah bermitra dengan para pelaku IKM komponen otomotif. Upaya ini memperkuat rantai pasok di tanah air menjadi terintegrasi dari hulu sampai hilir. “Produk Innova Zenix yang akan


diekspor ini memiliki kandungan lokal sebesar 70 %. Ini merupakan sebuah kebanggaan kita,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi PT TMMIN karena telah menerapkan teknologi industri 4.0 dalam proses produksinya. “Jadi, proses produksinya semakin efisien dan bisa meningkatkan daya saing. Kami akan ajukan TMMIN sebagai *national lighthouse* dari sektor otomotif,” ungkapnya.

Selain itu, Toyota xEV Center yang dimiliki PT TMMIN menjadi fasilitas yang penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan implementasi produk yang tergolong *green mobility*. “*Learning center* ini penting karena kita ingin mendorong percepatan ke arah produk *green mobility*,” tandasnya.

Saat ini, kapasitas produksi TMMIN per tahun mencapai 320 ribu unit kendaraan serta 440 ribu unit *engine* dan *part* yang diproduksi pada empat pabrik di Karawang dan Sunter. “Ekspornya pada tahun 2022 mencapai 136.000 unit CBU, dengan total ekspor secara kumulatif sampai dengan tahun 2022 mencapai lebih dari dua juta unit CBU ke lebih dari 100 negara di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika Latin, Oceania, dan Australia,” sebut Agus. Sementara itu, total investasi Toyota yang sudah terealisasi sampai tahun 2022 mencapai Rp77,9 triliun, dengan komitmen adanya tambahan investasi sebesar Rp27,1 triliun hingga tahun 2026.

Menperin menyatakan, kendaraan elektrifikasi menjadi bagian dari target ekspansi ekspor Toyota Indonesia ke depan, dimulai dari ekspor kendaraan *hybrid* yang diproduksi secara lokal. “Alhamdulillah, pada hari ini terwujud pengiriman ekspor perdana kendaraan *hybrid* dengan tipe Innova Zenix,” ujarnya.

Kendaraan tersebut akan diekspor ke 27 negara termasuk Australia dengan jumlah 2.000 unit di tahun 2023. “Hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia mampu menembus pasar Australia yang terkenal memiliki spesifikasi yang ketat antara lain terkait dengan spesifikasi bahan bakar, spesifikasi emisi, dan spesifikasi keamanan,” jelasnya. 

LEBARKAN SAYAP, PANASONIC TEMBUS EKSPOR AC KE VIETNAM

Salah satu industri elektronik ternama di dalam negeri, PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI) semakin gencar memperluas pasar ekspornya. Hal ini ditandai dengan pengiriman perdana produk penyejuk udara (*air conditioner/ AC*) ke Vietnam.

Produk AC tersebut dihasilkan oleh unit bisnis AC PT PMI yang mulai beroperasi sejak tahun 1973. "Unit AC kami merupakan manufaktur AC terlengkap di Indonesia dengan nilai TKDN lebih dari 40% dan telah menggunakan refrigerant ramah lingkungan R32, serta membawa masuk teknologi termutakhir Panasonic nanoe yang sangat bermanfaat untuk kesehatan," kata Presiden Heating & Ventilation AC Company Panasonic Corporation, Masaharu Michiura di Jakarta

Panasonic Corporation awalnya memproduksi AC di Malaysia untuk diimpor ke Vietnam. Pemindahan produksinya ke Indonesia bertujuan memperluas bisnis AC di Indonesia, dan selanjutnya secara aktif akan berupaya untuk terus meningkatkannya.

Unit bisnis AC tersebut merupakan satu-satunya pabrik AC di Indonesia dengan kemampuan memproduksi secara penuh (*full manufacture*) dari bahan baku hingga produk jadi. Jenis produk AC yang dihasilkan meliputi AC Split tipe Inverter maupun Non-Inverter dengan kapasitas ½ PK hingga 2 ½ PK dengan kapasitas produksi total sebesar 600 ribu set per tahun.

Panasonic juga meresmikan *High Tech Mold & Dies Center* yang pengembangannya mulai diinisiasi sejak 2016 dan mulai diproses sejak awal tahun 2020. Proyek tersebut merupakan bentuk kerja sama internasional yang dibiayai hibah dari Pemerintah Jepang melalui Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan SDM industri di bidang *mold & dies* menuju pada level hi-tech.

Fasilitas tersebut ditargetkan dapat melatih dan memberikan sertifikat kompetensi pada level medium dan hi-tech kepada 2.000 tenaga kerja industri selama tiga tahun ke depan. Program pelatihannya merupakan kerja sama antara Kemenperin, Indonesia Mold & Die Industry Association (IMDIA), Yayasan Matsushita Gobel, serta dukungan tenaga ahli dari Jepang.

Sementara itu Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier memberikan apresiasi kepada Panasonic yang mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan ekspor produk industri elektronika.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang telah mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan aktivitas ekspor produk industri elektronika dengan terus berinovasi dan menambah lini produksi di level internasional," paparnya.

Dirjen ILMATE mengemukakan, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada PT PMI atas dukungannya terhadap program substitusi impor. Selanjutnya, PT PMI diharapkan dapat memproduksi komponen AC karena produsennya masih belum ada di Indonesia, serta meningkatkan kapasitas produksi komponen tersebut



untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak terlalu bergantung dengan komponen impor.

Sebagai bentuk dukungan program substitusi impor, 40 produk AC PT PMI telah mencatatkan tujuh kategori Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40,49%, ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai nilai lebih dari 50%. "Kemenperin mengapresiasi peran serta PT PMI dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional sesuai program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," ujar Taufiek.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Jonni Afrizon yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, hibah dari pemerintah Jepang telah diwujudkan dalam bentuk pengadaan peralatan/mesin, piranti lunak, serta ruangan dan fasilitas pendukungnya. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk melakukan pelatihan guna meningkatkan kompetensi serta kuantitas SDM industri di bidang *mold & dies*.

"Dengan majunya teknologi dan kompetensi SDM yang dicetak melalui *Hi-Tech Mold & Dies Center* ini, diharapkan industri *mold & dies* dapat lebih banyak memproduksi barangnya di dalam negeri, sehingga turut mendukung program substitusi impor, bahkan mampu bersaing dan semakin terlibat pada rantai suplai global," ungkap Sesditjen KPAII Kemenperin. 

HILIRISASI INDUSTRI TAMBANG SUDAH MENUAI HASIL

Pemerintah berkomitmen untuk terus menggenjot hilirisasi industri karena telah terbukti memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Wajar, apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali membahas keutamaan dari kebijakan penghiliran tersebut pada beberapa pertemuan penting.



Misalnya ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dan di depan para investor yang menghadiri ajang Mandiri Investment Forum di Jakarta, Presiden Jokowi menyinggung soal penghiliran industri pertambangan.

Presiden Jokowi mengingatkan, kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil. Dia pun mencontohkan, larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di tanah air, mendorong nilai ekspor nikel dari USD1,1 miliar menjadi USD30 miliar—USD33 miliar pada 2022.

“Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” ujarnya. Jokowi juga meminta dukungan dari semua pihak. Termasuk, pelaku industri keuangan untuk mendukung arah penghiliran yang disusun pemerintah.

Tidak dipungkiri, sektor industri termasuk subsektor penghiliran, menunjukkan kinerja sangat baik pada 2022 dengan mencatatkan angka pertumbuhan 5,01 %, serta menjadi sumber pertumbuhan tertinggi bagi perekonomian, yaitu sebesar 1,01 %. Merujuk data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), setidaknya terdapat tiga hal yang mendukung pertumbuhan sektor itu.

Pertama, hilirisasi industri yang terus meningkat. Lalu, pertumbuhan industri otomotif yang mencapai dua digit. Dan ketiga, produk hasil manufaktur Indonesia yang telah masuk dalam bagian *global value chain*.

Data Kemenperin juga menyebutkan, keberhasilan dari hilirisasi ditunjukkan dengan pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai 14,8 % atau tumbuh dua digit. Begitu pula dengan industri otomotif yang sebesar 10,67 %.

“Kedua produk tersebut juga telah masuk dalam mata rantai global, sehingga dapat dikatakan program

hilirisasi yang kita galakkan telah mencapai sasaran. Kami berharap pertumbuhan *double digit* ini bisa terus berlanjut di tahun 2023,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Nikel merupakan satu dari empat komoditas utama penghiliran di industri tambang. Dalam kerangka penghiliran industri berbasis mineral tambang, Kemenperin menyebutkan ada empat komoditas utama penghiliran selain nikel, yakni besi baja, aluminium, dan tembaga.

Tak dipungkiri, kekayaan sumber alam Indonesia untuk empat produk tambang itu, cukup besar. Data Kemenperin mencatat untuk industri besi baja, Indonesia memiliki sumber daya bijih besi 712 juta ton dan pasir besi 2 miliar ton.


PROYEK STRATEGIS DI MOROWALI

Pada awal Februari 2023, Menperin mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada rangkaian acara Groundbreaking Indonesia Growth Project (IGP) Morowali di Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir dan di Port Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur. Kegiatan ini mengusung tema “Pertambangan dan Pengolahan Nikel Rendah Karbon Terintegrasi di Kabupaten Morowali”.

Menko Airlangga mengatakan pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan proyek strategis nasional sebagai upaya pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal negara. “Ini adalah salah satu keberhasilan dari kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas pengelolaan sumber daya kita,” ujarnya.

Proyek ini mencakup pertambangan nikel di Blok Bahodopi dan pabrik pengolahan mineral atau smelter nikel berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) di Desa Sambalagi. PT Vale Indonesia menggandeng Taiyuan Iron & Steel (Grup) Co. Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co. Ltd (Xinhai) dalam pembangunan smelter RKEF dan membentuk perusahaan patungan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI) dengan nilai investasi fantastis sebesar Rp37,5 triliun.

Bupati Morowali, Taslim menyampaikan, atas nama masyarakat dan Pemda mengucapkan terimakasih kepada Menko Perekonomian bersama seluruh rombongan yang telah berkenan hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Sambalagi. Ia optimis bahwa visi mewujudkan Morowali Sejahtera Bersama dan cita-cita besar, yakni Morowali untuk Indonesia dapat tercapai.

Proyek ini merupakan smelter RKEF pertama di Indonesia yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU). Proyek ini diklaim sebagai pemurnian bijih nikel dengan emisi karbon terendah kedua setelah smelter serupa milik perseroan yang berada di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. 

PENJUALAN OTOMOTIF SEMAKIN MELAJU KENCANG

Industri otomotif Tanah Air masih menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan bisnisnya yang masih memiliki prospek sangat baik dan kinerja pertumbuhan industrinya naik secara signifikan setiap tahunnya.

Saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Memang peningkatannya juga cukup tajam dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari 300 ribu kurang lebih sudah naik ke hampir 600 ribu.

Presiden Indonesia Joko Widodo

Sepanjang tahun 2022, industri otomotif di Indonesia tumbuh 18 %, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk penjualan mobil pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.048.000 unit. Sedangkan, penjualan sepeda motor mengalami peningkatan 3,3 % sehingga menjadi 5.221.000 unit di tahun 2022.

Pada pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Tahun 2023 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada pelaku industri otomotif di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan ekspor hingga 100 %. Potensi besar tersebut harus dimanfaatkan oleh industri otomotif Tanah Air untuk bersaing dengan negara lain.

“Saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Memang peningkatannya juga cukup tajam dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari 300 ribu kurang lebih sudah naik ke hampir 600 ribu. Tetapi kita masih kalah dengan Thailand, sehingga saya ingin mendorong lagi, agar ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahunnya,” papar Jokowi.

Pada ajang IIMS 2023 yang berlangsung pada 16-26 Februari di JIExpo Kemayoran Jakarta berhasil mencatat total transaksi sebesar Rp5,3 triliun dan penjualan 15.622 unit kendaraan serta dihadiri oleh 468.720 pengunjung.

Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta menyebutkan bahwa peningkatan penjualan kendaraan di dalam negeri karena dampak positif dari penerapan fasilitas diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

“Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah akan terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik, sehingga Indonesia bisa mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060,” ungkapnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir mendampingi Menko Airlangga turut menyampaikan, pihaknya mendukung Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dalam penyelenggaraan GJAW 2023. Industri otomotif diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan tahun lalu melalui ajang tersebut.

GJAW 2023 digelar sebagai upaya menggerakkan

perkembangan industri otomotif Indonesia dan mendorong angka penjualannya. “Selain itu, kegiatan ini juga bisa memberikan informasi mengenai perkembangan industri otomotif Indonesia di awal tahun,” jelas Menperin.

Gelaran GJAW 2023 menampilkan 20 merek mobil, termasuk kendaraan penumpang, premium, dan komersial. Gaikindo mendorong anggotanya untuk mengembangkan model kendaraan baru di Indonesia dan meluncurkannya di pameran otomotif yang diselenggarakan asosiasi tersebut, salah satunya dalam ajang GJAW 2023.

“Konsep penyelenggaraan GJAW tahun ini berkolaborasi dengan lifestyle. Kami berharap, berbagai inovasi di GJAW akan mendapat sambutan positif dari masyarakat, berkontribusi bagi otomotif Indonesia, dan meningkatkan gairah industri otomotif di Indonesia,” ujar Ketua Umum GAIKINDO Johannes Nangoi.

TERLARIS


Partisipasi Toyota di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama 11 hari penyelenggaraan pameran, tanggal 16-26 Februari 2023, Toyota berhasil mencetak 1.947 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Dari total SPK yang diperoleh, duo MPV Avanza dan Veloz menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang masing-masing 331 unit dan 184 unit, atau sebesar 26,4% dari total seluruh model Toyota.

All New Kijang Innova Zenix yang diluncurkan PT Toyota-Astra Motor (TAM) pada akhir 2022 lalu juga mendapatkan respon positif dari pengunjung. All New Kijang Innova Zenix baik Hybrid maupun Non-Hybrid membukukan 403 SPK. Selain itu, All New Kijang Innova Zenix juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai ‘The Best Medium MPV’ dan Toyota bZ4X menang sebagai ‘The Best Electric Car’ di ajang IIMS 2023.

“Pencapaian ini memperkuat komitmen kami untuk bisa terus menghadirkan inovasi mobilitas yang melebihi ekspektasi serta meningkatkan kepuasan pelanggan,” kata Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwady.

Pada gelaran GJAW 2023, sejumlah peserta menjadikan peluang untuk meluncurkan model kendaraan terbarunya, serta sebagai ajang pertama penjualan model terbaru mereka. Beberapa model diluncurkan termasuk diantaranya Subaru Crosstrek, Lexus RZ BEV, dan Toyota RAV4. Dan tiga model yakni Toyota All New Agya, All New Astra Daihatsu Ayla, serta Chery Omoda 5 pertama kali dijual untuk umum pada penyelenggaraan GJAW 2023 ini.

Para peserta juga menghadirkan model-model kendaraan yang sejalan dengan konsep otomotif x lifestyle yang diangkat pameran kali ini dengan menghadirkan kolaborasi model terbarunya dengan fashion desainer dan juga *visual artist* ternama. Di antaranya Subaru yang kerja sama dengan The North Face, lalu ada Mazda yang menggandeng *designer* Jeffrey Tan dan MG yang mengusung *visual artist* Abenk Alter dan Muklay.

Pengamat otomotif LPEM Universitas Indonesia (UI) Riyanto mengatakan, target penjualan kendaraan sebesar 2 juta unit bisa tercapai pada tahun 2030 dengan sejumlah catatan, misalnya, setiap 150 orang Indonesia harus membeli 1 unit mobil. Atau rata-rata pendapatan orang Indonesia naik menjadi US\$ 6.400 atau Rp97 juta per tahun (kurs Rp15.200). “Dari 150 orang, setiap 1 orang beli mobil,” tuturnya. 



REBUT CUAN, PRODUSEN MEBEL INCAR PASAR TIMUR TENGAH

Pelaku industri mebel melihat potensi pasar ekspor ke Timur Tengah menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan saat ini. Namun untuk mengisi pasar tersebut masih dibutuhkan berbagai dukungan dari pemerintah.

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, pemerintah perlu menjembatani pelaku industri furnitur tanah air untuk bisa mengikuti pameran di Timur Tengah.

“Kita mungkin perlu bantuan pemerintah di sini untuk membantu misalnya apa di tahap awal melalui pameran dulu gitu ya,” ujarnya. Ia berharap, ke depannya industri furnitur dalam negeri bisa memiliki etalase permanen di negara-negara di Timur Tengah, agar bisa memudahkan pelaku industri lokal untuk memasarkan produk-produknya di sana.

“Kita harus juga mengikuti jejak mereka punya permanen display lah kalau bisa di Arab itu ya, misalnya di Abu Dhabi, Kuwait ataupun Bahrain saja permanen display kita punya bagusnya gitu,” tutur Abdul. Sebelumnya ia menjelaskan, jika berbagai negara yang memiliki industri furnitur kuat seperti China, telah lebih dahulu berekspansi di negara-negara di Timur tengah.

Pusat perbelanjaan yang dimaksudkan Abdul adalah pusat perbelanjaan yang khusus menjajakan produk-produk furnitur besutan China bernama Dragon Mart yang memiliki panjang 1,2 kilometer. Dragon Mart ini, terletak di pinggiran kota Dubai yang disebutkan sebagai pusat perdagangan ritel China terbesar di luar China daratan.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menegaskan, pihaknya telah memiliki dua strategi agar kinerja industri furnitur nasional semakin berdaya saing global, yakni melalui pengoptimalan pasar domestik dan memperluas tujuan ekspor ke pasar nontradisional. Menurutnya, strategi pertama dapat secara efektif dilakukan mengingat konsumen furnitur dalam negeri terutama untuk kelas menengah terus bertambah seiring membaiknya industri properti dan bisnis *hospitality*.

“Kemudian konsumsi belanja pemerintah melalui pemanfaatan produk ber-TKDN juga sedang gencar digalakkan oleh pemerintah,” jelasnya pada pembukaan



Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2023 di Yogyakarta. Menurut Putu, program tersebut juga dapat menjadi kesempatan pelaku industri furnitur kita meningkatkan pasarnya di dalam negeri.

“Pemerintah juga memfasilitasi melalui penyelenggaraan *business matching* untuk mempertemukan para pelaku industri dengan para pengguna produk dalam negeri, seperti dari instansi pemerintah dan BUMN. Industri furnitur menjadi salah satu sektor andalan untuk mendukung kantor-kantor pemerintah dan sekolah,” paparnya.

Untuk strategi kedua, lanjut Putu, merupakan bentuk keniscayaan dikarenakan pasar tujuan ekspor tradisional saat ini masih terganggu akibat resesi. “Di sisi lain, pasar nontradisional sangat potensial untuk dikelola, misalnya India dan kawasan Timur Tengah, di mana pertumbuhan sektor properti masih relatif stabil,” imbuhnya.

TARGET USD 5 MILIAR

Pada pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023, di Jakarta, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah terus mendukung industri furnitur Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan produktivitasnya melalui berbagai kebijakan. Pada tahun 2022, nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai USD2,8 miliar. Nilai ini diharapkan dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan menuju target USD5 miliar di tahun 2024.

“Kebijakan dukungan Kemenperin kepada pelaku industri furnitur di antaranya adalah jaminan pasokan bahan baku dan bahan penolong, peningkatan kemampuan teknologi dan kapasitas SDM, insentif perpajakan, pengembangan desain, serta fasilitasi keikutsertaan dalam pameran,” sebutnya

Menghadapi tantangan dan kendala pada industri furnitur, subsektor tersebut harus memanfaatkan momentum pasar dalam negeri yang ekspansif sebagai peluang penguasaan pasar dalam negeri. “Hal ini juga untuk mengurangi ketergantungan akan produk impor yang mencapai USD495,7 juta di tahun 2022,” ujar Menperin.

Di samping itu, Kemenperin terus memfasilitasi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor furnitur dan kerajinan untuk tampil di ajang pameran tingkat nasional dan internasional. Upaya strategis ini guna memperluas akses pasar dan jaringan bisnis bagi mereka yang ikut serta sehingga dapat meningkatkan nilai penjualannya, yang akan berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



“Tahun ini, kami telah memfasilitasi para pelaku IKM furnitur dan kerajinan untuk ikut serta dalam ajang pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023 dan Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2023,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka IKMA Reni Yanita.

Reni menyampaikan, di ajang IFEX 2023 yang digelar di Jakarta Internasional Expo Kemayoran pada 9-12 Maret 2023, Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin memboyong 17 IKM furnitur dan kerajinan serta dekorasi rumah. Ditjen IKMA memberikan fasilitasi lahan booth seluas 200 meter persegi bagi para pelaku IKM furnitur untuk menampilkan berbagai produk unggulannya.

“Sementara itu, untuk pameran JIFFINA 2023 di Jogja Expo Center pada 11-14 Maret 2023, kami juga memfasilitasi booth pameran kepada 12 IKM furnitur yang telah melalui tahap kurasi,” sebut Reni. Kedua pameran yang berskala internasional tersebut, diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor nasional dari produk furnitur dan kerajinan yang dihasilkan oleh para pelaku IKM.

Pada tahun 2022, ekspor produk furnitur dan kerajinan mencapai USD3,5 miliar. Adapun negara tujuan utamanya antara lain Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Jerman, dan Inggris. Proporsi nilai ekspor yang cukup signifikan dari industri ini menunjukkan bahwa karakteristik sektornya berorientasi ekspor.

“Kami berharap para pelaku IKM furnitur dan kerajinan dapat terus mengikuti tren pasar global serta aktif melakukan inovasi, dan yang penting juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam rantai pasoknya. Kami optimistis Indonesia akan bisa menjadi *trendsetter* dalam pengembangan *eco lifestyle furniture*,” ujarnya. **mi**

STOP IMPOR, ASPAL BUTON PERLU DIOPTIMALKAN

Pada gelaran Business Matching Produk Dalam Negeri 2023 di Jakarta, beberapa waktu lalu, ada agenda pemberian Penghargaan P3DN bagi pengguna produk dalam negeri dengan anggaran terbesar. Untuk kategori kementerian/lembaga, pemenangnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR).

Pada saat itu, sebelum Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Business Matching Produk Dalam Negeri 2023, dirinya menyerahkan Penghargaan P3DN kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya, Presiden terlihat sumringah ketika mengungkapkan rasa gembira dan apresiasinya kepada Kementerian PUPR sebagai juara pertama dalam penggunaan produk-produk dalam negeri. Khususnya dalam pemanfaatan aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor.

"Jadi kalau Pak Menteri PUPR sekarang juara, benar, sudah betul. Begitu saya perintah, 'Pak, semua produksi Buton kita beli lewat e-Katalog.' Ya gini lho, sudah betul, penilaiannya betul, juara satu sudah betul," ungkap Jokowi.

Kepala Negara juga menekankan pemerintah ingin ada nilai tambah dari aspal yang dihasilkan di Buton. "Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini semua ada di sini. Jadi kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal," kata Jokowi. Selain itu, ada peluang bagi investor untuk berinvestasi pada industrialisasi aspal.

"Ini peluang, kalau bapak ibu mendengar seperti itu, peluang, 'wah investasi industri aspal'. Itu baru kita baru berbicara kebutuhan dalam negeri lho, kalau tambah ekspor gede banget," ujarnya. Jokowi menyebutkan, setiap tahunnya Indonesia mengimpor 5 juta ton aspal. Padahal, deposit aspal di dalam negeri mencapai 662 juta ton.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah akan melarang impor aspal mulai tahun 2024, sejalan dengan kebijakan hilirisasi untuk

meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Kementerian Perindustrian tengah menyusun peta jalan hilirisasi aspal Buton (asbuton) dengan tujuan mengoptimalkan utilisasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas melalui investasi.

"Salah satunya yaitu melalui investasi pabrik ekstraksi asbuton menjadi aspal murni dan pengembangan kapasitas pabrik asbuton murni yang diharapkan kapasitas produksi sebesar 500.000 ton pada tahun 2027, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp4 triliun," kata Menperin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/2).

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mendorong optimalisasi sumber daya energi dan mineral potensial di Kabupaten Buton, yakni aspal. "Aspal Buton memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang aspal minyak yang sebagian besar diimpor dari Timur Tengah. Untuk itu, industri aspal Buton krusial untuk kembali dihidupkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sultra," ungkapnya.

Untuk diketahui, cadangan aspal Buton kini mencapai 662 juta ton atau setara 80% cadangan aspal alam dunia. Jumlah cadangan tersebut bahkan mampu memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri selama ratusan tahun.

Ali berharap, potensi besar tersebut tidak disia-siakan dan industri aspal Buton dapat segera direalisasikan. Dengan begitu, masyarakat di Provinsi Sultra bisa mendapatkan manfaat dan Kabupaten Buton dapat hidup kembali sebagai industri penghasil aspal. "Dengan optimalisasi potensi aspal Buton untuk memenuhi kebutuhan



aspal dalam negeri, maka lapangan pekerjaan dapat tercipta. Kalau sudah terwujud, masyarakat Sultra semakin sejahtera dan mentas dari kemiskinan," tuturnya.

Perlu juga diketahui, kualitas aspal Buton lebih baik ketimbang aspal minyak impor. Hal ini berdasarkan hasil uji Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Konstruksi Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, nilai stabilitas aspal Buton PG 70 berada di angka 1.562,5. Nilai ini berada di atas aspal minyak 60/70 yang stabilitasnya ada di angka 1.357.

Terkait hal itu, Ali pun sudah membuktikan lewat pengujian dengan mengaplikasikan aspal Buton dalam proyek pembangunan Tol Kendari-Toronipa. "Kualitasnya benar-benar bagus. Harganya pun bersaing dengan aspal minyak impor. Aspal di jalan raya Indonesia selama ini menggunakan aspal impor. Dalam kurun waktu 3-6 bulan, jalan raya dengan aspal impor sudah



Menperin mengemukakan, pihaknya juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan silika sebagai bahan baku industri photovoltaic (PV) solar panel dan semikonduktor.

rusak sehingga tidak efisien," terangnya.

INDUSTRI PENGOLAHAN SILIKA

Menperin mengemukakan, pihaknya juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan silika sebagai bahan baku industri photovoltaic (PV) solar panel dan semikonduktor. "Bahwa rantai nilai industri ini masih ada kekosongan atau belum tersedianya industri pada industri hulu dan antara. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan investasi pada rantai tersebut," tuturnya.

Dalam upaya menumbuhkan industri pengolahan silika, lanjut Agus, Indonesia memerlukan peningkatan investasi di industri *metallurgical-silicon* sebesar USD300 juta dengan kapasitas produksi 32.000 metrik ton per tahun. Selanjutnya, dibutuhkan juga investasi di sektor industri *polysilicon* sebesar USD373 juta dengan kapasitas produksi mencapai 6.500 metrik ton per tahun.

"Selain itu, kebutuhan investasi di industri *ingot monocrystalline* dan *wafer* sebesar USD85 juta dengan kapasitas 1 GWP per tahun. Terkait dengan rencana investasi tersebut, diusulkan

pembatasan ekspor bahan baku mentah silika melalui neraca komoditas serta percepatan investasi industri *intermediate*," paparnya.

Menperin menambahkan, Kemenperin juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan ilmenit untuk bahan baku cat atau *coating*. "Ilmenit merupakan mineral krisis hasil produk samping pengolahan timah, zirkon dan pasir besi yang mengandung logam sangat berharga, yaitu titanium," imbuhnya.

Untuk mendukung pelaksanaan larangan ekspor bahan mentah termasuk ilmenit pada bulan Juni 2023, menurut Agus, perlu adanya investasi pengolahan ilmenit yang diestimasi mencapai USD85,8 juta untuk memproduksi titanium slag dengan kapasitas 33 ribu ton per tahun. "Yang nantinya diolah menjadi TiO_2 white pigment dengan kapasitas 33 ribu ton per tahun sebagai produk hilir yang kebutuhan di dalam negeri sedang tinggi," terangnya. **mi**



RI BIDIK JADI PRODUSEN KERAMIK TERBESAR KE-4 DUNIA

38

Indonesia optimistis bisa mengejar target untuk menjadi produsen keramik terbesar keempat di dunia pada tahun 2024, setelah merampungkan proyek penambahan kapasitas sebanyak 75 juta meter persegi (m²).

Ekspansi tersebut akan membuat produksi keramik nasional menjadi 625 juta m² di tahun depan, berada di bawah Tiongkok yang sebanyak 10,2 miliar m², India (1,3 miliar m²), dan Brasil (909 juta m²). Saat ini, Indonesia masih berada di posisi terbesar kedelapan dunia dengan kapasitas produksi 551 juta m².

"Setelah ekspansi sebesar 75 juta m² selesai di akhir 2024, kapasitas terpasang industri keramik nasional akan mencapai 625 juta m² per tahun, dan kita bisa masuk di nomor empat dunia," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto.

Edy menyatakan, produksi keramik nasional tahun ini ditargetkan mencapai 470-480 juta m². Angka ini naik sekitar 10% dari realisasi produksi keramik pada 2022 sebanyak 430 juta m².

"Kami masih optimistis di tahun ini. Karena biasanya tren permintaan keramik akan meningkat menjelang Lebaran, dengan kenaikan berkisar 5-10%. Asaki juga mengharapkan adanya percepatan penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah yang bisa turut mendorong permintaan keramik," paparnya.

Edy mengapresiasi atas upaya-upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang terus mendorong keberlangsungan industri keramik nasional. Melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemenperin,

industri keramik nasional mampu terus ekspansi serta pulih lebih cepat setelah dihantam pandemi Covid-19.

Asaki merasakan kebijakan-kebijakan Kemenperin tersebut menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi para pelaku industri keramik saat masa pandemi, terutama dengan kehadiran Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang terbukti efektif memacu produktivitas di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Kebijakan tersebut memberikan kami keleluasaan dan kemampuan untuk bisa beroperasi normal," ujar Edy.

Selain itu, semangat *no one left behind* dalam memperjuangkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU sangat dirasakan manfaatnya oleh industri keramik nasional. "Kami juga mengapresiasi program P3DN yang mendorong industri khususnya anggota ASAKI untuk memanfaatkan fasilitasi sertifikasi TKDN. Kami laporkan bahwa mayoritas sudah memiliki sertifikat TKDN dan melaksanakan di atas 75%," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya terus mendorong penyerapan produk keramik dalam negeri, termasuk melalui belanja berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, produk-produk

Menperin mendukung roadmap industri keramik yang disampaikan Asaki, bahwa produksi keramik akan ditingkatkan menjadi 810 juta m² untuk memenuhi target angka perkapita penggunaan keramik di negara-negara Asia Tenggara yang sebesar tiga meter persegi.

keramik nasional mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa meningkatkan daya saing industri keramik nasional.

“Salah satu yang menjadi fokus Kemenperin adalah produk-produk nasional kita cepat mendapatkan sertifikasi. Karenanya, beberapa regulasi berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri sudah kami tuangkan, termasuk regulasi penjumlahan nilai bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 %,” tutur Menperin saat membuka Pameran Keramik Indonesia dan Megabuild Indonesia 2023 di Jakarta.

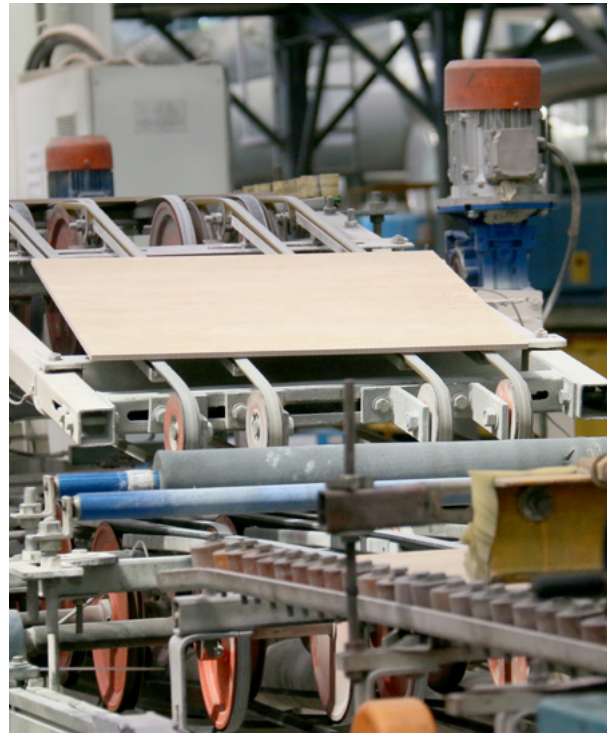
PROSPEK CERAH

Menperin juga menyampaikan, industri keramik nasional memiliki prospek yang cerah seiring dengan pertumbuhan pasar domestik yang terus meningkat melalui banyaknya proyek infrastruktur pemerintah. Peluang pengembangan industri keramik tanah air salah satunya didukung oleh proyek pemerintah yang potensial, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung saat ini.

“Ini menjadi potensi yang besar bagi industri dalam negeri, termasuk bagi industri keramik dan pendukungnya. Tentunya kita tidak mau pembangunan IKN diisi oleh produk-produk yang bukan berbasis dalam negeri. Sehingga, saya harap *roadmap* industri keramik nasional mampu mengisi kebutuhan-kebutuhan pembangunan IKN,” ujarnya.

Menperin mendukung *roadmap* industri keramik yang disampaikan Asaki, bahwa produksi keramik akan ditingkatkan menjadi 810 juta m² untuk memenuhi target angka perkapita penggunaan keramik di negara-negara Asia Tenggara yang sebesar tiga meter persegi. “Kemenperin akan terus mendampingi dan mendukung target tersebut. Terlebih, industri keramik ditargetkan mencapai utilisasi di atas 82% hingga 2024. Saat ini utilitasnya mencapai 78%,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Menperin, peningkatan daya saing industri keramik juga dapat diraih melalui menerapkan prinsip industri hijau dengan proses produksi yang ramah lingkungan. “Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah memperkenalkan teknologi baru sehingga produk menjadi daya saing tinggi, dan tidak berhenti berinovasi,” imbuhnya.




Di lokasi terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendukung adanya pemancangan tiang pertama proyek ekspansi pembangunan plant IV-C PT Arwana Citra Mulia Tbk di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Herman Deru berharap pabrik yang akan dibangun tersebut menjadi ikon di Indonesia yang akan memproduksi keramik bermutu terbaik.

“Keberadaan pabrik keramik ini akan menjadi kebanggaan bukan hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat Sumsel,” tuturnya. Dia juga meyakini dengan adanya pembangunan dan pengembangan pabrik tersebut berdampak positif bagi masyarakat Sumsel di masa depan.

“Sebab 95 % karyawannya merupakan tenaga kerja lokal. Nah, kami mendukung dibukanya lapangan kerja bagi warga lokal. Tentu ini akan membawa pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

CEO PT. Arwana Citra Mulia Tbk, Tandean Rustandi, menyebutkan pabrik ini merupakan pabrik terbesar yang berdiri di atas tanah seluas 5,6 hektar dan akan memberikan kontribusi bagi masyarakat. “Dengan adanya Proyek Ekspansi Pembangunan Plant IV-C ini, akan membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya,” ungkapnya.

Selain memberikan lapangan kerja bagi warga lokal, pembangunan pabrik ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Bahkan, pabrik yang akan dibangun ini akan menggunakan teknologi terkini dan modern untuk memproduksi keramik berkualitas terbaik.

“Kami akan terus memperhatikan aspek lingkungan dalam seluruh proses produksi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar,” ujar Tandean. Sebagai produsen keramik terbesar nomor ke-9 di dunia, PT. Arwana berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompetitif. 

JURUS KILAUKAN KINERJA INDUSTRI PERHIASAN

Industri perhiasan sebagai salah satu sektor yang cukup penting dalam memacu perekonomian nasional. Oleh karena itu, hilirisasi industri perhiasan emas menjadi salah satu perhatian Kementerian Perindustrian.





Kemenperin mencatat, nilai ekspor perhiasan Indonesia meningkat pada semester I tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sepanjang Januari-Juni 2021, ekspor industri perhiasan Indonesia mencapai USD1,23 miliar.

Angka tersebut melesat hampir dua kali lipat menjadi USD2,37 pada Januari-Juni 2022. Adapun negara utama tujuan ekspor perhiasan dari Indonesia antara lain Swiss (35%), Amerika Serikat (26%), Uni Emirat Arab dan Hongkong (masing-masing 11%).

Data Trademap.org juga menyatakan *market share* ekspor perhiasan Indonesia ke dunia pada tahun 2021 adalah sebesar 2,5% dan menempati urutan ke-14 dari seluruh negara eksportir produk perhiasan. Market share ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2%. Hal ini menunjukkan bahwa industri perhiasan Indonesia masih memiliki peluang untuk terus tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan pangsa pasarnya.

Menperin menegaskan, pentingnya hilirisasi industri perhiasan emas karena kondisi saat ini bahwa emas granula hasil produksi perusahaan pertambangan emas di dalam negeri diekspor ke luar negeri untuk dijadikan emas batangan. "Nantinya emas batangan itu diimpor oleh produsen emas perhiasan di Indonesia sebagai bahan baku pembuatan emas perhiasan," ujarnya.

Agus menyampaikan, emas granula diekspor ke luar negeri karena sebelumnya dikenakan PPN 10% berdasarkan UU 42 Tahun 2009, sementara emas batangan adalah Bukan Objek Pajak. Namun saat ini emas batangan selain untuk cadangan devisa negara termasuk emas granula telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut seiring terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2022.

"Tetapi karena PP tersebut terbit di bulan Desember tahun 2022, sedangkan perusahaan pertambangan telah menyampaikan RKAB tahun 2023 di tahun sebelumnya, maka produsen perhiasan dalam negeri belum bisa membeli emas granula dari perusahaan pertambangan di dalam negeri," paparnya.

Oleh karena itu, Kemenperin membutuhkan dukungan untuk skema pembiayaan industri perhiasan di dalam negeri

bisa melalui Bullion Bank, sehingga emas granula hasil produksi dari perusahaan pertambangan emas di dalam negeri dapat diserap oleh Bullion Bank.

"Dengan adanya Bullion Bank maka produsen emas perhiasan di dalam negeri bisa membeli atau meminjam emas granula atau emas batangan dalam bentuk emas granula atau emas batangan dan dikembalikan lagi dengan bentuk yang sama sehingga tidak terpengaruh dengan fluktuasi harga emas," tandasnya.

Selain itu, adanya Bullion Bank mengurangi biaya pengapalan karena jarak yang lebih dekat di dalam negeri, tidak perlu biaya untuk mencetak emas granula menjadi batangan di perusahaan *refinery* luar negeri, dan tidak perlu melebur kembali emas batangan di industri perhiasan.

Saat ini perusahaan pertambangan emas di dalam negeri telah terikat pemasaran emas granulanya 100 % untuk tujuan ekspor sesuai RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM. "Untuk itu, perlu mendorong perusahaan pertambangan emas di dalam negeri untuk merevisi dokumen RKAB agar bisa segera memenuhi kebutuhan bahan baku emas perhiasan di dalam negeri," ucap Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi untuk terus menggenjot kinerja ekspor industri perhiasan dengan melihat kemampuan industri skala besar dan sedang yang mencapai 98 unit usaha, dengan lebih dari 21 ribu tenaga industri di dalamnya. Salah satu upaya Kemenperin mendukung pertumbuhan industri perhiasan dalam negeri adalah memfasilitasi keikutsertaan pada pameran berskala nasional dan internasional.

"Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, pemerintah tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, salah satunya dengan memperbaiki rantai pasok industri perhiasan seperti mempermudah akses bahan baku," tuturnya.

Upaya lainnya, yakni mendorong penurunan tarif bea masuk produk perhiasan di negara tujuan ekspor melalui pemanfaatan kerja sama perjanjian perdagangan internasional, termasuk mendukung adanya pameran produk perhiasan berskala internasional.

Salah satu perusahaan manufaktur perhiasan emas, PT Hardinata Abadi Tbk (HRTA), bakal ekspor perhiasan emas ke India secara eksklusif dengan Kundan care product LTD yang juga merupakan perusahaan manufaktur, *refinery*, dan eksportir dari produk emas, perak, dan energi yang terbesar di negara Bollywood tersebut.

Direktur Utama HRTA, Sandra Sunanto menyampaikan, pinjaman sindikasi menjadi pencapaian *milestone* yang penting dalam meningkatkan *corporate image* HRTA, yang saat ini berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu eksportir perhiasan emas berskala Internasional.

"Kami telah berhasil memperkuat posisi sebagai perusahaan perhiasan emas dan emas batangan paling terintegrasi dari industri antara (*midstream*) hingga industri hilir (*downstream*) di Indonesia. Kami siap menjadi partner bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program hilirisasi terutama di industri emas di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, hilirisasi ini menjadi kunci untuk bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi produk emas yang akhirnya dapat berkontribusi positif bagi penopang devisa Indonesia. Apalagi, Sandra menuturkan, ekspor perhiasan dan emas batangan telah menjadi komoditas utama dalam menopang ekspor nonmigas Indonesia saat ini. **mi**

INDUSTRI MRO LEBARKAN SAYAP KE PASAR EROPA

Industri kedirgantaraan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun fokus pengembangannya meliputi industri pesawat terbang propeler, industri komponen pesawat, serta industri Maintenance, Repair, and Operations (MRO).

EXTERNAL POWER
RECEPTACLE
115/200 VOLTS
400 CYCLES

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya fokus untuk mendorong tumbuhnya industri perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) di Indonesia. Sektor tersebut dinilai prospektif lantaran ditopang dengan terus meningkatnya bisnis industri penerbangan. "Kami optimistis, dengan kondisi industri penerbangan di Indonesia yang terus tumbuh, maka peluang industri MRO untuk tumbuh pun akan semakin besar," ujarnya.

Menurut Agus, industri MRO memiliki peranan penting bagi industri penerbangan karena mampu menekan pengeluaran, salah satunya biaya impor komponen pesawat. "Selain itu, bisnis industri MRO cukup menjanjikan, seiring meningkatnya sektor pariwisata dan perekonomian di Tanah Air. Bahkan, didukung pula dengan maraknya pembangunan bandara di berbagai wilayah di Indonesia," imbuhnya.

Kemenperin memproyeksi, potensi bisnis industri perawatan dan perbaikan pesawat di Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai USD2,2 miliar, naik signifikan dibanding tahun 2016 sebesar USD970 juta. Hal ini seiring upaya pemerintah yang memacu pengembangan industri jasa penerbangan dalam negeri sejak tahun 2000 sehingga kinerjanya tumbuh dalam satu dekade terakhir.

"Dalam upaya memacu daya saingnya, industri MRO sendiri sudah diberikan berbagai fasilitas insentif fiskal seperti *tax holiday* dan pembebasan bea masuk," ujar Agus. Saat ini, industri MRO di Indonesia, diperkuat sekitar 32 perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Aircraft Maintenance Service Association (IAMSA).

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan, selama ini, Kementerian Perindustrian berperan penting dalam meningkatkan daya saing industri kedirgantaraan, termasuk sektor MRO. "Upayanya antara lain adalah memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran dan *business matching* baik tingkat domestik maupun internasional," tuturnya.

Dirjen ILMATE mengemukakan, pihaknya turut memfasilitasi industri MRO nasional dapat tampil di pameran bergengsi tingkat internasional, Hannover Messe 2023. "Melalui dukungan ini, diharapkan industri MRO dalam negeri akan semakin dikenal dan diakui di pasar jasa industri global," ungkapnya.

PT Garuda Maintenance Facility (PT GMF) selaku perusahaan MRO pesawat terbesar di Indonesia, dan FL Technics Indonesia sebagai perusahaan MRO asal Eropa, berkolaborasi untuk menampilkan solusi perawatan pesawat terbaru mereka pada perhelatan Hannover Messe 2023. Kedua perusahaan merupakan anggota IAMSA.

"Promosi produk industri dalam negeri di Hannover Messe juga dapat memperkuat *brand image* GMF Aero Asia dan FL Technic sebagai pemain utama dalam industri MRO di Indonesia. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan industri MRO nasional dapat semakin maju dan berkembang, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ujar Taufiek.

Menurutnya, seiring pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri MRO diharapkan untuk mengimplementasikan teknologi digital seperti *artificial intelligence* dan *internet of things* dalam ekosistem industrinya.

"Guna mempercepat transformasi digital tersebut, pemerintah secara simultan menyediakan berbagai insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super tax deduction*," sebut Taufiek. Selain itu, difasilitasi pemberian insentif non fiskal, pembangunan dan pengelolaan kawasan industri, sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, fasilitasi sertifikasi TKDN, serta bimbingan teknis pemenuhan standar industri.

Direktur Utama PT GMF Aero Asia, Andi Fahrurrozi menyampaikan bahwa Hannover Messe adalah ajang yang ideal bagi GMF untuk memperluas cakupan pasar internasional. "Dengan diversifikasi bisnis yang kini tengah GMF galakkan, kami percaya hadirnya kerja sama dengan pihak asing akan sangat membantu dalam proses *transfer knowledge* serta mengakselerasi pengembangan bisnis yang diharapkan," ujarnya.

Dalam Hannover Messe, GMF memamerkan XPream, sebuah aplikasi terintegrasi yang menyediakan data *real-time* untuk memudahkan proses dan aktivitas pemantauan *project* sedari awal hingga akhir. Inovasi digital ini juga akan menyajikan masukan berbasis data yang membantu pelanggan dalam pencegahan keterlambatan operasional.

Sementara itu, FL Technics Indonesia memamerkan solusi perawatan pesawat yang terbaru dan terbaik dari berbagai jenis pesawat. "Dengan berpartisipasi dalam perhelatan teknologi seperti Hannover Messe, FL Technics Indonesia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa FL Technics & Avia Solutions Group hadir di Indonesia dan siap untuk memberikan dukungan kepada *potential customer* di seluruh dunia termasuk Asia Pasifik," ujar Direktur FL Technics Indonesia, Martynas Grigas. 

JABABEKA ECOMMERCE INDUSTRIAL PARK DUKUNG PENUMBUHAN STARTUP

Kementerian Perindustrian mendukung adanya inisiatif kawasan industri yang menerapkan konsep industri 4.0 secara terintegrasi dalam proses bisnisnya. Sebab, karakteristik industri 4.0 yang padat teknologi dinilai memiliki kemampuan sebagai katalis dalam upaya penciptaan efisiensi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, PT Jababeka Tbk (KIIA) melalui Kawasan Industri Jababeka di Cikarang berencana mengincar sektor industri perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Hal ini menyusul diresmikannya pengembangan baru Kawasan Industri Jababeka, yaitu Jababeka Ecommerce Industrial Park, di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang.

Jababeka Ecommerce Industrial Park ini merupakan sebuah lahan dengan pengembangan tahap awal seluas 40 hektar dan ditujukan untuk sektor industri *e-commerce*, seperti bisnis *marketplace*, *shopping mall*, toko online *B2C*, dan toko online sosial media. Dengan tagline "A New Breakthrough Beyond All Industries", diharapkan bisa memenuhi kebutuhan industri *e-commerce* yang tumbuh dengan pesat saat ini.

"PT Jababeka Tbk terus berinovasi dalam memberikan layanan dan kebutuhan dunia industri, dan peresmian ini merupakan salah satu pengembangan bisnis yang kami rencanakan di tahun 2023," kata Hyanto Wihadhi selaku salah satu Direktur PT Jababeka Tbk.

Hyanto menambahkan bahwa Jababeka Ecommerce Industrial Park memiliki keunggulan, yaitu didukung dengan kemudahan aksesibilitas dan konektivitasnya dengan kota-kota besar di Indonesia. Kawasan ini terkoneksi dengan akses empat akses tol (KM 28, KM 29, KM 31, dan KM 34,7), sehingga dapat memperlancar jalur logistik ke daerah lain. Hal ini tentu menambah kenyamanan investor yang nanti berinvestasi di Jababeka Ecommerce Industrial Park.

Selain itu, Jababeka Ecommerce Industrial Park memiliki dukungan beragam fasilitas dan sarana infrastruktur lengkap berkelas dunia yang dibutuhkan industri *e-commerce*, mulai dari pembangkit listrik mandiri yang sanggup menyuplai 1000 MW, *Waste Water Treatment Plant & Water Treatment*

Plant yang mampu mengolah limbah dan memberikan air bersih hingga 72.600 m³/hari, pusat solusi logistik Cikarang Dry Port yang merupakan perpanjangan dari Pelabuhan Tanjung Priok, jaringan serat optik (*fiber optic*) 5G berkecepatan tinggi, Pelayanan investasi satu pintu: J-FAST, keamanan 24 jam, hingga Heli Commuter.

"Dengan adanya berbagai fasilitas yang lengkap, kami optimis bisa membantu memenuhi kebutuhan para pelaku industri *e-commerce*. Saat ini, progresnya, kita langsung masuk pembangunan. Dan, ini merupakan bentuk keseriusan kami untuk memenuhi kebutuhan pasar," kata Hyanto.

DUKUNG SEKTOR IKM

Mewakili Menteri Perindustrian pada acara *Ground Breaking* Jababeka E-Commerce Industrial Park, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mengemukakan, pengembangan kawasan industri sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyebutkan bahwa semua sektor industri wajib berlokasi di kawasan industri. "Kawasan industri juga wajib mengalokasikan 20 % untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM)," ungkapnya.

Reni menambahkan, pihaknya rutin melaksanakan program *link and match* antara pelaku industri skala besar dengan pelaku IKM. Tujuannya agar sektor IKM menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. "Alangkah lebih efektif dan efisiennya ketika kegiatan produksi tersebut di satu kawasan, tentunya akan meningkatkan daya saing," imbuhnya.

Kemenperin pun berharap implementasi industri 4.0 dalam lingkup kawasan industri dapat memberikan manfaat bagi para *tenant*-nya serta akselerasi terhadap pembangunan



industri dan peningkatan daya saing industri nasional ke depannya. Apalagi, PT Jababeka Tbk sebagai salah satu perusahaan yang pionir dalam pengembangan kawasan industri.

"Kami mengapresiasi fase baru pengembangan rangkaian proyek Jababeka, yang akan terdiri dari Halal Industrial Cluster, Biotech and Medical Industrial Cluster, High-tech Industrial Cluster, serta Startup Industrial Cluster akan menambah daftar panjang kontribusi positif PT Jababeka Tbk bagi sektor industri selama lebih dari tiga dekade eksistensinya," papar Reni.

Dirjen IKMA memberikan apresiasi dengan rencana pembangunan Startup Industrial Cluster karena sejalan program Startup4Industry (S4I) yang diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017. Tujuan program S4I ini mencari para pelaku



startup supaya bisa menjadi penyedia solusi teknologi bagi sektor IKM maupun industri besar yang sedang punya kendala di teknologi.

“Sejak 2017, jumlah peserta dari program S4I sudah hampir 900 startup. Kami berharap, dengan adanya Startup Industrial Cluster di Jababeka, mereka bisa bertemu dengan mitra atau calon yang akan mengimplementasikan solusi teknologinya,” ujar Reni.

Pada kesempatan yang sama, Reni juga menyampaikan, Kemenperin menyambut baik adanya kawasan industri halal yang akan dibangun di dalam Jababeka E-Commerce Industrial Center. “Sebagai negeri dengan konsumen halal terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal dasar yang sangat baik untuk menciptakan ekosistem halal secara nasional,” tuturnya.

Selain itu, potensi lainnya adalah Indonesia memiliki berbagai sektor industri yang cukup kuat untuk berkompetisi menjadi pemain utama industri halal secara global, baik itu di sektor makanan dan minuman, tekstil, farmasi, hingga kosmetik.

“Ditambah lagi masih terdapat pasar halal yang cukup terbuka, baik di negara-negara OKI seperti Pakistan, Turki, dan Arab Saudi maupun negara-negara non-OKI namun memiliki populasi masyarakat muslim yang cukup besar seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat,” tandasnya.

Reni menyebutkan, terdapat beberapa program strategis Kemenperin yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses bisnis kawasan industri ke depannya, tidak terkecuali bagi para tenant yang akan menempati

kawasan tersebut. Program tersebut di antaranya adalah penyiapan SDM industri melalui pendidikan vokasi 3 in 1, serta link and match untuk menyinergikan kebutuhan industri dengan fasilitas pendidikan yang ada di sekitar kawasan, baik di tingkat SMK maupun D1 sampai D4.

Terkait dengan infrastruktur, terdapat pula fasilitasi Penugasan Pemerintah pada kementerian/lembaga untuk membangun infrastruktur dalam kawasan industri, termasuk penyediaan energi (gas dan listrik) dengan kapasitas memadai dan harga yang kompetitif. “Walaupun tentu saja dalam pelaksanaannya, pemerintah akan tetap selektif dalam penentuan kriteria proyek serta penerima manfaatnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. **mi**

KONTRIBUSI EKSPOR DOMINAN, INDUSTRI MANUFAKTUR CAPAI SURPLUS

Industri pengolahan nonmigas masih memberikan peranan yang penting terhadap capaian nilai ekspor nasional. Sepanjang Januari-Februari 2023, kinerja ekspor dari sektor manufaktur menembus USD31,17 miliar atau berkontribusi sebesar 71,30 %.

"Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi yang dominan pada kinerja ekspor nasional. Kami terus memacu para pelaku industri untuk semakin memperluas pasar ekspornya, termasuk ke pasar non tradisional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Menperin menegaskan, pemerintah sedang melakukan optimalisasi ekspor ke pasar India dan ASEAN. Hal ini merupakan strategi kompensasi penurunan ekspor akibat perlambatan ekonomi global tahun 2023. "Pemerintah terus berupaya menjaga iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk untuk mendukung positif terhadap upaya peningkatan kinerja sektor manufaktur," ungkapnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), selama dua bulan awal tahun ini, neraca perdagangan industri pengolahan nonmigas mengalami surplus sebesar USD4,66 miliar. Adapun surplus terbesar disumbang oleh industri makanan, industri logam dasar, dan industri pakaian jadi. Selanjutnya, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri kertas dan barang dari kertas.

"Sementara itu, dari hasil capaian surplus tersebut, negara tujuan utama ekspornya meliputi Amerika Serikat, Filipina, India, Belanda, Singapura, Swiss, dan Malaysia," sebut Agus. Pemerintah juga terus mendorong berbagai perjanjian perdagangan internasional, yang saat ini terdapat 18 perjanjian perdagangan internasional dalam proses perundingan (*on-going*), 34 perjanjian telah diimplementasikan (*concluded/implemented*), dan 17 perjanjian yang tengah diajukan (*being proposed/explored*).

Menperin menambahkan, guna mendukung peningkatan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah juga melakukan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk membangun industri bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi. "Hilirisasi ini akan terus dilanjutkan,



tidak hanya berhenti di komoditas nikel saja, namun juga akan dilakukan terhadap bijih timah, tembaga dan bauksit," ujarnya.

Agus pun menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pentingnya hilirisasi industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. "Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika negara-negara lain telah memiliki ketergantungan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh negara maju tersebut," imbuhnya.

Bahkan, Indonesia memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi negara maju. Salah satunya melalui ekosistem industri kendaraan listrik dimana semua komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik ada di Indonesia.

"Misalnya, pengembangan baterai mobil listrik nantinya akan menjadi ekosistem besar, kita harus optimis bisa menjadi produsen mobil listrik. Karena kita memiliki nikel, kemudian

ada tembaga dan bauksit, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia," tutur Menperin.

Selain itu, melalui hilirisasi industri tersebut, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, Indonesia harus segera meninggalkan ekspor bahan mentah. Terbukti bahwa negara mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi industri. Nikel contohnya, nilai perdagangannya mengalami peningkatan dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun setelah kebijakan larangan ekspor mentah diberlakukan oleh pemerintah.

"Namun demikian, Indonesia bukan negara tertutup meski telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Indonesia terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri," paparnya. **mi**

TEKNOLOGI CANGGIH DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA

Industri alat kesehatan nasional merupakan salah satu sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0 yang sedang bertransformasi melalui ekonomi, inovasi dan teknologi. Industri alat kesehatan nasional juga menjadi fokus pengembangan industri nasional karena sektor ini yang paling banyak dibutuhkan sepanjang menghadapi pandemi Covid-19.

Guna menunjukkan kemampuan industri nasional dalam mengembangkan teknologi digital, sejumlah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan turut serta dalam Pameran Hannover Messe 2023: Infinite Journey yang berlangsung pada 17-21 April 2023 di Pusat Pameran Hannover, Niedersachsen, Jerman.

Pada pembukaan pameran Hannover Messe (HM) 2023, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyebutkan, tema Making Indonesia 4.0 sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. "Saat ini Indonesia menjalankan dua strategi besar, yaitu hilirisasi industri serta ekonomi hijau", tutur Presiden Joko Widodo.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, bahwa penerapan industri 4.0 pada sektor industri manufaktur terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya dapat mengakselerasi daya saing industri serta berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perhelatan teknologi industri tingkat internasional tersebut, TSM Technologies dengan bangga memperkenalkan salah satu produk andalannya, Bexa. TSM Technologies, perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia, dengan bangga mendesain dan memproduksi Bexa, suatu perangkat revolusioner untuk deteksi dini kanker payudara. Ini adalah pertama kalinya suatu perangkat medis elektronik didesain dan diproduksi di Indonesia.

Kanker payudara adalah kanker paling umum yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia, dengan jumlah sebanyak sekitar 2,3 juta kasus yang terdiagnosis setiap tahunnya. Deteksi dini sangat krusial untuk mempercepat proses pengobatan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih banyak perempuan di negara berkembang yang tidak mempunyai akses ke fasilitas pemeriksaan yang memadai.

Bexa adalah perangkat yang bersifat non-invasif, non-radiasi, sangat akurat, berbiaya rendah, dan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dirancang untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Perangkat ini mudah digunakan dan dapat dioperasikan oleh tenaga kesehatan profesional dengan pelatihan minimal. Teknologi inovatif Bexa memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendeteksi perubahan halus pada jaringan payudara, sehingga mampu memberikan hasil diagnosis lebih dini serta lebih akurat.

"Kami sangat bangga dapat merancang dan menjadi produsen Bexa yang dapat memberikan solusi yang terjangkau dan efektif untuk deteksi dini kanker payudara di Indonesia dan di seluruh dunia," ujar Founder dan CTO TSM Technologies, Sam Ali.

Menurutnya, dengan merancang dan memproduksi alat ini secara lokal, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada perekonomian Indonesia, tetapi juga turut menjamin



bahwa para perempuan dapat memperoleh akses ke fasilitas perawatan yang terbaik.

Bexa telah melalui pengujian serta uji klinis yang ekstensif, dan telah mendemonstrasikan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini memiliki sensitivitas 90%, sehingga dapat dengan sangat efektif mendeteksi gumpalan yang dapat menyebabkan kanker payudara pada stadium awal, sehingga mampu memberikan peluang yang terbaik bagi pasien untuk memperoleh pengobatan dan menjalani proses pemulihan secara sukses.

Dengan FDA Clearance, Bexa siap berkontribusi secara signifikan dalam memerangi kanker payudara dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan bagi para perempuan di seluruh dunia. "Kami percaya, Bexa memiliki potensi untuk merevolusi proses pendeteksian kanker payudara di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya," tutur Yovita Bellina, CEO TSM Technologies.

Selain itu, sifatnya yang non-invasif dan tanpa radiasi, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi para perempuan yang masih menyimpan keraguan terhadap prosedur mamografi tradisional. "TSM Technologies berkomitmen dalam meningkatkan kualitas perawatan kesehatan melalui inovasi dan teknologi, serta dengan antusiasme tinggi akan terus memproduksi dan memasarkan Bexa di Indonesia," ujar Yovita. [mi](#)

DONGKRAK EKSPOR, ASTRA PAMERKAN PRODUK 4.0 DI JERMAN

Sebagai official partner country Hannover Messe 2023, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menampilkan kekuatan teknologi digital yang dimiliki sektor-sektor industri nasional sekaligus menjadi momentum untuk menjalin kerja sama serta peluang mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

48

“Kami berharap partisipasi Astra dalam Hannover Messe tahun ini dapat mempromosikan berbagai produk yang menerapkan teknologi industri 4.0, sebagai upaya percepatan implementasi yang dapat meningkatkan nilai ekspor dalam negeri,” ujar *Chief of Corporate Affairs Astra*, Riza Deliansyah.

PT Astra International Tbk (Astra) berkomitmen untuk mendukung keikutsertaan Indonesia dalam ajang pameran teknologi industri dunia Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman pada 17-21 April 2023. Tema yang diangkat pada Hannover Messe 2023 adalah “*Infinite Journey*”.

Adapun anak perusahaan Astra yang bergerak di industri komponen otomotif dan non otomotif, PT Astra Otoparts Tbk kembali berpartisipasi dalam Hannover Messe dengan memamerkan produk-produk 4.0 yang diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekspor namun juga dapat menarik penanaman modal asing atau *foreign investment* dengan menunjukkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas manufaktur Astra Otoparts.

Sebagai pameran teknologi terbesar, menurut Riza, keikutsertaan



Sumber Foto: Deutsche Messe

Astra Otoparts dalam Hannover Messe 2023 ini diharapkan dapat membawa dampak positif melalui pengenalan produk-produk baik domestik maupun internasional. “Berbagai produk yang sudah terbukti mampu bersaing dihadirkan kembali baik secara fisik maupun digital,” ujarnya.

Selain itu, beberapa produk teknologi juga dihadirkan sebagai pendukung proses manufaktur untuk menghasilkan produk-produk kompetitif di antaranya *Automation System*, *Manufacturing Execution System*, dan beberapa produk digital lainnya.

Selain menampilkan produknya pada booth Astra Otoparts yang bertema “*Journey to Embrace the Future*” di Pavillion Indonesia, Astra Otoparts

juga menunjukkan kapabilitas proses manufaktur yang sedang bertransformasi menuju Industri 4.0, di antaranya *Integrated Automation System* dengan *real-time monitoring control* menggunakan platform SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), *Realtime Achievement* menggunakan *Light MES (Manufacturing Execution System)* dan aplikasi digital lain yang sudah digunakan di area produksi atau shopfloor anak perusahaan.

Astra Otoparts juga menampilkan *future product* yang baru saja diluncurkan maupun yang sedang dalam proses riset dan pengembangan, di antaranya Astra Otopower, CNC Powerlathe dan beberapa alat kesehatan.

Hadir pula anak perusahaan yang memproduksi sistem pengereman kendaraan bermotor yaitu PT Akebono



Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier meninjau stan Astra pada Hannover Messe di Jerman, 17-21 April 2023.

Brake Astra Indonesia (AAIJ) yang menghadirkan perjalanan implementasi industri 4.0. Saat ini, AAIJ merupakan perusahaan *National Lighthouse* yang dijadikan tolak ukur dalam teknologi dan strategi implementasi dari Industri 4.0 di bidang manufaktur.

Direktur PT AAIJ, Daniel Suryananta, turut berharap keikutsertaan perusahaannya sebagai peserta di Paviliun Indonesia dapat membantu memperkenalkan produknya yang bergerak di bidang industri komponen kendaraan. Tidak hanya itu, ia juga ingin menunjukkan bahwa ekosistem industri di Indonesia sudah terbentuk dengan baik.

"Indonesia bukan hanya lokasi pabrik kami, tapi ada orang-orang hebat yang bekerja dan berkarya untuk menciptakan

sesuatu yang sangat spektakuler untuk mengikuti tren teknologi yang terjadi saat ini," ujar Daniel.

Melalui Hannover Messe 2023, Daniel juga menggunakan kesempatan tersebut untuk melihat dan mempelajari perkembangan teknologi industri terbaru dari sejumlah negara peserta lainnya. "Sehingga apa yang bisa digunakan, teknologi yang efektif bisa kami bawa ke Indonesia untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kami," imbuhnya.

Dalam Hannover Messe 2023 ini, selain menunjukkan produk unggulan dan terbaru, AAIJ juga menunjukkan beberapa implementasi Industri 4.0 yang sudah dilakukan, di antaranya *Production Dashboard*, implementasi

penggunaan drone sebagai material *handling solution*, implementasi *lean manufacturing* yang terintegrasi secara digital dan implementasi penggunaan *collaborative robot*. Pada implementasi *collaborative robot*, AAIJ bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai bentuk kolaborasi di dalam ekosistem Industri 4.0.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier menyatakan, Hannover Messe 2023 menjadi ajang penting untuk menampilkan kemajuan transformasi digital di Indonesia, termasuk dari sektor industri otomotif. Pameran teknologi industri terbesar di dunia tersebut sekaligus menunjukkan bahwa posisi Indonesia telah diakui sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global.

"Penerapan industri 4.0 pada sektor industri manufaktur terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya dapat mengakselerasi daya saing industri serta berujung pada mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dirjen ILMATE saat mengunjungi booth industri komponen otomotif yang tampil di Hannover Messe 2023, Jerman. [mi](#)

RI GAET INVESTOR GLOBAL DI AJANG HANNOVER MESSE 2023

Indonesia berupaya merebut peluang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan Hannover Messe (HM) 2023. Hal ini merupakan momentum penting bagi Indonesia karena sebagai negara mitra resmi (Official Partner Country) pada gelaran pameran teknologi industri terbesar di dunia tersebut.

50

Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang kembali dipercaya untuk ketiga kalinya sebagai *Official Partner Country* pada pameran HM 2023. Ajang tingkat internasional ini berlangsung pada 17-21 April 2023 di Hannover Fairgrounds, Jerman.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Dirjen KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto menyampaikan, HM 2023 memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Jerman dan negara-negara mitra lainnya. Tidak hanya terbatas membidik kerja sama di sektor perdagangan, investasi dan industri saja, tetapi kerja sama juga akan menyentuh pada dimensi pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).

"Untuk keikutsertaan kita pada ajang HM 2023, terdapat sejumlah perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani. Rencananya akan ada 13 potensi kerja sama yang siap dijalin," ujar Eko. Adapun ke-13 potensi kerja sama dimaksud antara lain mencakup bidang digitalisasi, pengembangan dan pembangunan industri penyortiran pangan berbasis sensor dan kecerdasan buatan, teknologi pengolahan limbah, energi



Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri), Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga kiri), dan Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto (kanan) meninjau konsep Ibu Kota Negara (IKN) dalam Paviliun Indonesia, pada Hannover Messe 2023, di Jerman, 17-21 April.

panel surya, serta investasi di bidang alat kesehatan.

Dirjen KPAII mengemukakan, keikutsertaan Indonesia di HM 2023 perlu dimanfaatkan untuk mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. "Apalagi, dengan kembali menjadi *Official Partner Country* pada HM 2023, menunjukkan bahwa posisi Indonesia telah diakui sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global," ungkapnya.

Dalam HM 2023, Indonesia menampilkan lebih dari 157 *co-exhibitor* yang terdiri dari pelaku usaha industri termasuk *startup* industri, asosiasi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, lembaga pendidikan dan Ibu Kota Negara (IKN) dalam Paviliun Indonesia, bersama dengan pelaksanaan berbagai *business summit* dan konferensi.

Paviliun Indonesia menghadirkan enam tema utama konferensi yang dilaksanakan pada 18-20 April 2023.

Keenam tema tersebut meliputi '*Strengthening Manufacturing Ecosystem by Accelerating Industry 4.0*'; '*Investing in The New National Capital City*'; '*Investing in The Manufacturing Sector*'; '*Electric Vehicle Ecosystem*'; dan '*Sustainability and Carbon Neutrality*'; serta '*Investing Human Capital for Industrial Competitiveness*'. Rangkaian konferensi ini menghadirkan para narasumber dari kalangan industri serta pejabat pemerintah RI.

Eko optimistis, perhelatan HM 2023 dapat dihadiri lebih banyak pengunjung dan potensial *buyers* jika dibandingkan dengan HM 2021 yang dilakukan secara digital karena dampak pandemi Covid-19. HM 2021 mampu menggaet 90.000 peserta terdaftar dan sukses menarik perhatian lebih dari 3,5 juta impresi pada laman situs, serta 4,5 juta jangkauan sosial media.

"Sebagai *official partner country* pada HM 2021, Indonesia mendapatkan detail informasi untuk 1.000 pengunjung yang sebagian besar berasal dari Jerman (37%),



Sumber Foto: Deutsche Messe

Indonesia (27%), Korea Selatan (4%), Jepang (3%), dan sisanya berasal diantaranya dari China, USA, Turki, dan India," sebutnya.

Kehadiran Indonesia pada HM 2023 ini mengusung *tagline* "Infinite Journey" yang bertujuan untuk memperkenalkan kekuatan teknologi, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung ekonomi sirkular. "Partisipasi Indonesia kali ini juga akan membawa peluang besar dalam membangun *national branding* sekaligus menunjukkan perkembangan industri nasional dalam menerapkan teknologi industri 4.0," tegas Eko.

PERLUASAN KERJA SAMA

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebutkan, ada lebih dari tiga perusahaan asal Eropa, mayoritas perusahaan sektor otomotif, yang tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Hal ini diketahui setelah partisipasi Indonesia sebagai *Official Partner Country* di Hannover Messe 2021 lalu.

"Mereka tertarik dengan Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi



Sumber Foto: Deutsche Messe

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Dirjen KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto memberikan keterangan pers kepada para wartawan pada ajang Hannover Messe 2023, di Jerman, 17-21 April 2023.



Sumber Foto: Deutsche Messe

Indonesia yang tetap bagus, sumber daya alam, kebijakan hilirisasi sehingga upaya untuk berkolaborasi dengan Indonesia sangat kental. Sudah ada lebih dari tiga perusahaan Eropa yang sudah mendekati kita untuk berkolaborasi memanfaatkan teknologi mereka dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki," paparnya.

Sementara itu, pemerintah negara bagian Niedersachsen, atau Lower Saxony, buka peluang untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia, di antaranya perdagangan, pendidikan, dan sosial budaya. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Negara Bagian Niedersachsen, Stephan Weil, saat menerima kunjungan Konjen RI Hamburg, Ardian Wicaksono di Hannover (7/2).

Negara bagian Niedersachsen merupakan satu dari 16 negara bagian di Jerman dengan luas wilayah terbesar kedua (47.000 km² atau seluas Provinsi Jawa Timur) dengan penduduk keempat terbanyak sejumlah 8 juta jiwa. Niedersachsen dikenal dengan obyek wisata pegunungan dan laut, pusat industri otomotif, serta industri pertanian dan peternakan.

PM Stephan Weil menyampaikan dukungannya bagi kelancaran pelaksanaan Indonesia sebagai *Official Partner Country* HM 2023. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kerja sama yang sudah berjalan sangat baik antara negara bagian Niedersachsen dan Indonesia.

Pada kesempatan itu, Konjen RI Hamburg, Ardian Wicaksono menekankan pentingnya momentum Indonesia sebagai *Partner Country* tahun ini, khususnya untuk menunjukkan kemajuan industri 4.0, iklim investasi yang menarik di Indonesia, serta posisi Indonesia sebagai "*manufacturing hub*" di kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik. "Terlebih, saat ini, Indonesia memiliki prioritas pada ekonomi hijau, hilirisasi industri dan ekonomi digital," ujarnya.

PM Stephan Weil dan Konjen RI Hamburg sepakat memperluas kerja sama, seperti kerja sama maritim dan kerja sama antar pelabuhan yang merupakan peluang kerja sama ke depan mengingat letak Niedersachsen yang berbatasan dengan Laut Utara dan memiliki pelabuhan dagang utama di Willemshaven.

PM Stephan Weil juga menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sebagaimana dijelaskan Konjen RI. PM Stephan Weil juga menyampaikan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja di Indonesia pada awal 2019 bersama delegasi pebisnis dan pimpinan perguruan tinggi. **mi**

GANDENG KOREA DAN AUSTRALIA, GEMBLENG SDM KOMPETEN

Indonesia dan Korea Selatan kembali melakukan kerja sama untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor industri. Kolaborasi kedua negara telah memiliki sejarah panjang, yang pada tahun ini memasuki perjalanan 50 tahun.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Ulsan College dan Kocham Indonesia untuk mendorong kompetensi SDM industri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan mengatakan, dalam MoU tersebut, di antaranya telah disepakati kerja sama pelatihan antara Ulsan College dan Kocham bersama Balai Diklat Industri Kemenperin dan PIDI 4.0.

"Kerja sama pendidikan antara Ulsan College dan Politeknik Kemenperin, meliputi sertifikasi kompetensi, program pendidikan untuk ASN Kemenperin, program akademik jangka pendek khusus atau program budaya, hingga penelitian dan publikasi bersama," jelasnya.

Kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan tenaga kerja, pertukaran informasi dan materi yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kunjungan *benchmarking* dan pertukaran tenaga ahli, modul pembelajaran, kurikulum, teknologi, dan tenaga teknis terkait transformasi industri 4.0.

"Penandatanganan MoU ini adalah langkah awal yang tentunya perlu ditindaklanjuti dengan rencana teknis yang disepakati oleh tim teknis kedua pihak agar terlaksana," lanjut Arus. Kemenperin sendiri menaungi 11 Politeknik, 2 Akademi Komunitas, 9 Sekolah Menengah Kejuruan, serta 7 Balai Diklat Industri yang setiap tahun menghasilkan ribuan SDM kompeten dan siap kerja.

"Kami harapkan dari MoU ini akan dilahirkan banyak kesempatan penyerapan tenaga kerja baik di Indonesia dan Korea Selatan serta peningkatan keahlian teknologi dan manajemen Indonesia dari

benchmarking Korea Selatan," kata Arus.

Staf Ahli Menteri Bidang Klim Usaha dan Investasi Kemenperin, Andi Rizaldi, mengapresiasi kerja sama tersebut. "MoU Perkembangan Eco-Industrial Park (EIP) Model Korea di Indonesia dapat mempercepat transformasi Industrial Estates di Indonesia menuju Eco-Industrial Park," ucap Andi.

Sebelumnya, dengan Kemenperin, kerja sama Korea Selatan dan Indonesia berupa kerja sama strategis di bidang pengembangan pusat teknologi alat-alat permesinan di Bandung, Jawa Barat dengan Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT), aktivitas kerja sama terkait industri 4.0 dengan NRC, pembangunan *smart factory* dan *test bed* di PIDI 4.0 dengan KITECH, ILJOO Gns dan Gachon University.

"Dalam lingkup berbagai kerja sama tersebut, telah ada beberapa kerja sama yang sedang berjalan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin di antaranya kerja sama terkait pengembangan pusat ekosistem startup di PIDI 4.0 yang didukung oleh STEPI serta pengenalan ICT *practical enterprise* di Indonesia untuk pendidikan vokasi yang didukung KRIVET, keduanya merupakan afiliasi lembaga riset NRC," jelas Arus.

MEMBANGUN EKOSISTEM TVET (TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING)

Di waktu yang berbeda, BPSDMI Kemenperin juga menjalin kerja sama dengan Prospera, Katalis dan Pemerintah Australia untuk menyelenggarakan *Industrial Vocational Week 2022 Side-event: Matching skills with future of work.*



"Membangun ekosistem TVET yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri tidaklah mudah. Oleh karena itu, meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak sangatlah penting," imbuh Arus.

Tim Stapleton, *Minister-Counselor* (Economic, Infrastructure and Investment) di Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengemukakan, melalui program Prospera dan Katalis, Pemerintah Australia mendukung upaya Indonesia untuk menyesuaikan keterampilan dengan pekerjaan di masa depan.

Sebanyak 200 peserta mengikuti seminar tersebut, baik secara daring




maupun luring. Para peserta antara lain berasal dari satuan pendidikan di lingkungan Kemenerin, mitra industri, dan perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), *Asian Development Bank*, *VAPRO International Indonesia*, *Program Reformasi Sistem TVET-GIZ*, *ILO*, *TVET System Reform Program-GIZ*, *ILO*, *Swiss Skills for Competitiveness Program (S4C)*, *ADB*, *UNESCO-UNEVOC*, dan *ASEAN Secretariat*.

“Pemerintah terus berupaya untuk merevitalisasi semua komponen sektor vokasi dan memastikannya

berorientasi pada permintaan. Ini akan dilakukan melalui sistem informasi pasar tenaga kerja, *rebranding* lembaga TVET, reformasi institusi dan fasilitas TVET, mendesain ulang program TVET, merevitalisasi infrastruktur, reorientasi sumber daya manusia, serta meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan,” tutur Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto.

Sementara itu, Katalis menempatkan penyedia keterampilan Australia ke platform digital Indonesia dan mengembangkan *platform*

Indonesia-Australia Exchange. Pencari kerja Indonesia dapat melakukan *re-skill* atau *up-skill* dengan mengakses pelatihan *online* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kerangka waktunya.

“Katalis berfokus untuk mendukung pekerja Indonesia untuk mendapatkan keterampilan yang mereka perlukan agar dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dengan membawa penyedia TVET Australia untuk mengisi kesenjangan konten dan penyampaian pelatihan,” ujar *Lead Advisers (Skills)* Katalis, Clarice Campbell. 

KOLABORASI CETAK SDM INOVATIF DUKUNG IKM OTOMOTIF

Saat ini, tantangan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia antara lain adalah upaya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, meliputi pemerintah, masyarakat, komunitas, pengusaha maupun perguruan tinggi untuk mencetak SDM IKM yang produktif dan bersaya saing.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian menggandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), yayasan di bawah Grup Astra, untuk melakukan pembinaan pelaku IKM di Tegal, Jawa Tengah. Komitmen ini direalisasikan melalui penandatanganan MoU antara YDBA dengan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kemenperin, yaitu Politeknik STMI Jakarta.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan menyampaikan, kolaborasi ini berupa penyelenggaraan pendidikan regular atau non-regular (Setara D1), penempatan mahasiswa prakerin dan dosen industri, serta pengembangan kurikulum.

"Ada pula kerjasama penelitian berupa penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa sesuai

dengan persoalan yang dihadapi oleh industri saat ini," ungkap Arus. Selain itu, Kemenperin menawarkan penguatan atau peningkatan kinerja sektor industri, terutama dalam mendukung pelaku IKM di bidang otomotif.

Apalagi industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena menjadi kontributor yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi



Projek ini memang baru pilot program kolaborasi, YDBA yang melibatkan 4 UMKM Manufaktur atau IKM yang berada di wilayah Tegal, Jawa Tengah.

Jakarta,” kata Arus. Oleh karenanya, peran asosiasi dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi sangat diperlukan dalam keberhasilan membangun SDM industri yang unggul.

Kepala BPSDMI berharap, sinergi ini dapat dikembangkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan BPSDMI, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Balai Diklat Industri (BDI). Apalagi, YDBA memiliki sekitar 12 ribu industri dan UMKM binaan yang sebagian UMKM bergerak pada sektor otomotif.

Sebagai langkah awal, kegiatan kerja sama ini dimulai dengan bentuk Program Pengabdian Masyarakat pada lingkungan industri kecil di Tegal. Beberapa dosen Politeknik STMI Jakarta ditugaskan melakukan observasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan peningkatan daya saing UMKM otomotif. Kegiatan ini akan melibatkan lima program studi, yaitu Teknik Industri Otomotif, Teknik Kimia Polimer, Sistem Informasi Industri Otomotif, Teknologi Rekayasa Otomotif dan Administrasi Bisnis Otomotif.

PILOT PROJECT

Menurut Ketua Pengurus YDBA, Sigit P. Kumala, kolaborasi bersama perguruan tinggi yang memiliki SDM baik pengajar maupun mahasiswa dengan kompetensi yang *up to date* dalam industri otomotif ini dilakukan untuk mendukung UMKM/IKM agar tumbuh, mandiri dan berkelanjutan. Termasuk dengan Kemenperin dalam melakukan pembinaan UMKM Manufaktur di wilayah Klaten, Solo, Tegal maupun Tarikolot, Bogor.

Projek ini memang baru pilot program kolaborasi, YDBA yang melibatkan 4 UMKM Manufaktur atau IKM yang berada di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Keempat UMKM yang akan terlibat dalam pembinaan ini, antara lain PT Sinergi Mandiri Teknikatama dan PT Cipta Mandiri Tegal yang memproduksi komponen Alat Berat, PT Mitra Karya Tegal yang memproduksi komponen Otomotif dan UD Setia Kawan yang memproduksi komponen perkapalan.

Sigit berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kompetensi UMKM dan mendukung kemandirian UMKM.


Sigit juga berharap kolaborasi ini dapat menjadi pilot project pembinaan UMKM yang melibatkan perguruan tinggi. Sehingga ke depan akan semakin banyak lagi perguruan tinggi di Indonesia yang dapat mendukung peningkatan kompetensi UMKM dan mengantarkan UMKM Indonesia menuju kemandiriannya.

Hingga Desember 2022, YDBA telah memberikan pembinaan kepada 12.313 UMKM di bidang Manufaktur, Bengkel, Kerajinan & Kuliner serta Pertanian. YDBA secara tidak langsung juga telah menciptakan 72.465 lapangan pekerjaan melalui UMKM yang difasilitasi.

“Kami melakukan asesmen, terpilih empat IKM yang keempatnya saat ini berada di level pra mandiri. Dengan kolaborasi bersama Politeknik STMI Jakarta yang nantinya akan fokus pada pembinaan 4 UMKM oleh dosen STMI dalam pilar *reject ratio* atau penerapan SOP maupun *productivity* diharapkan dapat mendukung UMKM menuju kemandiriannya,” ujar Sekretaris Pengurus YDBA, Ida R. M. Sigalingging. Setiap IKM akan mendapat dukungan pendampingan 1 dosen dan 2 mahasiswa dalam program ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita berpesan agar YDBA dapat memfasilitasi program ini dengan melakukan seleksi atas IKM binaannya yang memenuhi syarat untuk berkolaborasi dengan pihak Politeknik STMI Jakarta. “Saat ini IKM di Indonesia masih di angka 4,2 juta, masih jauh di bawah negara lain di Asia,” sebutnya.

Diharapkan, melalui program kerja sama ini, akan dapat mendukung menyiapkan SDM yang kompeten untuk dapat terus berinovasi dalam menjawab tantangan-tantangan dalam perkembangan industri nasional. Contohnya STMI merintis kerjasama sinergis dengan YDBA sesuai dengan peran masing-masing.

“Peran STMI bertumpu pada permasalahan teknis dan penguatan SDM Industri. Kerja sama ini akan memberikan manfaat yang produktif bagi industri / UMKM,” tandas Direktur Politeknik STMI Jakarta, Mustofa. 

nasional. Kekuatan industri otomotif nasional, khususnya beroda empat atau lebih, saat ini didukung oleh 23 perusahaan dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun.

Di samping itu, penyerapan tenaga kerja langsung di industri otomotif nasional telah mencapai 38 ribu orang, serta penyerapan lebih dari 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut termasuk di sektor industri kecil dan menengah (IKM) bidang komponen.

“Perkembangan industri otomotif nasional tak lepas dari peran SDM-nya. Untuk meningkatkan kualitas calon SDM otomotif, kami menyelenggarakan pendidikan vokasi di Politeknik STMI

HANNOVER MESSE 2023 RAUP INVESTASI DAN KOLABORASI INDUSTRI

Ajang Hannover Messe 2023 membawa dampak positif terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Melalui pameran yang diselenggarakan pada 17-21 April 2023 tersebut, pemerintah menargetkan investasi masuk sebesar Rp30 triliun.



Sumber Foto: Deutsche Messe

56

Sebagai *Official Partner Country* Hannover Messe 2023, Indonesia siap untuk unjuk gigi dalam bidang perekonomian, manufaktur, kolaborasi teknologi serta kerja sama dalam bidang investasi. Hannover Messe merupakan salah satu pameran industri dan perdagangan terbesar di dunia yang digelar tiap tahun di kota Hannover, Jerman

Sebanyak 157 co-exhibitors menempati area lahan pameran seluas 3,000 meter persegi (m²) terdiri dari pemerintahan, lembaga pendidikan dan riset, swasta dan BUMN. Partisipasi Indonesia pada pameran kali ini juga memperkuat hubungan bilateral dengan Jerman dan Negara-negara Eropa

"Melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah resmi disepakati, akan ada Rp30 triliun investasi yang masuk ke Indonesia. Tentunya kami berharap melalui Hannover Messe akan ada lebih banyak lagi investasi yang masuk, antara lain pada bidang manufaktur, energi utamanya *renewable energy*, serta kawasan industri atau *special economic zone*," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menteri Airlangga juga menambahkan bahwa ada beberapa inovasi teknologi baru yang akan dipamerkan, antara lain adalah inovasi dalam bidang *medical device*, yaitu *Neo-natal respiratory system*, inovasi komponen otomotif, serta inovasi dalam bidang pertanian yaitu instrumentasi maintenance pupuk. Nantinya akan ada inovasi-inovasi baru pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya pada integrasi infrastruktur dan utilitas.

"Dengan durasi proyek yang panjang, diharapkan kita bisa mempertunjukkan konsep, maupun target-target investasi untuk IKN sebagai *The New Smart City* di Indonesia," katanya. Pemerintah sendiri memang tengah mempromosikan IKN di banyak event internasional untuk menggaet banyak investor.

Pada ajang pameran teknologi industri terbesar di dunia tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan kerja sama yang akan ditandatangani oleh pemerintah dan pelaku bisnis. "Perjanjian kerja sama ini merupakan capaian dari salah satu sasaran partisipasi Indonesia sebagai *Partner Country* Hannover Messe 2023," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Hannover, Jerman.

Menperin menyebutkan, terdapat 27 perjanjian kerja sama yang ditandatangani pihak Indonesia pada perhelatan Hannover Messe 2023, meliputi satu kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman atau *Government to Government* (G to G).

Selanjutnya, empat kesepakatan secara *Government to Business* (G to B) atau pemerintah dengan pelaku bisnis, dan sebanyak 22 kesepakatan yang dilakukan secara *Business to Business* (B to B) atau kerja sama yang terjadi antar perusahaan. Total nilai komitmen kerja sama investasi tersebut lebih dari USD1,9 miliar.

"Adapun 75% dari peserta penandatanganan MoU itu berasal dari *co-exhibitor* Hannover Messe 2023, dan sisanya diluar *co-exhibitor*. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme *co-exhibitor* untuk menjalin kerja sama dengan mitra cukup tinggi," ungkapnya.



Agus menyampaikan, kesepakatan *G to G* yang ditandatangani adalah Pernyataan Kehendak Bersama (*Joint Statement Declaration of Intent/JDol*) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (*Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action/BMWK*) Jerman tentang Kerja Sama Ekonomi Bersama (*Joint Economic Cooperation*).

Kemudian, untuk lingkup kerja sama secara *G to B*, di antaranya meliputi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan dan transformasi industri 4.0, pengelolaan limbah menjadi energi, pengelolaan limbah dengan menggunakan sirkular ekonomi, serta kolaborasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sedangkan, area kerja sama yang dilakukan secara *B to B* antara lain terkait pengelolaan teknologi energi yang berkesinambungan, serta investasi tentang penggunaan energi solar, pengembangan semikonduktor, peralatan medis dan keamanan industri manufaktur.

Adapula kerja sama tentang pengelolaan limbah menjadi energi, pendirian pusat pabrik kimia dan molding, pendirian pusat pembelajaran, kerja sama dalam ekosistem pengisian ulang kendaraan listrik (*electric vehicle-EV*) dan informasi digital industri 4.0.

"Selain itu, pengembangan *Internet of Things (IoT)*, mesin *Computerized Numerical Control (CNC) milling* dan sistem pembelajaran tentang ventilator medis, solusi digital untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan servis secara digital, serta kerja sama pembuatan radar. Para pihaknya terdiri dari

berbagai macam perusahaan swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," sebut Agus.

Pada kesempatan tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyatakan komitmennya dalam upaya peningkatan investasi di Indonesia. Upaya ini diyakini akan mengakselerasi peningkatan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. "Penandatanganan kerja sama industri ini dapat membawa banyak perubahan dalam peningkatan industri di berbagai bidang dan juga membuka akses pasar industri yang lebih luas," ujarnya.

Hannover Messe 2023 dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekuatan teknologi industri nasional serta mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dipandang sebagai negara yang memiliki potensi kekuatan pasar dunia, namun juga memiliki arti dan peranan penting dalam kontribusinya menunjang perkembangan teknologi industri dan pendukungnya.

Indonesia menargetkan empat agenda utama pada keikutsertaannya dalam ajang Hannover Messe tahun ini. Pertama, untuk mengenalkan visi Indonesia pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Kedua, mempromosikan kerja sama industri. Ketiga, mempromosikan investasi dan ekspor. Terakhir, untuk meningkatkan hubungan kerja sama bilateral dengan Jerman dan memasuki jejaring rantai suplai global. **mi**

KERJA SAMA

Industri pengolahan susu yang menjadi bagian dari industri makanan dan minuman, merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan peta jalan Making Indonesia 4.0.

Bahkan, industri pengolahan susu masih memiliki prospek bisnis yang cukup cerah ke depannya, seiring dengan potensi meningkatnya konsumsi produk susu di tanah air. “Beberapa potensi lainnya adalah meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dan tumbuhnya kelas menengah, bertransformasinya gaya hidup masyarakat menjadi lebih sehat, dan juga meningkatnya permintaan produk bernutrisi tinggi selama pandemi Covid-19,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Guna meningkatkan produktivitas industri pengolahan susu di tanah air, menurut Putu, salah satu upaya yang perlu digenjut adalah penyediaan sapi perah yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) sebagai bahan baku. “Kami sedang berupaya keras memacu produktivitas SSDN guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu di dalam negeri. Hal ini sekaligus untuk mengurangi impor susu segar,” ujarnya.

Dirjen Industri Agro mengemukakan, pertengahan April lalu, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Belanda. Delegasi RI yang diwakili pihak Kemenperin, KBRI Brussel, dan KBRI Den Haag melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Alam, dan Kualitas Makanan (*Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/ LNV*), Organisasi Pertanian dan Hortikultura di Belanda (*Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland/ LTO*), perusahaan Friesland Campina NV., dan beberapa petani sapi perah binaan Friesland Campina di daerah Makinga dan Warder, Belanda.

“Tujuan kunker kami ke Belanda antara lain untuk peninjauan kerja sama dan investasi dalam hal penyediaan sapi perah. Selain itu, kami ingin mengetahui proses peternakan sapi perah secara modern dan berkelanjutan. Kami juga melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan susu Friesland Campina di Leeuwarden,” sebutnya.

Menurut Putu, hasil kunjungan

RI-BELANDA SIAP PACU INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri pengolahan susu di dalam negeri agar semakin berdaya saing global. Oleh karena itu perlu upaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam menopang kebutuhan proses produksinya.



tersebut mendapat tanggapan yang positif, baik dari LNV maupun LTO. “Belanda memiliki berbagai potensi yang dapat dijajaki lebih lanjut dengan berbagai pihak di Indonesia, khususnya dengan pihak swasta yang tertarik dengan investasi sapi perah ini,” imbuhnya.

Pada pertemuan dengan LNV, Dirjen Industri Agro menyampaikan bahwa kondisi industri pengolahan

susu di Indonesia saat ini mengalami kekurangan bahan baku susu segar sebesar 80%. Oleh karenanya, terdapat keinginan beberapa perusahaan besar pengolahan susu di Indonesia yang ingin membeli sapi perah asli dari Belanda (Holstein), dengan total sebanyak 8-16 ribu ekor.

“Kami menawarkan Indonesia sebagai ‘a new hope for Dutch cattle’, karena peternak sapi perah Belanda



Kunjungan investasi sapi perah di Belanda ini juga membuka peluang kerja sama pembibitan crossbreed sapi perah Belanda dengan bibit sapi perah lokal yang toleran suhu.

Dairy Farming Erwin Wunnekink mengatakan, tipikal peternak sapi perah di Belanda adalah pertanian skala keluarga, dengan jumlah sapi perah 200-500 ekor sehingga manajemen yang digunakan pun lebih sederhana, yaitu manajemen lahan, input, produksi, pengiriman ke *off taker*, dan pengolahan limbah.

“Dengan tipikal tersebut, peralatan/mesin otomatisasi menjadi salah satu alternatif solusi pengelolaan peternakan sapi perah skala ekonomis, seperti penggunaan *milking robot* merek LELY yang asli diproduksi oleh perusahaan Belanda,” ucapnya.

Kemudian, pada kesempatan yang sama, *Corporate Director Dairy Development* Friesland Campina NV, Jeroen Elfers menyampaikan status pengerjaan proyek pembangunan pabrik baru Frisian Flag Indonesia di Karawang seluas 25 hektare yang sudah hampir selesai, termasuk sumber bahan bakunya yang akan bekerjasama dengan PTPN dengan menggunakan susu lokal.

Dirjen Industri Agro Kemenperin menambahkan, terkait investasi di sektor industri pemerahan sapi dari Belanda ke Indonesia, pada prinsipnya para pengusaha Belanda terbuka atas kemungkinan investasi di Indonesia. “Kunjungan investasi sapi perah di Belanda ini juga membuka peluang kerja sama pembibitan *crossbreed* sapi perah Belanda dengan bibit sapi perah lokal yang toleran suhu,” pungkasnya. **mi**

dapat merelokasi sapi perahnya ke Indonesia maupun melakukan investasi di Indonesia,” ungkap Putu.

Pada kesempatan itu, *Director for International Agribusiness and Food Security* LNV, Ralf van de Beek menjelaskan, saat ini industri sapi perah di Belanda sedang berbenah untuk menghadapi perubahan iklim, khususnya terkait pengurangan tingkat nitrogen pada kotoran sapi,

kesehatan tanah dan air untuk pakannya, serta antisipasi tingginya curah hujan yang dapat memicu banjir. “Dengan prinsip *triple helix* (industri, pemerintah, dan universitas atau masyarakat), kami yakin dapat menyelesaikan tantangan yang ada untuk *sustainability* industri susu di Belanda,” tuturnya.

Sedangkan, saat pertemuan dengan LTO, *Chairman for Sector*



MENKO PMK APRESIASI POLITEKNIK FURNITUR KENDAL

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan “link and match” pendidikan vokasi dengan dunia industri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya di antaranya melalui penyesuaian kurikulum sekolah vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu yang telah terwujud adalah Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Polifurneka) Kendal, unit pendidikan vokasi industri milik Kementerian Perindustrian.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu berkunjung ke Polifurneka Kendal dan meninjau proses praktik kerja yang dilakukan mahasiswa, di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Bupati Kendal Dico M Ganinduto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Arus Gunawan, dan Direktur Polifurneka Kendal Tri Ernawati.

Muhadjir melihat proses praktik mahasiswa dalam mengolah kayu menjadi produk furnitur di workshop. Di antaranya melihat langsung operasionalisasi mesin canggih untuk pemahatan, beberapa mesin konstruksi, disain, sending, pengolahan laminasi, dan juga mesin *assembling*.

Kemudian, Menko PMK juga melihat berbagai hasil produk mebel yang telah

dihasilkan para mahasiswa. Ada yang membuat produk meja, sofa set, lemari, rak buku dan lain sebagainya. Karya yang dibuat para mahasiswa tersebut memiliki kualitas yang bagus nan ciamik.

Selaku ketua pengarah Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) Menko PMK menyatakan, apa yang dilakukan di Polifurneka telah sesuai dengan standar Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

“Yang perlu diintensifkan lagi adalah kerja sama dengan industri dan dunia usaha, terutama bisa menyiapkan lulusan ini agar bisa diserap di dunia kerja terutama di sektor furnitur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muhadjir juga berharap Polifurneka Kendal yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian itu bisa menghasilkan lebih banyak SDM industri yang kompeten, profesional, siap kerja di sektor furnitur, dan bisa bersaing hingga tingkat global.

Selain itu, menurutnya, para mahasiswa juga harus didorong untuk memiliki imajinasi dan kreasi mengikuti perkembangan zaman, serta harus siap untuk berwirausaha. “Mahasiswa Polifurneka harus memiliki karakter kreatif dan siap untuk menjadi wirausahawan di bidang ekonomi kreatif furnitur,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Kendal, Menko PMK juga berkunjung ke pabrik mainan edukasi anak-anak yang merupakan produk olahan kayu di Kawasan Industri Kendal, yakni PT. Master Kidz Indonesia. Pabrik ini merupakan salah satu yang telah bekerja sama dengan Polifurneka dalam pemagangan industri serta mengambil tenaga kerja lulusannya.


“Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi *Super Tax Deduction*. Kebijakan yang dimaksudkan sebagai *reward* bagi industri yang mendukung vokasi ini mestinya dibuat mudah sehingga menarik minat pelaku usaha mendukung vokasi” ungkapnya.

Muhadjir berharap, angkatan kerja Indonesia bisa sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, upaya pemerintah dengan Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi supaya ada sinergitas pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan pelatihan di bawah Kemnaker.

“Sehingga dengan demikian keterampilan keahlian yang dimiliki calon tenaga kerja kita sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Polifurneka Kendal merupakan satu-satunya Politeknik Negeri di bidang furnitur dan pengolahan kayu di Indonesia, yang berstandar global, dengan program studi DIII, di antaranya Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur, dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Polifurneka Kendal telah meluluskan 2 angkatan, yakni: angkatan 2018 telah meluluskan 87 orang dan diserap dunia industri 100 %, kemudian angkatan 2019 telah meluluskan 175 orang dan diserap dunia industri 92,5 %.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto menyampaikan, bahwa kerjasama Pemkab Kendal dengan dunia industri ini sangatlah penting karena dengan tumbuhnya industri di Kabupaten Kendal dapat memberikan *multiplier effect*, yaitu bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kendal, di tahun 2022 lebih dari 2 % diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

“Penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut karena adanya kerjasama tiga pihak antara Pemkab Kendal, Kementerian Perindustrian dan pihak pelaku usaha atau pelaku industri,” tutur Bupati Dico. Ia juga mengatakan, pada tahun 2023 ini akan mengejar terwujudnya revitalisasi BLK, agar bisa memberikan fleksibilitas BLK beradaptasi dengan industri yang akan tumbuh di Kabupaten Kendal, dengan harapan bisa memastikan lapangan kerja ini bisa kita penuhi bersama. 

PENINGKATAN KAPASITAS SDM INDUSTRI 4.0

Hannover Messe 2023 menjadi perhelatan yang penting bagi Indonesia karena berpotensi besar untuk menjalin kerja sama, termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia yang kompeten khususnya untuk menguasai teknologi industri 4.0.

Pameran bergengsi tingkat internasional yang diselenggarakan pada tanggal 17–21 April 2023 itu sebagai ajang untuk memperkenalkan kekuatan teknologi industri, khususnya era industri 4.0, serta mendorong keterhubungan dengan jejaring rantai suplai global.

Dengan menjadi *official partner country* di Hannover Messe 2023, Indonesia tidak hanya dipandang sebagai negara yang memiliki potensi kekuatan pasar dunia, namun juga memiliki arti dan peranan penting dalam kontribusinya menunjang perkembangan teknologi industri dan pendukungnya, termasuk penyediaan sumber daya manusia di era industri 4.0.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Masrokan menegaskan, Hannover Messe 2023 dapat mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Di samping itu, diharapkan juga industri yang berpartisipasi dapat memperluas dan menjalin kemitraan baru terkait implementasi industri 4.0.

“Potensi kerja sama yang dapat diraih pada Hannover Messe kali ini sangat besar untuk mendukung proses transformasi teknologi 4.0 di sektor industri, terutama dengan hadirnya Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0),” tuturnya.

Tahun ini, Kemenperin memfasilitasi keikutsertaan Indonesia dalam pameran Hannover Messe 2023 dengan menyiapkan Paviliun Indonesia di Hannover Messe Fairground seluas 3.000 meter persegi bagi lebih dari 150 co-exhibitor. “Salah satu kolaborasi yang dibidik adalah dalam hal dukungan terhadap proses transformasi teknologi industri 4.0 di sektor manufaktur dan menopang kebutuhan di PIDI 4.0,” ujarnya.

Masrokan menjelaskan, kerja sama yang dapat ditindaklanjuti meliputi pengembangan sumber daya manusia industri terkait transformasi digital melalui penyelenggaraan program-program peningkatan kapasitas. Selain itu, penyediaan *mock-up* atau *showcase* lini mesin dan peralatan multimedia senilai hingga 700.000 euro untuk ditempatkan di area pusat pameran PIDI 4.0 beserta program transfer teknologinya.

Berikutnya, kerja sama mengenai utilisasi *mock-up* lini mesin dan peralatan multimedia, pengembangan pendidikan, kurikulum pelatihan, dan program pelatihan serta penyelenggaraan program-program peningkatan kapasitas, termasuk kunjungan dan pertukaran materi pelajaran, tenaga ahli, modul pembelajaran, kurikulum, teknologi dan/atau personil teknis.

Dalam rangkaian agenda Hannover Messe 2023, BPSDMI Kemenperin dan Petrokimia Gresik telah menghasilkan kesepahaman tindak lanjut implementasi *Digital Learning System* untuk menunjang program pengembangan SDM industri di sektor Petrokimia.

Senior Vice President SDM Petrokimia Gresik, Nuril Huda menyampaikan bahwa pembangunan Digital Learning System yang selama ini telah dibangun secara internal telah meningkatkan tingkat efektivitas pengembangan kompetensi pegawai dan non pegawai di lingkungan Petrokimia Gresik. “Dengan sistem ini, diharapkan dapat memangkas waktu



Sumber Foto: Deutsche Messe

administrasi dan percepatan dalam penguasaan materi pembelajaran di Petrokimia Gresik,” tuturnya.

Nuril menegaskan kerja sama dengan BPSDMI yang selama ini telah dilakukan dapat diperkuat dengan adanya sebuah sistem yang akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan dan siswa unit pendidikan Kemenperin yang sebagian besar berbasis kimia untuk dapat memanfaatkan sistem ini untuk pembelajaran maupun peningkatan kapasitas.

Bahkan, di sela kunjungannya di Hannover Messe 2023, Kepala BPSDMI juga bertemu dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra dan Monako, Mohamad Oemar di Paris terkait kerja sama global pengembangan program pengembangan SDM industri.

“Kami siap memfasilitasi rintisan kerja sama pengembangan SDM industri global dengan BPSDMI melalui kegiatan yang salah satunya program vokasi,” tekan Oemar. Prancis merupakan mitra strategis Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional yang ditandai setidaknya ada 160 perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Masrokan, komitmen ini merupakan potensi kerja sama dalam meningkatkan investasi Prancis di Indonesia dengan penyediaan SDM industri bagi perusahaan Perancis yang ada Indonesia maupun kerja sama peningkatan kapasitas SDM industri melalui program magang siswa dan tenaga pengajar di Prancis.

Masrokan menambahkan, melalui unit pendidikan dan pelatihan vokasi milik BPSDMI Kemenperin yang berspesialisasi terkait sektor Industri, siap untuk bekerjasama secara global dalam menyediakan SDM industri bagi perusahaan Prancis di bidang otomotif, makanan dan minuman, pengolahan kulit, dan kimia.

“Unit pendidikan dan pelatihan vokasi Kemenperin memang dipersiapkan untuk menghasilkan SDM Industri yang kompeten dan siap kerja. Dan sekarang sudah mampu menjawab tantangan kebutuhan terkait keterampilan Industri 4.0,” imbuhnya. **mi**

JARVIS: JURUS KEMENPERIN JARING SDM KOMPETEN

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk industri terus meningkat seiring dengan peran sektor manufaktur yang menjadi penyokong utama PDB terbesar bagi negara. Bagaimana upaya Kementerian Perindustrian dalam menciptakan SDM industri kompeten?

Perlu diketahui, sektor industri manufaktur merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB dengan mencapai 16,48%. Selain itu, kontribusi pada penerimaan pajak juga terbesar (28,7%), serta sumbangsuhnya pada capaian nilai ekspor nasional pun mayoritas (70,67%).

Bahkan, sektor industri manufaktur mampu menarik investasi hingga Rp457,6 triliun atau 37,91% sehingga tercatat membuka peluang dan lapangan pekerjaan bagi 19,11 juta orang pada Agustus 2022. Hal ini yang membuat Kementerian Perindustrian proaktif mencetak dan mengembangkan SDM industri yang terampil sesuai kebutuhan di lapangan.

Guna meningkatkan kualitas SDM industri, Kemenperin kembali menyelenggarakan Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) untuk yang keempat kalinya. JARVIS merupakan platform hasil inovasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin yang diluncurkan untuk penyelenggaraan seleksi penerimaan siswa dan mahasiswa pada seluruh unit pendidikan di bawah binaan Kemenperin.

Platform tersebut terdiri dari tiga jalur pendaftaran, yaitu JARVIS Mandiri yang diadakan oleh unit pendidikan masing-masing, JARVIS Prestasi untuk seleksi bagi siswa berprestasi, dan JARVIS Bersama yang diadakan secara serentak oleh seluruh unit pendidikan milik Kemenperin.

Saat ini, Kemenperin memiliki unit pendidikan vokasi industri yang terdiri dari 9 SMK, 11 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas yang tersebar di 12 provinsi. "Unit pendidikan tersebut diminati oleh masyarakat, ditandai dengan 31.050 pendaftar pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 27.203 pendaftar," jelas Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhah.

Tahun ini, Kemenperin membuka JARVIS dengan kuota penyerapan 4.053 mahasiswa baru pada tingkat Politeknik dan Akademi Komunitas untuk lulusan



Foto: AK Manufaktur Bantaeng

SMA/SMK/MA/MAK. Kemudian, untuk JARVIS SMK, Kemenperin menyediakan daya tampung sebesar 2.399 siswa/siswi lulusan SMP sederajat yang ingin masuk ke SMK/SMK/SMK/MTI di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Rangkaian penerimaan JARVIS dilakukan secara online melalui situs jarvis.kemenperin.go.id. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 April 2023 dan berakhir pada 19 Mei 2023. Kurikulum di sekolah vokasi Kemenperin telah disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Kemenperin juga telah bermitra dengan 1.600 pelaku industri dan menyelenggarakan pendidikan sistem ganda yang telah terhubung dan sesuai (*link and match*) dengan industri. Kemitraan tersebut mencakup proses perekrutan, praktik kerja industri, hingga penempatan kerja.

Selain itu, pendidikan vokasi Kemenperin juga mendapat dukungan dari mitra luar negeri, seperti Swiss, Jerman, dan Singapura. "Dukungan dari mitra luar negeri juga menguatkan kualitas unit pendidikan Kemenperin dalam mencetak SDM industri unggul yang tidak hanya berkiprah di kancah nasional, tetapi juga siap berkompetisi di dunia global," ujar Masrokhah.

Seluruh unit pendidikan vokasi milik Kemenperin, telah menerapkan model pembelajaran berbasis dual sistem, yakni metode yang lebih mengedepankan praktik dibanding

teori, yakni dengan komposisi 70 % praktik dan 30 % teori.

Masrokhah menambahkan, untuk mempertahankan kinerja sektor industri, pemerintah memandang bahwa SDM merupakan subjek pembangunan ekonomi dan tidak terpisahkan dari proses produksi. "Melalui keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, para pekerja industri akan berkontribusi pada kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing perusahaan," jelasnya.

Menurutnya, perlu adanya peningkatan kualitas SDM industri melalui program pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengembangan keterampilan atau yang dikenal dengan program vokasi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

"Peran strategis yang bisa dilakukan melalui Pendidikan Vokasi adalah penyediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan kompeten, industri dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya," paparnya.

Selanjutnya, lulusan pendidikan vokasi dapat langsung bekerja artinya mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan inovasi dan teknologi. "Hal ini karena seluruh unit pendidikan vokasi industri Kemenperin telah menerapkan pendidikan yang berbasis kompetensi dan menjalin kerja sama dengan industri," ungkap Masrokhah. **mi**

GANDENG INDUSTRI, CETAK SDM KOMPETEN

Kolaborasi pemerintah dan pelaku industri perlu dijalankan untuk mencapai target yang diharapkan sesuai kebutuhan saat ini, seperti dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Sebab, SDM berperan penting dalam meningkatkan kinerja industri manufaktur yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.



Foto: SMTI Banda Aceh

Selama ini, industri manufaktur menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak. Pada tahun 2022, terjadi penambahan tenaga kerja sektor industri sebanyak 465 ribu orang atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penyediaan SDM yang kompeten merupakan bagian investasi pengembangan sektor industri. Oleh karena itu, upaya perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

Guna meningkatkan kualitas calon tenaga kerja industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 11 Politeknik, 2 Akademi Komunitas, dan 9 SMK yang dimiliki. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi ini gencar dilakukan dengan menggandeng sejumlah sektor industri.

“Seluruh unit pendidikan vokasi industri Kemenperin telah menerapkan pendidikan berbasis kompetensi yang bermitra dengan industri. Keberadaan industri merupakan mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi sehingga terlibat aktif mulai dari proses perekrutan, praktik kerja industri, hingga penempatan kerja,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhah.

Salah satu upaya yang telah direalisasikan BPSDMI Kemenperin dalam menjalin kerja sama dengan sektor industri tersebut adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara SMK-SMTI Banda Aceh dengan PT


Mitra Kaya Galvanize (PT MKG). PT MKG merupakan salah satu perusahaan Pencelupan Galvanize yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat yang juga masuk dalam keanggotaan Asosiasi Galvanize Indonesia.

Kerja sama tersebut sehubungan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui kerja sama dengan DU/DI (Dunia Usaha/Dunia Industri).

“Bentuk kerjasama yang sedang berjalan adalah magang dalam negeri untuk alumni dan juga penempatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa untuk kelas XII selama 6 bulan,” tutur Kepala Sekolah SMK-SMTI Banda Aceh, Junaidi.

Prakerin tersebut diikuti siswa SMK-SMTI Banda Aceh Konsentrasi Keahlian Teknik Kimia Industri (TKI) dan Konsentrasi Keahlian Analisis Pengujian Laboratorium (APL). Kegiatan Prakerin direncanakan dari bulan Juni hingga November 2023.

Setelah Prakerin dilaksanakan, akan diadakan Evaluasi Pelaksanaan Prakerin di bulan terakhir Prakerin. Pembimbing dari siswa Prakerin tersebut adalah karyawan dari PT MKG sendiri, sehingga bisa menunjukkan kondisi dunia kerja industri secara langsung dan tepat.

“Dalam kesempatan ini juga dihadiri Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sekaligus pembahasan dan perintisan kerjasama yang juga akan direalisasikan dalam penandatanganan *MoU* dengan SMK SMTI Banda Aceh,” pungkaskan Junaidi. 

KHASIAT GAMBIR JADI PEWARNA ALAMI KAIN TENUN

Tanaman gambir memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai bahan baku pewarna alami, yang telah dimanfaatkan oleh industri tekstil. Peningkatan nilai tambah ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian para petani hingga pelaku usahanya.





Tanaman gambir boleh jadi terdengar asing untuk telinga sebagian besar masyarakat di tanah air. Namun bagi masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Papua, tanaman perkebunan dari suku *Rubiaceae* itu relatif dikenal.

Pasalnya, kelima provinsi itu telah dinobatkan sebagai sentra produksi gambir nasional. Dari kelima provinsi itu, kapasitas produksi terbesar ada di Sumatera Barat, yakni mencapai 80 % produksi gambir nasional. Jika lebih dirincikan, sentra gambir itu mayoritas berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

Saat ini, India tercatat sebagai pengimpor komoditas gambir itu dengan porsi hingga 68 % dari produksi nasional. Lantas, apa sebenarnya manfaat dari tanaman gambir tersebut? Sejatinya, tanaman gambir memiliki banyak manfaat.

Tim peneliti LIPI bahkan telah membuktikan tanaman itu efektif mencegah berkembangnya sel kanker kulit. Selain dikenal sebagai campuran untuk menyirih, gambir juga bermanfaat bagi industri farmasi, bahan baku pasta gigi dan kosmetik, obat cuci luka bakar, obat diare, disentri, dan kudis, serta obat kumur untuk mengatasi sariawan dan sakit tenggorokan.

Gambir juga memiliki manfaat lain yang cukup dikenal sejak lama oleh masyarakat, khususnya di kelima provinsi itu, sebagai bahan baku pewarna alami kain. *Nah*, manfaat itulah yang kini seolah melambungkan tanaman gambir, menyusul adanya tuntutan terhadap industri tekstil untuk menggunakan pewarna alami, sebagai bahan baku berkelanjutan.

Seiring itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian juga mendorong terciptanya inovasi dalam upaya mendukung peningkatan daya saing sektor industri, termasuk bagi pelaku industri kecil dan

menengah (IKM). Salah satunya, seperti yang dilakukan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang dengan mengenalkan penggunaan pewarna alam yang memanfaatkan limbah cair gambir.

“Sejak 2015, BSPJI Padang terus mengenalkan temuannya, yakni penggunaan pewarna alam yang memanfaatkan dari limbah cair gambir untuk diterapkan di IKM tenun,” kata Kepala BSKJI Kemenperin, Doddy Rahadi.

Doddy mengemukakan, pemanfaatan gambir sebagai pewarna alam untuk benang tenun telah terbukti menghasilkan warna-warna khas pada kain tenun. “Setelah mendapat pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis dan konsultasi oleh tim BSPJI Padang, IKM tenun merasa yakin kalau warna dari limbah cair gambir punya prospek yang potensial untuk dikembangkan sebagai pewarna benang tenun,” ujarnya.

Menurut Doddy, pewarna alam dari limbah gambir ini telah banyak peminatnya, terutama para desainer dan pelaku IKM fesyen yang mengusung produk kultural dan etnologi. “Apalagi saat ini cukup banyak minat masyarakat terhadap produk-produk natural, sehingga ini menjadi peluang bagi IKM fesyen untuk memproduksi kain tenun dengan pewarna alam dari limbah gambir,” ungkapnya.

Salah satu IKM di Padang yang telah mengembangkan peluang tersebut adalah CV. Ryur Namuri Chan dengan produk Tenun Kubang H. Ridwan By. IKM yang bergerak di bidang usaha pembuatan kain tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) ini telah memanfaatkan limbah gambir sebagai pewarna alam untuk benang tenunnya.

“Kegiatan pembinaan oleh BSPJI Padang pada IKM H. Ridwan By ini dilakukan melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) dari BSKJI Kemenperin pada tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya

peningkatan kemampuan IKM tenun dalam pemanfaatan limbah cair gambir pada proses pewarnaan benang tenun,” papar Doddy.

Kepala BSPJI Padang, M. Nilzam menyampaikan, kegiatan pembinaan pada IKM tenun dilakukan melalui bimbingan teknis dan konsultasi teknologi berupa perencanaan tempat pencelupan, persiapan bahan pewarna, proses dan tahapan pencelupan, dan uji coba proses pewarnaan benang tenun.

“Dalam kegiatan ini selain diberikan bimtek juga dirancang peralatan proses pencelupan untuk mewarnai benang tenun pada skala yang lebih besar,” terangnya. Penggunaan peralatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi proses pencelupan dan dihasilkan warna benang yang lebih merata.

Selain itu, warna yang dihasilkan lebih kuat (intens) karena proses pencelupan dapat dilakukan dalam suasana panas. “Proses pencelupan pada kondisi panas dapat mempercepat penyerapan difusi zat warna ke dalam serat benang,” tandasnya.

Bahkan, jika ditinjau dari aspek kelayakan ekonomi, penggunaan warna alam juga memberikan efisiensi yang tinggi, apabila dibandingkan dengan penggunaan warna sintetis. “Dengan biaya produksi sekitar Rp23,8 juta per bulan, bila terjual akan didapatkan penerimaan sekitar Rp36 juta, sehingga akan memberikan keuntungan lebih kurang Rp12,2 juta per bulan,” sebut Nilzam.

Selanjutnya, dilihat dari nilai *Revenue Cost Ratio* (R/C), nilainya sebesar 1,51 (>1). Artinya produksi tersebut layak untuk dikembangkan dan dapat memberikan keuntungan pada IKM dengan *Pay Back Period* 0,6 bulan. Artinya, dalam jangka waktu tersebut biaya produksi sudah terpenuhi. “Efisiensi yang dapat dicapai dalam memproduksi benang dengan pewarna alam limbah cair gambir ini adalah sekitar 51,37%,” imbuhnya.

Novia Hertini adalah seorang pemilik usaha butik Batik Loempo, yang menggunakan gambir sebagai pewarna tekstil alami. Ia punya kisah menarik selama berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan sektor IKM di kampung halamannya.

“Saya pernah pergi ke hutan-hutan untuk melihat perkebunan gambir yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Betapa terkejutnya, saya melihat banyak limbah gambir yang dibuang begitu saja oleh para petani,” ungkapnya. Padahal limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan lagi, salah satunya dijadikan pewarna tekstil alami. **mi**

MANFAAT PENERAPAN INDUSTRI HIJAU

Pada saat kondisi cuaca cerah, dengan langit yang membiru, tampak sekumpulan kambing dan sapi tengah asik makan rerumputan hijau dan sebagian minum di kubangan yang cukup jernih. Mereka yang dijaga oleh beberapa pengembala itu bukan sedang berada di taman wisata, melainkan di sekitar pabrik tekstil.

"Kami biasa melepasnya di sini karena rumputnya banyak dan airnya juga bersih," kata Anhar Sujana, salah satu pengembala. Ia tidak khawatir hewan ternak yang dijaganya itu keracunan dari limbah udara atau cair yang dibuang oleh pabrik tekstil tersebut.

Gambaran situasi itu bukan khayalan, tetapi nyata karena perusahaan sudah menerapkan standar industri hijau (SIH). Artinya, perusahaan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pakar Ekonomi Sirkular, Alexander Sonny Keraf menyampaikan bahwa kebijakan industri hijau sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang saat ini menjadi tren untuk mewujudkan *sustainability* atau keberlanjutan yang inklusif. "Dalam ekonomi sirkular, industri didorong melakukan proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif," tuturnya.

Menurut Sonny, implementasi konsep industri hijau membutuhkan investasi untuk membuat rancangan bisnis, desain produksi, distribusi, penggunaan energi, hingga pemanfaatan teknologi. "Di masa mendatang, semua sektor akan mengarah ke industri hijau," imbuhnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi menjelaskan, konsep *sustainability* (keberlanjutan) dalam berbagai aspek kehidupan tengah menjadi tren dunia. Praktik *sustainability* mengedepankan pemeliharaan lingkungan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Penerapan konsep *sustainability* juga sudah diadaptasi Kemenperin dalam melakukan pembinaan industri manufaktur dengan memacu pengembangan industri hijau.

"Industri hijau merupakan salah satu kebijakan sektor industri yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga pembangunan industri dapat selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat," paparnya.

Doddy menyampaikan, kebijakan penerapan Standar Industri Hijau

Sertifikasi Industri Hijau yang dilakukan Kemenperin diharapkan akan mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk turut berkontribusi pada penanganan perubahan iklim yang telah menetapkan target pengurangan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui kemampuan sendiri.

(SIH) dapat menjadi perangkat yang digunakan oleh industri untuk memenuhi regulasi penggunaan sumber daya berkelanjutan. Melalui upaya itu, perusahaan industri yang telah menerapkan konsep industri hijau juga diharapkan semakin memiliki daya saing yang tinggi. "Saatnya kita semua bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan dengan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Doddy menuturkan, hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 34 Standar Industri Hijau dan menunjuk 14 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), 12 di antaranya merupakan Balai di bawah BSKJI, termasuk Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK) Kemenperin.

Penunjukan BBSPJIKFK Kemenperin menjadi salah satu LSIH ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 Tahun 2021 dengan 11 ruang lingkup antara lain semen portland, pengolahan susu bubuk, cat berbasis air, pupuk urea, minyak goreng dari kelapa sawit, cat berbasis pelarut organik, gula kristal putih, pupuk NPK padat, tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik, kertas dan papan kertas gelombang dan kemasan dari kaca.

"Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJIKFK Kemenperin didukung oleh tiga orang auditor industri hijau. Pada konsistensi penerapan sistem mutunya, telah rutin melaksanakan audit internal dan oleh pihak eksternal setiap tahunnya, khusus untuk Sistem Mutu Sertifikasi Hijau telah diaudit eksternal oleh Pusat Industri Hijau Kemenperin," tutur Doddy.

Sertifikasi Industri Hijau yang dilakukan Kemenperin diharapkan akan mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk turut berkontribusi pada penanganan perubahan iklim yang telah menetapkan target pengurangan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui kemampuan sendiri. Sedangkan 41% lainnya melalui dukungan internasional pada tahun 2030 mendatang, sesuai dengan komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060.

Pada tahun 2022, LSIH BBSPJIKFK telah melaksanakan Sertifikasi Industri Hijau untuk tiga perusahaan industri dengan komoditas cat berbasis air dan pupuk urea. Salah satu perusahaan tersebut yaitu PT Avia Avian yang telah mendapatkan SIH dan sekaligus mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Industri Hijau Kinerja Terbaik pada Penghargaan Industri Hijau pada November lalu yang diselenggarakan oleh Kemenperin.

Sebagai upaya mendorong industri manufaktur di Tanah Air dalam menerapkan industri hijau, Balai-balai Kemenperin termasuk BBSPJIKFK Kemenperin terus melakukan sosialisasi. Kemenperin menargetkan agar para pelaku industri dapat bertransformasi menjadi industri hijau dan berpegang pada prinsip keberlanjutan dalam kegiatannya, untuk bersama-sama mendukung target pemerintah. "Hal ini guna mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu keberlangsungan alam bagi kehidupan generasi manusia di masa yang akan mendatang," tandasnya. 

AIMS: SOLUSI CEGAH PENCEMARAN EMISI DAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

Pembangunan industri memiliki konsekuensi terhadap kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu adanya penguasaan teknologi dan manajemen penanggulangan pencemaran industri, di mana industri harus mengimplementasikan standar sustainability yang dapat dicapai dengan penerapan industri hijau.

Artinya, perusahaan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi menjelaskan, implementasi kebijakan standar industri hijau menjadi instrumen yang digunakan oleh perusahaan industri atau pengelola kawasan industri untuk memenuhi regulasi penggunaan sumber daya berkelanjutan. Konsep industri hijau ini juga diyakini akan mendorong produktivitas dan daya saing perusahaan.

“Saatnya kita semua bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan dengan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan,” ujar Doddy. Menurutnya, upaya tersebut perlu ditopang pemanfaatan inovasi teknologi sesuai dengan penerapan program prioritas pada peta jalan *Making Indonesia 4.0*.

Guna mendukung pelaksanaan standar industri hijau dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri 4.0 sekaligus memberikan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri, salah satu unit kerja di bawah BSKJI Kemenperin, yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) Semarang telah menciptakan sistem monitoring aktif kontinyu terintegrasi dengan sistem informasi digital yang diberi nama *Adaptive Monitoring System (AiMS)*.

Kepala BBSPJPI Semarang, Sidik Herman menyampaikan, latar belakang pihaknya mengembangkan teknologi AiMS berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, yang menugaskan BBSPJPI Semarang untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri.

“Kami telah melihat bahwa banyak sektor industri yang membutuhkan alat untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam pentaatan pemantauan lingkungan secara *online*. Jadi, melalui AiMS ini, diharapkan industri akan mampu memitigasi pencemaran lingkungan sesuai standar industri hijau,” paparnya.

Seiring waktu, regulasi lingkungan industri juga semakin berkembang, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa regulasi turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 22



Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Regulasi ini yang menyebabkan pemantauan kualitas lingkungan di sektor industri dibutuhkan secara integratif dalam sebuah sistem informasi berbasis digital," imbuhnya.

Sidik menjelaskan, pemanfaatan AiMS ini akan berdampak positif terhadap efisiensi dalam proses yang ada dalam sektor industri. Selain itu, memenuhi kewajiban sejumlah sektor industri besar untuk memantau emisi dan limbah cair secara *online*, di antaranya industri rayon, pulp dan kertas, petrokimia hulu, oleokimia dasar, kelapa sawit, pupuk, pertambangan nikel, kilang minyak, serta kawasan industri.

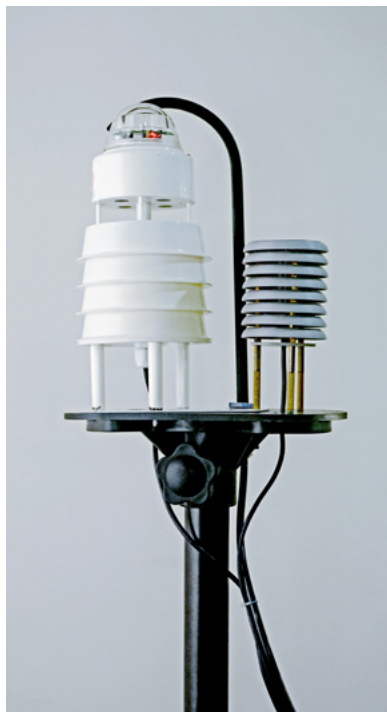
"Selain di dalam industri itu sendiri, juga ada masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang perlu dilindungi. Hal inilah yang membuat alasan kami untuk mengembangkan AiMS," ujarnya. Pada awalnya, AiMS dikembangkan sebagai kegiatan penelitian di sentra IKM pengecoran logam di Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, aktivitasnya untuk memantau dampak proses peleburan logam terhadap para pekerja.

"Setelah itu berkembang pada tahun 2018, kami juga sempat melakukan kerja sama penelitian dengan industri *crumb rubber* di Semarang, yang membuang emisi gas ammonia. Nah, saat itu kami melakukan monitoring dan kontrolnya sehingga proses produksi bisa lebih efisien dan lingkungan sekitar menjadi aman," terangnya.

Di tahun 2019, pengembangan AiMS mulai dilakukan secara online dan diupayakan terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Tahun 2021, kami melakukan inovasi AiMS dalam bentuk *portable* untuk memenuhi kebutuhan sejumlah laboratorium uji, khususnya yang melakukan pengujian emisi, untuk menggunakan alat yang berbasis elektronik," tandasnya.

Saat ini, BBSPJPPI Semarang telah mengembangkan AiMS yang dapat dimanfaatkan oleh industri dan lab uji lingkungan. "Jadi, AiMS ini terus berkembang, dari peralatan yang spesifik untuk industri tertentu, menjadi peralatan yang bersifat generik sesuai dengan kebutuhan industri, baik dalam hal pemenuhan regulasi maupun menjadi produk untuk substitusi impor bagi peralatan sejenis," tandasnya.

Namun demikian, dalam upaya pengembangan AiMS, terdapat tantangan seperti belum adanya ekosistem industri sensor di dalam negeri. Sehingga sensor



yang dipakai masih berasal dari produk impor. "Tetapi, AiMS dikembangkan dengan semangat 'Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri', sehingga beberapa komponen pendukung telah dapat diproduksi di dalam negeri," tegas Sidik.

RAIH SERTIFIKAT TKDN

Pada akhir Maret 2023, telah diterbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk AiMS sebesar 40% untuk tiga jenis, yakni AiMS *portable* untuk pemantau kualitas udara (9 parameter), AiMS *portable* untuk pemantau kualitas udara (7 parameter), dan AiMS *Air Quality Management System* (AQMS).

"Saat ini, AiMS sudah dipasarkan melalui e-Katalog LKPP, sehingga mempermudah dalam proses pengadaan bagi pemerintah. Dengan adanya sertifikat TKDN ini, kami berharap, AiMS bisa menjadi produk yang mendapat prioritas dalam proses pengadaan tersebut. Apalagi, salah satu keunggulan AiMS adalah harganya lebih murah hingga 30% dibanding produk impor sejenis," tuturnya.

Sidik mengemukakan, beberapa tahun terakhir kebutuhan pemantauan energi cukup masif dilakukan baik sebagai indikator pemantauan CO₂, CH₄, COD yang ekuivalen sebagai gas rumah kaca, maupun sebagai analisis kebutuhan energi di industri. Untuk itu, AiMS hadir guna mendukung komitmen Indonesia untuk makin berkontribusi

dalam menjaga suhu global sebagaimana tertuang dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC).

"AiMS sebagai sistem monitoring kualitas lingkungan industri turut berkontribusi dalam mendukung ENDC melalui data pemantauan kualitas gas rumah kaca yang terintegrasi," terangnya.

Menariknya, inovasi teknologi AiMS sudah dalam tahap komersialisasi. Artinya, ada pembelian dan pemanfaatan AiMS oleh sejumlah industri dan laboratorium. Misalnya, AiMS sudah dibeli dan digunakan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta. Selain itu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai, serta di laboratorium pengujian internal BBSPJPPI sebagai instrumen pengukuran kualitas lingkungan industri.

"Dalam proses *Proof of Concept*, AiMS juga sudah digunakan ke beberapa industri seperti PT. Dan Liris (Tekstil), PT. Sidoagung Farm (Pakan Ternak), PT. Ungaran Sari Garment (Garmen), CV. Jadi Jaya Makmur (*Crumb Rubber*), serta di IPAL BBSPJPPI," tandasnya.

Untuk dapat melakukan produksi massal, BBSPJPPI Semarang telah melakukan kerja sama dengan beberapa industri yang memiliki workshop, yaitu PT. Autentik Karya Analitika serta PT. Chronos Universal untuk produksi AiMS. Sedangkan pemasarannya, BBSPJPPI bekerja sama dengan PT. Mitra Karya Analitika serta PT. Telkomsel. "Kami optimistis, dengan adanya dukungan dan perhatian dari pimpinan, inovasi teknologi ini dapat dimanfaatkan banyak oleh penggunaannya," lanjut Sidik.

Hebatnya lagi, AiMS yang merupakan karya anak bangsa ini diciptakan untuk bisa menjawab kebutuhan transformasi digital pada sektor industri. Sebab, AiMS dilengkapi teknologi IoT dengan penyimpanan berbasis *cloud* serta kemudahan penggunaan dan fitur ekspor data. Bahkan, AiMS telah dikembangkan dengan *native android application* dan *web based reporting*.

"Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas, serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan industri kedepan, sehingga saat ini BBSPJPPI telah membentuk ekosistem kerja sama dengan industri. Hadirnya teknologi industri 4.0 semakin mendukung terjadinya kolaborasi yang menjadi syarat utama dalam upaya mengoptimalkan daya saing industri," pungkasnya. 

DONGKRAK NILAI TAMBAH SALAK

Kebijakan hilirisasi bisa menjadi peluang bagi pelaku industri kecil untuk naik kelas. Selain itu, seiring dengan adanya transformasi digital, akan mempercepat akses pasar dengan jangkauan yang lebih luas

Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian terus fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Salah satu komoditas hortikultura yang potensial dikembangkan di Indonesia adalah buah salak, yang sebagian banyak ditanam di wilayah Sulawesi Utara.

“Buah salak juga sudah terdaftar sebagai unggulan nasional dikarenakan tingginya permintaan pasar dalam negeri serta potensi ekspor yang semakin terbuka,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Doddy Rahadi.

Sulawesi Utara dikenal memiliki dua varietas salak, yaitu varietas zalacca yang banyak tumbuh di Pulau Tagulandang, Sangihe dan Talaud. Sedangkan, varietas amboinensis yang banyak ditemui di Desa Pangu, Minahasa Tenggara.

Di antara varietas tersebut, Salak Pangu memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis salak lain, yaitu rasanya yang manis dan gurih tanpa rasa sepat. Karakteristik ini dipengaruhi kandungan gula yang tinggi sebesar 23,30% dan komposisi tanninnya yang relatif kecil yaitu 0,08%.

“Namun, buah salak memiliki sifat mudah rusak. Selain itu, jika sudah terlepas dari tandannya, buah salak tidak dapat disimpan lama. Hal ini menjadi permasalahan ketika masa panen tiba karena jumlah salak melimpah namun tidak dapat segera didistribusikan,” ungkap Doddy.

Saat masa panen, pohon salak dapat dipanen dua kali sebulan dan setiap hektar kebun salak bisa menghasilkan 600-1000 kg salak. Menurut data Balai Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Ratahan Timur, di wilayah Pangu terdapat 553 ribu pohon salak produktif. Total produksi buah salak dari Minahasa Tenggara tercatat sebanyak 32 ribu ton pada tahun 2020. Saat masa panen ini, harga salak di pasaran akan turun dari harga normal Rp10.000 menjadi Rp3.000 per Kg.

“Hal ini tentu menjadi masalah besar bagi petani salak di wilayah Pangu. Oleh karena itu, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado berupaya untuk mencari solusinya dengan memperkenalkan teknologi pengolahan buah salak menjadi produk pangan dodol salak,” papar Doddy.

BSPJI Manado sebagai satuan kerja di bawah BSKJI Kemenperin, memiliki teknologi pembuatan dodol dari bermacam buah asli Sulawesi Utara seperti buah pala dan salak. “Dodol salak sangat tepat diperkenalkan ke masyarakat karena bahan bakunya mudah didapatkan, serta cara pembuatannya yang sederhana. Dodol salak menggunakan gula aren dan santan yang juga melimpah di wilayah Minahasa Tenggara,” imbuhnya.

Dalam upaya memperkenalkan hasil inovasi teknologi tersebut, BSPJI Manado bekerja sama dengan UD Mandiri sebagai mitra penerapan teknologi pengolahan dodol salak. Upaya pendampingan yang dilakukan BSPJI Manado meliputi pemilihan bahan baku, penggunaan teknologi pembuatan dodol salak, dan pengemasan produk yang sudah jadi.

“Awalnya buah salak yang diproses menjadi dodol hanya berasal dari kebun milik UD Mandiri. Setelah produknya mulai dikenal dan permintaan naik, UD Mandiri mulai mengambil buah



salak hasil kebun di sekitar Desa Pangu. Produk dodol yang sudah jadi dikemas dalam kemasan plastik dan juga kemasan tradisional daun woka (daun lontar),” tutur Kepala BSPJI Manado, Henry Pajow.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat dari waktu ke waktu, baik pasar lokal Sulut maupun luar Sulut, dalam sebulan UD Mandiri memproduksi sekitar 400 pak dodol siap jual. “Dalam setiap bulannya, kami biasanya tiga kali berproduksi, yang hasilnya berkisar 400 pak dodol. Jumlah tersebut cukup memenuhi kebutuhan pasar saat ini,” sebut Artje Sengkey, pemilik UD Mandiri.

Saat ini dodol salak produksi dari UD Mandiri telah dikenal sebagai oleh-oleh khas dari Sulawesi Utara. Setiap pak dodol salak (netto 130 gram) dijual dengan harga Rp10.000. Hal ini tentunya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan harga buah salak segar.

Dengan asumsi 400 pak terjual per bulan, maka omzet mencapai 4 juta rupiah. Untuk menghasilkan dodol sebanyak itu membutuhkan daging buah salak sebanyak 50 kg. Jika dijual segar, 50 kg buah salak hanya akan dihargai 400 ribu rupiah. Angka tersebut menunjukkan betapa meningkatnya nilai ekonomis buah salak setelah diolah menjadi dodol. Produk dodol salak UD Mandiri dapat ditemui di toko oleh-oleh di Minahasa Tenggara dan Manado serta di beberapa toko daring.

“Kami hanya pengusaha kecil di daerah, oleh karena itu kami bangga jika hasil produk kami bisa dibeli oleh banyak orang, termasuk para wisatawan dari luar negeri. Bahkan dodol produksi kami juga sudah pernah dipasarkan sampai ke luar daerah Sulut dan cukup laris,” tandas Artje. **mi**

Selamat Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei 2023



A person wearing a brown apron is cooking with a black wok on a gas stove. The wok is filled with a colorful vegetable stir-fry. The stove is lit, and the flame is visible. The background is a bright, white kitchen setting.

MEMASAK MENJADI AMAN

Dengan Kompor Gas Berlabel



SNI7469:2013